

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan rasa syukur atas nikmat dan rahmat Tuhan Yang Maha ESA sehingga atas ijin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, kami telah menyusun LKPJ Tahun 2021 untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kebumen.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya yang diberikan, semoga LKPJ Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja yang baik serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, Maret 2022



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1.2.1. Visi dan Misi	2
1.2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	4
1.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	12
1.3. Data Umum Daerah	12
1.3.1. Data Geografis Wilayah	12
1.3.2. Jumlah Penduduk	15
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk	16
1.3.4. Jumlah PNS	17
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	19
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	20
1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan	21
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD	23
2.1. Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah	24
2.2. Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah	26
2.3. Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	27
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	29
3.1. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	30
3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	31
1. Urusan Pendidikan	31
2. Urusan Kesehatan	48
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76
4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	90
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	96
6. Urusan Sosial	104

3.1.2.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	113
1.	Urusan Tenaga Kerja	113
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak..	120
3.	Urusan Pangan	130
4.	Urusan Lingkungan Hidup.....	141
5.	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	151
6.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	160
7.	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	172
8.	Urusan Perhubungan	179
9.	Urusan Komunikasi Dan Informatika	189
10.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	193
11.	Urusan Penanaman Modal.....	202
12.	Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga	210
13.	Urusan Statistik	216
14.	Urusan Persandian	219
15.	Urusan Kebudayaan	221
16.	Urusan Perpustakaan	226
17.	Urusan Kearsipan	231
3.1.3.	Pelaksanaan Urusan Pilihan	235
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	235
2.	Urusan Pariwisata	245
3.	Urusan Pertanian	252
4.	Urusan Perdagangan	267
5.	Urusan Perindustrian	276
6.	Urusan Transmigrasi.....	281
3.1.4.	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	285
1.	Sekretariat Daerah	285
2.	Sekretariat DPRD.....	298
3.1.5.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	306
1.	Fungsi Perencanaan, Penelaitian dan Pengembangan.....	307
2.	Fungsi Keuangan	316
3.	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	325
3.1.6.	Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	335
1.	Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan	335
3.1.7.	Pelaksanaan Urusan Kewilayahan	340
1.	Kecamatan dan Kelurahan.....	340
3.1.8.	Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum.....	434
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	434
3.1.9.	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.....	444
3.2.	Kebijakan Strategis yang ditetapkan	458

3.3.	Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2020	473
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN		477
4.1.	Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan	477
4.1.1.	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Tingkat Pemerintah tingkat atasnya	477
4.1.2.	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya	479
4.2.	Hambatan Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	482
BAB V PENUTUP		483

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB I	
Tabel 1. 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	5
Tabel 1. 2 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen	13
Tabel 1. 3 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen	14
Tabel 1. 4 Persebaran CAT Kabupaten Kebumen	15
Tabel 1. 5 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen.....	15
Tabel 1. 6 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021.	16
Tabel 1. 7 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2021	17
Tabel 1. 8 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)	20
Tabel 1. 9 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)	21
Tabel 1. 10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)	22
BAB II	
Tabel 2. 1 Perubahan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)	25
Tabel 2. 2 Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)	27
Tabel 2. 3 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)	28
BAB III	
Tabel 3. 1 Skala Penilaian.....	30
Tabel 3. 2 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	32
Tabel 3. 3 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	45
Tabel 3. 4 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	49
Tabel 3. 5 Data Kasus Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2021	69
Tabel 3. 6 Data Kasus Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2021	71
Tabel 3. 7 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	73
Tabel 3. 8 Data Kasus Gizi Buruk Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	75
Tabel 3. 9 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021	77
Tabel 3. 10 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 2020-2021	88
Tabel 3. 11 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	89
Tabel 3. 12 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen	89
Tabel 3. 13 Capaian pelayanan air bersih perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021	90
Tabel 3. 14 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	91
Tabel 3. 15 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	93
Tabel 3. 16 Data lokasi kawasan kumuh dan penanganan s/d tahun 2021	94

Tabel 3. 17	Capaian Penanganan Rumah Layak Huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	96
Tabel 3. 18	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2021	97
Tabel 3. 19	Perkembangan Capaian Kinerja Kebumen Tahun 2020-2021	103
Tabel 3. 20	Data Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021	103
Tabel 3. 21	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2021	105
Tabel 3. 22	Cakupan Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	113
Tabel 3. 23	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	114
Tabel 3. 24	Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	119
Tabel 3. 25	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	121
Tabel 3. 26	Capaian Indikator Kinerja	130
Tabel 3. 27	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021	131
Tabel 3. 28	Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	140
Tabel 3. 29	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	142
Tabel 3. 30	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	150
Tabel 3. 31	Capaian IKLH Kabupaten Kebumen.....	151
Tabel 3. 32	Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen.....	151
Tabel 3. 33	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2021	152
Tabel 3. 34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan	158
Tabel 3. 35	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	161
Tabel 3. 36	Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	170
Tabel 3. 37	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ..	173
Tabel 3. 38	Perkembangan Indikator Kinerja	178
Tabel 3. 39	Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2020-2021	179
Tabel 3. 40	Rekapitulasi Tingkat Kesejahteraan Keluarga	179
Tabel 3. 41	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	180
Tabel 3. 42	Perkembangan Indikator Kinerja	188
Tabel 3. 43	Sarana Kelengkapan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	188
Tabel 3. 44	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2021	190
Tabel 3. 45	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2021	192
Tabel 3. 46	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021	194

Tabel 3. 47 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021.....	200
Tabel 3. 48 Data Jumlah Koperasi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2021	200
Tabel 3. 49 Jumlah UMKM Kabupaten Kebumen Tahun 2021	201
Tabel 3. 50 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	203
Tabel 3. 51 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021.....	208
Tabel 3. 52 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2021	211
Tabel 3. 53 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan.....	215
Tabel 3. 54 Jumlah Perhitungan Capaian Realisasi.....	216
Tabel 3. 55 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	217
Tabel 3. 56 Kinerja Urusan statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	219
Tabel 3. 57 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	220
Tabel 3. 58 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	222
Tabel 3. 59 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	227
Tabel 3. 60 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	231
Tabel 3. 61 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan	231
Tabel 3. 62 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	232
Tabel 3. 63 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	234
Tabel 3. 64 Perkembangan Penerapan Arsip Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	235
Tabel 3. 65 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021	237
Tabel 3. 66 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan.....	245
Tabel 3. 67 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	246
Tabel 3. 68 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata	251
Tabel 3. 69 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	253
Tabel 3. 70 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	266
Tabel 3. 71 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	269
Tabel 3. 72 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021.....	273
Tabel 3. 73 Data Pasar Tradisional Kabupaten Kebumen Tahun 2021	273
Tabel 3. 74 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	277
Tabel 3. 75 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021.....	280

Tabel 3. 76 Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2021	282
Tabel 3. 77 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2020	285
Tabel 3. 78 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	286
Tabel 3. 79 Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2021	297
Tabel 3. 80 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	299
Tabel 3. 81 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	306
Tabel 3. 82 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021	309
Tabel 3. 83 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2020-2021	316
Tabel 3. 84 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021	316
Tabel 3. 85 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021	317
Tabel 3. 86 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD	325
Tabel 3. 87 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2021	327
Tabel 3. 88 Perkembangan Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	334
Tabel 3. 89 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021	337
Tabel 3. 90 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kebumen 2020-2021	339
Tabel 3. 91 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	342
Tabel 3. 92 Perkembangan Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019-2021.....	434
Tabel 3. 93 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	436
Tabel 3. 94 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum.....	443
Tabel 3. 95 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	444
Tabel 3. 107 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Daerah	460
Tabel 3. 108 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2020 dan Rencana tindak lanjut.....	473

BAB IV

Tabel 4. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2021	478
Tabel 4. 2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya	479

DAFTAR GAMBAR

Halaman

BAB I

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen 13

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
BAB III	
Grafik 3.1 Angka Kematian Bayi Tahun 2021	71
Grafik 3.2 AKI Tahun 2016 s/d 2021	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

Mendasari ketentuan diatas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Terhadap LKPJ Tahun 2021, memuat capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah:

"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;

2. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
3. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
4. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
5. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan. Misi Kabupaten Kebumen terbagi dalam 6 (enam) sasaran yaitu:

- a. membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- b. peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
- c. mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian,

- industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
 - f. memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

1.2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Selanjutnya Rumusan strategi disusun menjadi langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkembang melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas							
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	A	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
				2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	B	Perluasan akses pendidikan formal
		1.2	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	C	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
		1.3	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4	Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda, olahraga dan prasarana olahraga	D	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda, olah raga dan prasarana olah raga
		1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	e	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
				6	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
				7	Meningkatkan upaya penanggulang-an penyakit		
				8	Meningkatkan perilaku hidup sehat	F	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
				9	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	g	Peningkatan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				10	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	H	Peningkatan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar
Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat							
1.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	A	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai ajaran agama
				2	Meningkatkan Pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	B	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama
2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	2.1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	3	Meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	c	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan							
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Meningkat-nya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	A	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
				2	Mengembangkan kawasan perdesaan	B	Pembangun-an wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
				3	Mengembangkan Kawasan Industri		
				4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	C	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota.
				5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi		
				6	Penganekaragaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	D	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal
				7	Peningkatan operasi pasar	E	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat
				8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegi-atan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatlan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	F	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri.
				9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	G	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah		
				11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD	H	Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah
2.	Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	2.1	Meningkatnya daya saing investasi daerah	12	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	I	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.
		2.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	13	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	J	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/ masyarakat
3.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	3.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	14	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	I	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
				15	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi		
				16	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi		
				17	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	j	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah
				18	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa		
				19	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan	K	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
				20	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	L	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				21	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	M	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik
				22	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	N	Peningkatan pelayanan bidang tenaga-listrikan
4.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	4.1	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	23	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	O	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan							
1.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	1.1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	A	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
2.	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	2.1	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	2	Meningkatkan keterampilan masyarakat	B	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
				3	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat		

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat							
1.	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	A	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
				2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		
		1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	3	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	B	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan
Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama							
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	1.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	A	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (<i>Good and Clean Governance</i>)
				2	Meningkatkan prosedur pelaporan sisten keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	B	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangun-an menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesimbangan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		1.2	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	3	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	C	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021

1.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Pembangunan pada tahapan ini diarahkan untuk memulihkan perekonomian daerah dan kehidupan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Selain itu, Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021 tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan menggalakkan program vaksinasi dan gerakan 5M.

Pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 juga merupakan jawaban atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 didapatkan dengan mendasari kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Dalam bab VII RPJMD Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing. Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detail dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1) :

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo
- Sebelah selatan Samudera Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen



Sumber : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km² atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km².

Tabel 1. 2 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	81	396
2	Buayan	20	0	90	341
3	Puring	23	0	98	318
4	Petanahan	21	0	81	258
5	Klirong	24	0	107	318
6	Buluspesantren	21	0	82	386
7	Ambal	32	0	113	313
8	Mirit	22	0	70	265
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	130
11	Padureso	9	0	23	86
12	Kutowinangun	19	0	80	241
13	Alian	16	0	73	254
14	Poncowarno	11	0	34	100

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
15	Kebumen	24	5	138	554
16	Pejagoan	13	0	64	257
17	Sruweng	21	0	97	332
18	Adimulyo	23	0	81	227
19	Kuwarasan	22	0	86	247
20	Rowokele	11	0	61	294
21	Sempor	16	0	74	368
22	Gombong	12	2	81	288
23	Karanganyar	7	4	61	242
24	Karanggayam	19	0	76	390
25	Sadang	7	0	35	131
26	Karangsambung	14	0	62	252
	Total	449	11	1930	7127

Sumber : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah dan kawasan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d. 997,5 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

Sumber: Kebumen dalam Angka, Tahun 2021

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

Secara Hidrogeologis, Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen

yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (*akuifer*) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m²/tahun. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Salah satu jenis air tanah dalam adalah Cekungan Air Tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Persebaran CAT Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumudal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombang, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber: Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

1.3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.405.644 jiwa, tumbuh sebesar 0,40% dari tahun 2020. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 713.565 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 692.079 jiwa. Adapun data jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebagaimana data berikut ini :

Tabel 1. 5 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ayah	33.656	32.631	66.287
2	Buayan	34.594	33.148	67.742
3	Puring	33.039	32.178	65.217
4	Petanahan	31.108	30.510	61.618
5	Klirong	33.111	32.282	65.393
6	Buluspesantren	30.793	29.649	60.442
7	Ambal	33.048	31.661	64.709

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
8	Mirit	27.983	27.073	55.056
9	Prembun	14.825	14.718	29.543
10	Kutowinangun	25.186	24.298	49.484
11	Alian	35.412	33.808	69.220
12	Kebumen	68.239	66.412	134.651
13	Pejagoan	28.742	27.551	56.293
14	Sruweng	32.057	31.353	63.410
15	Adimulyo	19.148	19.245	38.393
16	Kuwarasan	26.651	25.666	52.317
17	Rowokele	26.693	26.118	52.811
18	Sempor	36.426	35.167	71.593
19	Gombong	25.298	25.376	50.674
20	Karanganyar	19.310	18.981	38.291
21	Karanggayam	31.311	30.020	61.331
22	Sadang	12.196	11.423	23.619
23	Bonorowo	11.388	10.963	22.351
24	Padureso	8.636	8.420	17.056
25	Poncowarno	9.728	9.394	19.122
26	Karangsambung	24.987	24.034	49.021
	Jumlah	713.565	692.079	1.405.644

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2021

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kebumen lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2021 berkisar antara 103%. Nilai ini diartikan setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 103 penduduk laki-laki. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang di Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kebumen sebanyak 134.651 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Padureso sebanyak 17.056 jiwa.

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 capaian pertumbuhan sebesar 0,40%. Faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk tahun 2021 dibandingkan dengan 2020 yaitu dipengaruhi oleh faktor kelahiran (fertilitas). Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang berstatus kawin sejumlah 704.084 di Tahun 2020 dan 704.692 di Tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 6 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan Penduduk
		2020	2021	

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan Penduduk
		2020	2021	
1	Ayah	66.015	66.287	0.41%
2	Buayan	67.377	67.742	0.54%
3	Puring	64.869	65.217	0.53%
4	Petanahan	61.322	61.618	0.48%
5	Klirong	65.152	65.393	0.37%
6	Buluspesantren	60.356	60.442	0.14%
7	Ambal	64.448	64.709	0.40%
8	Mirit	54.599	55.056	0.83%
9	Prembun	29.530	29.543	0.04%
10	Kutowinangun	49.511	49.484	-0.05%
11	Alian	68.652	69.220	0.82%
12	Kebumen	134.132	134.651	0.39%
13	Pejagoan	56.001	56.293	0.52%
14	Sruweng	63.030	63.410	0.60%
15	Adimulyo	38.503	38.393	-0.29%
16	Kuwarasan	52.197	52.317	0.23%
17	Rowokele	52.669	52.811	0.27%
18	Sempor	71.428	71.593	0.23%
19	Gombong	50.676	50.674	0.00%
20	Karanganyar	38.202	38.291	0.23%
21	Karanggayam	60.901	61.331	0.70%
22	Sadang	23.411	23.619	0.88%
23	Bonorowo	22.217	22.351	0.60%
24	Padureso	17.026	17.056	0.18%
25	Poncowarno	18.991	19.122	0.69%
26	Karangsambung	48.761	49.021	0.53%
Jumlah		1.399.976	1.405.644	0.40%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2021

1.3.4. Jumlah PNS

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat; 17 (tujuh belas) Dinas, 4 (empat) Badan; dan 26 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada perangkat daerah tersebut sampai dengan tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 7 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2021

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1.	Sekretariat Daerah	80	58	138
2.	Staf Ahli Bupati	1	1	2
3.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	31	20	51
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	4	22
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27	23	50
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	36	11	47
7.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan	23	13	36

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
	Pengembangan Daerah			
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	10	18
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	24	11	35
10.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	46	10	56
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	12	31
12.	Dinas Kesehatan	534	1435	1969
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	10	31
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	179	28	207
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	18	33
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	14	26
17.	Dinas Pendidikan	2902	1803	4705
18.	Dinas Perhubungan	34	7	41
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80	18	98
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	104	105	209
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	39	15	54
22.	UPT Daerah Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat	16	2	18
23.	UPT Daerah Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Timur	36	8	44
24.	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19	12	31
25.	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31	17	48
26.	Inspektorat	26	19	45
27.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	15	6	21
28.	Kecamatan Adimulyo	12	4	16
29.	Kecamatan Alian	11	1	12
30.	Kecamatan Ambal	10	4	14
31.	Kecamatan Ayah	11	6	17
32.	Kecamatan Bonorowo	11	3	14
33.	Kecamatan Buayan	14		14
34.	Kecamatan Buluspesantren	7	6	13
35.	Kecamatan Gombong	9	5	14
36.	Kecamatan Karanganyar	10	4	14
37.	Kecamatan Karanggayam	12	1	13
38.	Kecamatan Karangsambung	11	6	17
39.	Kecamatan Kebumen	6	5	11
40.	Kecamatan Klirong	9	2	11
41.	Kecamatan Kutowinangun	15	3	18
42.	Kecamatan Kuwarasan	14	3	17
43.	Kecamatan Mirit	9	6	15
44.	Kecamatan Padureso	8	2	10
45.	Kecamatan Pejagoan	11	4	15
46.	Kecamatan Petanahan	10	7	17
47.	Kecamatan Poncowarno	12	3	15
48.	Kecamatan Prembun	6	11	17

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
49.	Kecamatan Puring	16	2	18
50.	Kecamatan Rowokele	9	5	14
51.	Kecamatan Sadang	9	3	12
52.	Kecamatan Sempor	13	3	16
53.	Kecamatan Sruweng	11	2	13
54.	Kelurahan Bumirejo	2	3	5
55.	Kelurahan Gombong	5	1	6
56.	Kelurahan Jatiluhur	3	4	7
57.	Kelurahan Karanganyar	7	1	8
58.	Kelurahan Kebumen	2	4	6
59.	Kelurahan Panjatan	6	1	7
60.	Kelurahan Panjer	4	2	6
61.	Kelurahan Plarangan	4	3	7
62.	Kelurahan Selang	2	3	5
63.	Kelurahan Tamanwinangun	4		4
64.	Kelurahan Wonokriyo	4	1	5
65.	Sanggar Kegiatan Belajar	5	4	9
66.	Satuan Polisi Pamong Praja	46	3	49
67.	Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	23	7	30
	JUMLAH	4769	3828	8597

Sumber : BKPSDM Kab. Kebumen, 2021

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Perbandingan realisasi pendapatan Kabupaten Kebumen tahun 2020 (audited) dengan 2021 (unaudited) mengalami kenaikan 2,5%, dimana di tahun 2020 (audited) realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.763.229.307.229,80 dan di tahun 2021 (unaudited) realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.832.170.709.948,00, sedangkan capaian realisasi tahun 2021 terhadap target di tahun 2021 mencapai 103,3%, hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp. 2.741.711.600.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.832.170.709.948,00.

Kondisi tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 472.152.407.382,00 atau tercapai 118,34% dari target sebesar Rp 398.974.820.000,00, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp.2.222.632.960.883,00 dari anggaran sebesar Rp.2.209.563.280.000,00 atau sebesar 100,59% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari target sebesar Rp 133.173.500.000,00 tercapai Rp.137.385.341.683,00 atau 103,16%.

Untuk rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2021 (unaudited) dan realisasi tahun 2020 (audited) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 8 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021
(unaudited)

NO	URAIAN	TAHUN 2021			TAHUN 2020 (Audited)
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp.)
	PENDAPATAN	2.741.711.600.000,00	2.832.170.709.948,00	103,30%	2.763.229.307.229,80
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	1. Pajak Daerah	101.551.500.000,00	112.474.854.190,00	110,76%	100.877.584.517,00
	2. Retribusi Daerah	29.520.683.000,00	23.653.160.977,00	80,12%	22.068.306.403,00
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.552.859.000,00	16.552.860.815,00	100%	15.727.758.649,00
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	251.349.778.000,00	319.471.531.400,00	127,10%	264.352.314.214,80
	JUMLAH (I)	398.974.820.000,00	472.152.407.382,00	118,34%	403.025.963.783,80
2	PENDAPATAN TRANSFER				
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.051.701.194.000,00	2.059.293.466.080,00	100,37%	2.074.494.939.094,00
	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.862.086.000,00	163.339.494.803,00	103,47%	130.966.524.602,00
	3. Bantuan Keuangan				17.991.610.589,00
	JUMLAH (II)	2.209.563.280.000,00	2.222.632.960.883,00	100,59%	2.223.453.074.285,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
	1. Pendapatan Hibah	3.795.000.000,00	8.794.749.700,00	231,75%	136.750.269.161,00
	2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	129.378.500.000,00	128.590.591.983,00	99,39%	
	JUMLAH (III)	133.173.500.000,00	137.385.341.683,00	103,16%	136.750.269.161,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

Dari tabel diatas untuk jenis Pendapatan Asli Daerah yang tidak memenuhi target yaitu Retribusi Daerah, kemudian apabila ditinjau dari sumber daya pendapatan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih merupakan faktor yang dominan dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp 2.222.632.960.883,00 atau 78,5% dari seluruh realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 2.832.170.709.948,00.

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Secara umum belanja daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2021 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos terutama terkait pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak secara sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19.

Berikut ini Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Tabel 1. 9 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	BELANJA OPERASI	2.049.740.910.000	1.901.995.140.459	92,79
1	Belanja Pegawai	1.213.347.347.000	1.141.262.313.703	94,06
2	Belanja Barang dan Jasa	733.937.101.000	666.288.730.026	90,78
3	Belanja Subsidi	500.000.000	484.527.400	96,91
4	Belanja Hibah	78.200.274.000	72.480.669.601	92,69
5	Belanja Bantuan Sosial	23.756.188.000	21.478.899.729	90,41
II	BELANJA MODAL	291.188.892.000	266.087.980.340	91,38
1	Belanja Modal Tanah	4.911.216.000	4.062.715.011	82,72
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.203.064.000	112.060.933.500	91,70
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.461.739.000	44.827.545.305	92,50
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.679.178.000	97.454.097.763	90,50
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.933.695.000	7.682.688.761	96,84
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.216.770.000	545.318.400	8,77
1	Belanja Tidak Terduga	6.216.770.000	545.318.400	8,77
IV	BELANJA TRANSFER	610.915.337.000	610.545.516.650	99,94
1	Belanja Bagi Hasil	14.019.972.000	13.862.929.650	98,88
2	Belanja Bantuan Keuangan	596.895.365.000	596.682.587.000	99,96
	BELANJA DAERAH	2.958.061.909.000	2.779.173.955.849	93,95

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan

Secara umum pembiayaan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2021 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos serta pemulihan dampak secara sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan sebagaimana data berikut ini :

Tabel 1. 10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	221.450.309.000,00	222.083.034.565,98	100,29
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	219.950.309.000,00	219.983.034.565,98	100,01
2	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000,00	2.100.000.000,00	140,00
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	100,00
1	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
2	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	216.350.309.000,00	216.983.034.565,98	100,29

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Mengingat terjadinya penurunan aktivitas ekonomi pada tahun 2020 dan kemungkinan berlanjut pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 diarahkan dalam rangka pemulihan ekonomi dengan memfokuskan kepada penciptaan lapangan kerja untuk penurunan angka pengangguran, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan serta dengan prioritas dan optimalisasi sektor unggulan dan sektor pendukungnya yang tangguh terhadap berbagai ancaman disruptive di kemudian hari. Penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk pangan yang kompetitif serta tangguh;
4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk pangan unggulan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal maupun non formal;
6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8. Peningkatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
9. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
10. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
11. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik melalui upaya padat karya dan penggunaan tenaga kerja lokal pada proyek infrastruktur; dan
12. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah paling substantif yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 serta mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan tahunan maupun jangka menengah. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan Perubahan RKPD Tahun 2021 juga dilakukan baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.1. Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2021, ditengah-tengah kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berupaya melakukan penanganan pandemi Covid-19, dimana Pemerintah Pusat melakukan pengurangan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) beberapa kebijakan peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Optimalisasi PAD melalui:

- a. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
- c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
- d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
- f. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
- g. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- i. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
- j. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;

- k. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
 - l. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan
 - m. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan hibah; dan
3. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

Secara umum pendapatan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2021 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos. Perubahan anggaran pendapatan pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perubahan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)

NO	URAIAN	APBD 2021		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	354.421.071.000	398.974.820.000	44.553.749.000	13
1.	Pajak Daerah	95.534.500.000	101.551.500.000	6.017.000.000	6
2.	Retribusi Daerah	30.211.764.000	29.520.683.000	(691.081.000)	2
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.484.000.000	16.552.859.000	4.068.859.000	33
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	216.190.807.000	251.349.778.000	35.158.971.000	16
B.	Pendapatan Transfer	2.262.776.437.000	2.209.563.280.000	(53.213.157.000)	2
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.106.071.310.000	2.051.701.194.000	(54.370.116.000)	3
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.705.127.000	157.862.086.000	1.156.959.000	1
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	133.173.500.000	133.173.500.000	(1.967.000.000)	1

NO	URAIAN	APBD 2021		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
1.	Pendapatan Hibah	3.795.000.000	3.795.000.000	0	0
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	131.345.500.000	129.378.500.000	(1.967.000.000)	1
Pendapatan Daerah		2.752.338.008.000	2.741.711.600.000	(10.626.408.000)	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

2.2. Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah

Adapun kebijakan umum perubahan belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 antara lain:

1. Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan mandatory spending sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
3. Pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan tangguh;
4. Akselerasi pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen dan Renstra OPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
5. Penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
6. Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan.

Secara umum belanja daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2021 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos terutama terkait pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak secara sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Perubahan anggaran belanja pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)

NO	URAIAN	APBD 2021		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
I.	Belanja Operasi	1.932.804.072.000	2.049.740.910.000	116.936.838.000	6
1.	Belanja Pegawai	1.187.836.875.000	1.213.347.347.000	25.510.472.000	2
2.	Belanja Barang dan Jasa	630.206.760.000	733.937.101.000	103.730.341.000	16
3.	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	0	0
4.	Belanja Hibah	84.160.160.000	78.200.274.000	(5.959.886.000)	7
5.	Belanja Bantuan Sosial	30.100.277.000	23.756.188.000	(6.344.089.000)	21
II.	Belanja Modal	273.065.757.000	291.188.892.000	18.123.135.000	7
1.	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000	4.911.216.000	1.911.216.000	64
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.309.474.000	122.203.064.000	41.893.590.000	52
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.670.579.000	48.461.739.000	(5.208.840.000)	10
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.053.738.000	107.679.178.000	(18.374.560.000)	15
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.031.966.000	7.933.695.000	(2.098.271.000)	21
III.	Belanja Tak Terduga	1.445.000.000	6.216.770.000	4.771.770.000	330
1.	Belanja Tidak Terduga	1.445.000.000	6.216.770.000	4.771.770.000	330
IV.	Belanja Transfer	611.100.337.000	610.915.337.000	(185.000.000)	0
1.	Belanja Bagi Hasil	14.019.972.000	14.019.972.000	0	0
2.	Belanja Bantuan Keuangan	597.080.365.000	596.895.365.000	(185.000.000)	0
Belanja		2.818.415.166.000	2.958.061.909.000	139.646.743.000	5

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

2.3. Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diantaranya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) audited yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Pengembalian Pinjaman Daerah dari Kelompok Tani untuk Dana Talangan Pangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diantaranya untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah pada Perda

APBD Tahun Anggaran 2021 dan pemberian pinjaman kepada kelompok tani (gabungan kelompok tani). Perubahan dari pemberian dana bergulir kepada nelayan untuk antisipasi keterlambatan pelaksanaan lelang ikan sebesar Rp.600.000.000,00 merupakan pengalihan dari belanja program/kegiatan.

Secara umum pembiayaan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2021 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos. Perubahan anggaran pembiayaan pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (unaudited)

NO	URAIAN	APBD 2021		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
I.	Penerimaan Pembiayaan	70.577.158.000	221.450.309.000	150.873.151.000	214
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70.577.158.000	219.950.309.000	149.373.151.000	212
2.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	1.500.000.000	1.500.000.000	100
II.	Pengeluaran pembiayaan	4.500.000.000	5.100.000.000	600.000.000	13
1.	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
2.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	2.100.000.000	600.000.000	40
Pembiayaan Netto		66.077.158.000	216.350.309.000	150.273.151.000	227

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2021

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah Tahun 2021 merupakan laporan realisasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dimana merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Pada tahun 2021 diharapkan ekonomi Kabupaten Kebumen telah dalam kondisi berkembang melalui dukungan sektor agrobisnis yang berkualitas serta sektor unggulan lain seperti pariwisata sehingga mampu meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Pembangunan daerah tahun 2021 juga mempertimbangkan permasalahan global yang terjadi pada tahun 2020 lalu yaitu terjadinya pandemi Covid-19, sehingga tema pembangunan yang diusung dalam RKPD tahun 2021 adalah “Pemulihan Perekonomian Daerah dan Kehidupan Sosial Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.” dengan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2021 antara lain:

1. Pemulihan perekonomian daerah berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata;
2. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Pemulihan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan penciptaan konduktivitas wilayah.

Penentuan lima prioritas pembangunan daerah tahun 2021 tersebut di atas merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Untuk mengukur ketercapaiannya maka telah dirumuskan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan 103 IKU Perangkat Daerah. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2021 dapat digambarkan dalam capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan hasil capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan pada seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelum menjelaskan hasil Capaian IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah terlebih dahulu digambarkan tentang capaian program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021.

3.1. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Dengan indikator outcome, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Indikator hasil program yang akan dicapai tertuang dalam RPJMD yang direncanakan atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan.

Untuk mengetahui capaian kinerja urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari evaluasi kinerja tahun 2021 dengan mengidentifikasi Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja, demikian pula dengan perhitungan analisis tingkat capaian antara kegiatan dengan target kinerja program dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Penilaian

SKALA NILAI		
1.	Sangat Tinggi	≥ 91%
2.	Tinggi	76 – 90,99%
3.	Sedang	66 – 75,99%
4.	Rendah	51 – 65,99%
5.	Sangat Rendah	≤ 50,99

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- b. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
- c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

1. Urusan Pendidikan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan melalui program prioritas Program Pengelolaan Pendidikan. Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN		A PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 0-6; Persentase gedung PAUD/ sederajat dalam kondisi baik;"APK SD/MI; Persentase Gedung SD/SMP/ Sederajat dalam kondisi baik; Persentase gedung SD/ sederajat dalam kondisi baik; Persentase gedung SMP/ sederajat dalam kondisi baik;"Prosentase pendidik berkualifikasi S1;"Indeks survei layanan pendidikan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun (DID) : SDN 1 Jladri, Kec. Buayan Jumlah jamban siswa/guru yang terbangun (DID) : SDN 1 Giritirto, Kec. Karanggayam Jumlah Pembangunan Talud dan Pagar (DAU) : SDN 1 Pecarikan, SDN 2 Sрати Jumlah Pemb jamban DAK SDN 1 Wergonayan, SDN 1 Jogosimo, SDN 1 Surorejan Jumlah Pemb Perpustakaan DAK SDN 1 Gebangsari, SDN 2 Surorejan Jumlah ruang kelas Baru yang terbangun (DID) : SDN Pesawahan, Kec. Karangsambung Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun (DID) : SDN Pesawahan, Kec. Karangsambung	lokasi unit paket ruang paket ruang ruang	1 4 2 3 2 1 3	1 4 2 3 2 1 3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah jamban siswa/guruyang direhabilitasi (DAK) :SDN Tunjungseto, SDN 4Pandansari, SDN 3Donorojo, SDN 1Wergonayan, SDNLerepkebumen, SDNBonosari, SDN 1Karangrejo, SDN 2CandirenggoJumlah rehab jamban DID :SDN 1 Karanggadung, SDN2 Widoro, SDN Pakuran,BuayanJumlah rehab ruang guru :SDN 6 Panjer, Kebumen Jumlah rehab ruang kelas banprop : SDN 2 Kloposawit SDN 2 Ngasinan SDN Arjowinangun Jumlah Rehab ruang kelas SD DID SDN 2 Sampang Sempor, SDN 2 Jembangan, SDN Rogodadi Buayan, SDN 3 Giyanti Rowokele, SDN Jatimulyo Kuwarasan. Jumlah ruang guru yang direhabilitasi (DAK) : SDN 2 Kloposawit, SDN Ginandong, SDN Argosari, SDN 2 Kloposawit, SDN 1 Munggu, SDN 1 Tambakagung, SDN 2 Surejan Jumlah ruang kelas yang direhab (DAK) : SDN 4 Sampang, SDN 4 Pandansari, SDN Ginandong, SDN Glontor, SDN 2 Selogiri, SDN 3 Donorojo, SDN Mengkowo, SDN Kalisono, SDN Kejawang, SDN Argopeni, SDN Bonosari, SDN 2 Ngasinan, SDN 1 Munggu, SDN 1 Kuwayuhan Jumlah ruang kepala sekolah yang direhab (DAK) : SDN 2 Kloposawit Jumlah ruang perpustakaan yang direhab (DAK) : SDN 2 Selogiri, SDN 3 Demangsari, SDN 3 Bonjoklor, SDN 2 Candirenggo, SDN Rahayu Jumlah ruang UKS yang direhab DAK : SDN 2 Kloposawit	Ruang Sekolah Paket Ruang Sekolah Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang	38 3 1 6 5 5 61 1 6 1	38 3 1 6 5 5 61 1 6 1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket pengadaan mebel ruang kelas : SDN 1 Pandansari, SDN 2 Pandansari, SDN 3 Seliling, SDN Jabres, SDN Bulurejo, SDN Pesawahan SDN Sirnobojo, SDN 2 Kebulusan, SDN 3 Patukrejo, SDN 2 Brecong, SDN Bendogarap, SDN Gadungrejo, SDN 1 Balingasal, SDN 3 Kutowinangun, SDN 1 Karangsambung, SDN 3 Kebulusan, SDN Lerepkebumen, SDN 2 Pucangan, SDN 3 Kedungsari, SDN Kedungjati, SDN 1 Mulyosri, SDN 2 Tunggalroso, SDN 1 Ambalresmi. Jumlah paket pengadaan mebel ruang perpustakaan : SDN Pesawahan, Karangsambung	paket	25	25	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	d Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket pengadaan media pendidikan DAK : SDN 1 Jogosimo, SDN 1 Mrentul, SDN 1 Surorejan, SDN 1 Wergonayan, SDN 3 Donorojo, SDN Bonosari, SDN Ginandong, SDN Glonto	Paket	8	8	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	e Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitasnya	Sekolah	52	52	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	f Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI (DTKS DINSOS)	Siswa	2000	2000	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	g Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD yang di monev pelaporan BOS-nya Jumlah Sekolah yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Sekolah Sekolah	745 745	745 745	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	h Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan Intervensi program penggiatan peran orang tua dan masyarakat dalam proses belajar (the rise smeru) yang difasilitasi Jumlah kepala sekolah SD, pengawas TK/SD yang dievaluasi Jumlah SD/MI yang terfasilitasi akreditasinya	Kegiatan Orang Sekolah	1 820 254	1 820 254	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	I Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah bantuan untuk Siswa SD Berprestasi (hibah/bansos) Jumlah jenis lomba berprestasi yang diikuti peserta didik : OSN SD, OOSN SD, FLS2N SD, LCC SD, Dokter Kecil SD, MAPSI SD	Paket Jenis	1 6	1 6	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	J Sub Kegiatan Penyediaan Pendidikan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah calon kepala yang mengikuti seleksi dan pembekalan sertapelanantikan / pengambilansumpah calon kepala sekolah di lingkungan pemerintah kabupatenkebumenJumlah GTT dan PTT padasekolah Negeri danKorwilcam Bidik yang sudahterferivikasi pertanggal 31Desember 2015 yangmenerima pemberian JasaTenaga AhliJumlah GTT dan PTT padasekolah yang lahir sebelumPP 48 Tahun 2005 dansudah ada di databaseDinas Pendidikan	Orang Orang Orang	100 2841 675	100 2841 675	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	k Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah dokumen yang terfasilitasi Penilaian Angka Kredit (PAK) jenjang SD Jumlah peserta pemilihan PTK berprestasi dan peserta OGN bagi guru SD Jumlah terfasilitasinya Pendidikan Profesi Guru (PPG) jenjang SD	Dokumen Orang Kali	3750 18 2	3750 18 2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	I Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lomba yang diikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS) SD dan Lomba Budaya Mutu (LBM) Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan Ujian Sekolah Jumlah SD yang dimonev KTSP Jumlah Sekolah SD yang memperoleh fasilitasi inklusi Jumlah Tenaga Pendidik SD yang mengikuti bimtek inklusi Jumlah Tenaga pendidik yang mengikuti Bimtek Raport Mutu	Jenis Sekolah Sekolah Sekolah Orang Orang	2 771 125 26 52 156	2 771 125 26 52 156	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	m Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Sekolah	736	736	100		
				2 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang terbangun : SMPN 1 Sadang Jumlah Talud dan pagar pengamanan bangunan sekolah yang terbangun	Ruang paket	1 0	1 0	100 0	Untuk pembangunan Talud tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah bantuan rehabilitasi ruang kelas (Banprov) 5 sklh : SMPN 1 Ambal, SMPN 2 Ayah, SMPN 2 Karanggayam, SMPN 1 Mirit, SMPN 1 Sruweng Jumlah Hibah kpd Badan/Lembaga yang terakreditasi : SMP Binangun, SMP Pangeran Diponegoro, SMP Muhammadiyah Sempor, MTs Al Imam, MTs Pondok Pesantren Satu Atap Husnul Hidayah, MTs Ma'arif Nahdatul Ulama Gombong Jumlah R. Guru yang terakreditasi (DAK) 3 sklh: SMPN 2 Karangasambung, SMPN 2 Karanggayam, SMPN 2 Puring Jumlah R. Kelas yang terakreditasi (DAK) 10 sklh: SMPN 2 Karanggayam, SMPN 3 Karanganyar, SMPN 4 Kebumen, SMPN 2 Ayah, SMPN 1 Ayah, SMPN 1 Alian, SMPN 1 Gombong, SMPN 1 Petanahan, SMPN 3 Mirit, SMPN 1 Kuwarasan. SMPN 4 Satap Karangsambung, SMPN 2 Pejagoan Jumlah R. Kelas Yang Terakreditasi (DAU) : Jumlah R. Perpustakaan yang Terakreditasi (DAK) 1 Sekel : SMPN 2 Rowokele Jumlah R. TU yang Terakreditasi (DAK) 2 sklh : SMPN 2 Karanggayam, SMPN 2 Puring Jumlah ruang lab IPA yang direhab : SMPN 2 Pejagoan	Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang	11 10 3 29 3 1 2 1	11 10 3 29 3 1 2 1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SMP/MTs	Siswa	1000	1000	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	d Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Lab. Komputer (5 seklh) : SMPN 2 Puring, SMPN 4 Kebumen, SMPN 1 Petanahan, SMPN 1 Kuwarasan, SMPN 2 Karangsembung Jumlah Paket Pengadaan Media Pendidikan (2 Seklh) : SMP PGRI 1 Klirong, SMP IT Ulil Albab Kebumen	Paket paket	5 2	5 2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah jenjang SMP yang menyelenggarakan Ujian Satuan Pendidikan (USP) Jumlah SMP yang memperoleh fasilitas Inklusi Jumlah Tenaga pendidik SMP yang mengikuti Bimtek Inklusi	Sekolah Sekolah Orang	200 8 78	200 8 78	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	F Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah kepala sekolah SMP Negeri, pengawas SMP Negeri yang dievaluasi Jumlah SMP yang Terakreditasi	orang Sekolah	71 38	71 38	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	g Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah bantuan untuk Siswa SMP Berprestasi (Hibah/Bansos) Jumlah jenis lomba berprestasi yang diikuti peserta didik : KSN SMP, KOSN SMP, FLS, GSI, OPSI, FLS2N SMP, LCC SMP, KKR, MAPSI SMP	paket jenis	1 9	1 9	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	h Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah GTT dan PTT pada sekolah yang lahir sebelum PP 48 Tahun 2005 dan sudah ada di database Dinas Pendidikan Jumlah penyediaan jasa GTT/PTT SMP Negeri yang sudah terverifikasi per tanggal 31 Desember 2015	Orang Orang	189 534	189 534	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	I Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah dokumen yang terfasilitasi Penilaian Angka Kredit (PAK) jenjang SMP Jumlah paket PTK SD Berprestasi (hibah/bansos) Jumlah peserta pemilihan PTK berprestasi dan peserta OGN bagi guru SMP Jumlah terfasilitasinya Pendidikan Profesi Guru (PPG) jenjang SMP	Dokumen Paket Orang Kal	1520 1 24 2	1520 1 24 2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	J Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah jenis lomba Sekolah Sehat (LSS) Jumlah sekolah yang dimonitoring BOS SMP	Sekolah Sekolah Sekolah orang	9 117 114 228	9 117 114 228	100		
				k Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penyediaan dana BOS SMP	Sekolah	59	59	100		
				3 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah bangunan sekolah yang direhab : KB Darul Kasyfil Ulum, PP Pelangi, TK Bina Ana Prasa 1 Rahayu, TK Muslimat NU 19 Al Ikhsan, TK Pertiwi 14.09.03, TK Pertiwi, TK Remaja Guna Praja PGRI, KB Tunas Mekar	Sekolah	8	8	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah paket penerima Siswa PAUD Berprestasi (hibah/bansos)	Paket	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah paket alat permainan edukatif : KB Amanah Ds. Gemeksekti Kebumen, KB Islam Al Badar Kel Bumirejo Kebumen, KB Muslimat NU 03 Tarbiyatul Masyithoh Kel Plarangan Karanganyar, KB Muslimat NU 10 Taman Pintar Desa Grenggeng Karanganyar, KB Nurul Qolbi Desa Setrojenar Buluspesantren, KB Pelita Bangsa Ambalresmi Ambal, KB Puspita Harum Ambalkumolo Buluspesantren, KB Tunas Harapan Kalibagor Kebumen, KB Tunas Muda Sidomulyo Ambal, PP AlFatih Tanjungrejo Buluspesantren. PP Dahlia Rantewringin Buluspesantren, PP Kartini Ambalkliwonan Ambal, PP Melati Panjer Kebumen, PP Sekar Melati Klapasawit Buluspesantren, PP Tunas Harapan Jogopaten Buluspesantren, PP Wijaya Kusuma Ambalkumolo Buluspesantren, PP Anggrek Kutosari Kecamatan Kebumen, PP At Taqwa Condongcampur Kecamatan Sruweng, PP Bunga Menur Panjer Kecamatan Kebumen, PP Ceria Grenggeng Kecamatan Karanganyar PP Harapan Bunda Gemeksekti Kecamatan Kebumen,PP Harapan Jaya Kradenan Kecamatan Ambal, PP Mentari Harjodowo Kecamatan	Paket Paket Paket Pak	10 10 10 10	10 10 10 10	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH N
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kuwarasan, PP Mutiara Harapan Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan, PP Nurul Hidayah Kawedusan Kecamatan Kebumen, PP Pelita Bunda Benerwetan Kecamatan Ambal, PP Persada Sadangwetan Kecamatan Sadang, PP Sido Maju Ambalkebrek Kecamtan Ambal, PP Tunas Harapan Bocor Kecamatan Buluspesantren, PP Tunas Harapan Pucangan Kecamatan Sadang TK Aisyiyah IV SemandingKecamatan Gombang, TKAisyiyah Bustanul AthfalSidomukti Ambal, TKAmongsari PetangkuranAmbal, TK KartiniSurobayan Ambal, TK Kuncup Melati PGRIKarangpule Sruweng, KBMuslimat NU 06 TarbiyatulMasyithoh Karanganyar, TKMuslimat NU 07 TarbiyatulMasyithoh ArgopeniKebumen, TK Muslimat NU26 Tarbiyatul MasyithohKenteng Sempor, TKMuslimat NU 39 TarbiyatulMasyithoh AmbarwinangunAmbal.TK Pamardi Yoga PGRIHarjodowo Kuwarasan, TKPanti Siwi Utami PGRIKlegenrejo Klirong, TKPutra Desa KradenanAmbal, TK Putra DharmaSinungrejo KecamatanAmbal, TK Tunas HarapanPrasutan Kecamatan Ambal,TK Tunas HarapanSidoluhur KecamatanAmbal, TK Tunas HarapanSidorejo Kecamatan Ambal,TK Wijaya KusumaPagedangan KecamatanAmbal.						

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	d Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah anak yang terfasilitasi Gebyar PUAD Jumlah lembaga PAUD negeri yang dibina Jumlah lembaga PAUD swasta yang dibina	siswa Lembaga lembaga	520 2 1150	520 2 1150	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	e Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang di movev	Lembaga	50	50	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	f Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah fasilitasi PTK berprestasi jenjang PAUD Jumlah Paket penerima PTK PAUD berprestasi Jumlah Pendidik PAUD yang diberi kesejahteraan Jumlah peserta diklat berjenjang bagi pendidik PAUD Jumlah PTK PAUD yang mengikuti jambore PAUD	orang paket orang orang orang	12 1 2176 180 260	12 1 2176 180 260	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	g Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Bunda PAUD yang diberi apresiasi Jumlah kegiatan GOPTK yang difasilitasi Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi akreditasi Jumlah peserta lomba Gugus PAUD Jumlah rapat-rapat koordinasi Jumlah terfasilitasinya PPG jenjang TK	Bunda PAUD Kali Lembaga Gugus Kali Kegiatan	26 4 50 26 12 2	26 4 50 26 12 2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	h Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Negeri yang dibina (Dak Non fisik) Jumlah Lembaga PAUD Swasta yang dibina (Dak Non fisik)	Lembaga lembaga	2 1150	2 1150	100		
				4 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin : SKB Kebumen	Bulan	12	12	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah paket pengadaan mebel pendidikan nonformal/kesetaraan : SKB Kebumen	Paket	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah paket pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan : SKB Kebumen	Paket	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	d Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penerima bantuan Kesetaraan Paket A, B dan C bagi PKBM yang belum mendapatkan BOP Pusat	Lembaga	14	14	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	e Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah paket pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan : SKB Kebumen	Paket	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Proses Belajar di Pendidikan Non Formal Kesetaraan Paket A Paket B dan Paket C Jumlah sarasehan dan pameran kegiatan pendidikan kecakapan hidup pada lembaga nonformal	Kegiatan Lembaga	3 59	3 59	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	g Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) pada usia sekolah yang di data Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang di monev Jumlah monitoring dan Pembinaan bagi lembaga PKBM/SKB	orang Lembaga Lembaga	300 35 25	300 35 25	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	h Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta pemilihan PTK berprestasi bagi tutor pengelola pada satuan pendidikan non formal/kesetaraan	Orang	12	12	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	i Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga PKBM dan LKP yang mengikuti Pelatihan kegiatan pendampingan akreditasi/sertifikasi Jumlah Lembaga yang terakreditasi Jumlah peserta Workshop Penguatan Program Bindikel bagi pengurus Paguyuban Orang Tua Murid dan Guru (POMG) pada satuan pendidikan	Lembaga paket Orang	11 4 100	11 4 100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	j Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penerima bantuan DAK Non Fisik kesetaraan bagi PKBM	lembaga	24	24	100		

b. Permasalahan

Dalam melaksanakan Program, kegiatan maupun sub kegiatan, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan, sehingga capaian kinerja Program, Kegiatan maupun sub Kegiatan dapat tercapai secara maksimal.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

-

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan pendidikan adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%. Terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,34	13,20	13,35	101,14	13,20
2. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,54	7,20	7,55	104,86	7,20
3. Angka Kelulusan	%	100	99,92	100	100,08	99,92
4. Persentase pendidik yang berpendidikan S1	%	88,62	68,37	88,65	129,66	68,37
5. Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	%	B	B	B	B	B
6. Angka Partisipasi Sekolah	%	95,88	93,36	99,17	106,22	93,36
7. Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	33,42	33,42	36,86	110,29	33,42
8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SD	%	100	100	100	100	100

9. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SMP	%	100	100	100	100	100
10. Persentase Gedung PAUD/ sederajat dalam kondisi baik	%	84,21	85,20	85,78	100,68	85,20
11. Persentase Gedung SD/ sederajat dalam kondisi baik	%	85,84	78,24	86,98	111,17	78,24
12. Persentase Gedung SMP/ sederajat dalam kondisi baik	%	88,89	87,60	89,20	101,83	87,60

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sampai dengan tahun 2021 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kebumen memiliki peluang bersekolah sampai 13,35 tahun atau setara dengan Diploma I. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS:2019). Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021 dari target sebesar 7,20 (rata-rata penduduk Kebumen yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,55 tahun atau menamatkan/menyelesaikan kelas VII) yang berarti secara rata-rata penduduk kebumen yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,55 tahun atau telah menamatkan/menyelesaikan kelas VIII.

Capaian angka kelulusan siswa di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021 yang mencapai 100 persen dari target 99,91 persen menunjukkan bahwa capaian angka kelulusan siswa di Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori sangat baik. Persentase pendidik di Kabupaten Kebumen yang berpendidikan tinggi (S1 ke atas) sebesar 88,65 % menunjukkan bahwa dari total pendidik di jenjang pendidikan dasar, rata-rata berpendidikan S1.

Capaian indeks survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang mencapai angka B menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memandang bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Kebumen di Tahun 2021 masuk dalam kategori baik. APS pendidikan dasar 7-15 tahun di Kabupaten Kebumen sebesar 99,17% yang berarti bahwa 99,17 persen penduduk Kebumen berusia 7-15 tahun sedang bersekolah. Dari target persentase sekolah terakreditasi A sebesar 33,42 persen, capaian di tahun 2021 sebesar 36,86 persen. Hal tersebut menunjukkan lebih dari sepertiga sekolah jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen memiliki standar mutu dan kualitas grade A.

Pada indikator sasaran angka melek huruf Al Qur'an mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2020 capaiannya sama yaitu 100%. Angka Melek Huruf Al-Quran secara umum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sama yaitu seluruh siswa kelas 6 (enam) SD/MI dan siswa kelas 9 (sembilan) SMP/MTs sebesar 100 persen, yang berarti bahwa seluruh siswa tersebut melek huruf Al Qur'an.

Pada indikator persentase gedung sekolah dalam kondisi baik (PAUD, SD, SMP sederajat) mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja diatas target yang ditetapkan dan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 ada peningkatan. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain adalah sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN dengan mengedepankan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kondisi riil sekolah. Selama Tahun 2021, kegiatan rehabilitasi gedung SD/MI di 39 sekolah (36 SD dan 3 MI), rehab gedung SMP/MTs di 28 sekolah (23 SMP dan 5 MTs) dan rehab 8 PAUD terbukti mampu meningkatkan tingkat persentase gedung sekolah dalam kondisi baik, sehingga capaian kinerjanya melebihi target.

Pandemi/wabah Covid-19 sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Siswa diharuskan mengubah cara hidup dan cara belajarnya untuk membatasi aktivitasnya dengan saling menjaga jarak (social distancing), mengurangi berkumpul dan bepergian dan belajar dari rumah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan menurunnya minat dalam mendaftarkan anaknya masuk sekolah pendidikan anak usia dini. Secara umum kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan adalah faktor motivasi masyarakat, kecenderungan dari masyarakat di Kabupaten Kebumen yang menganggap bahwa pendidikan anak dimulai dari kelas 1 (satu) SD, sementara pendidikan usia dini belum sepenuhnya dianggap penting.

Sebagai pembanding capaian kinerja yang telah disebutkan diatas, untuk diketahui bahwa pada tahun 2021, Jumlah anak sekolah yang menerima Program Indonesia Pintar 2021 tingkat Sekolah Dasar sebanyak 44.394 siswa, tingkat Sekolah Menengah Pertama 21.592 siswa. Sementara jumlah siswa miskin yang menerima Beasiswa Kurang Mampu (BKM) Kelas Akhir tingkat Sekolah Dasar sebanyak 2000 siswa dan tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1000 siswa.

2. Urusan Kesehatan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (khusus untuk Peningkatan Pelayanan BLUD); dan
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Kesehatan	1 DINAS KESEHATAN		A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kegiatan pelayanan BLUD	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Prosentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
				B PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	82	82	Capaian SPM tidak tercapai 100% dikarenakan adanya pandemi Covid sehingga pelayanan banyak yang ditunda untuk memprioritaskan pencegahan dan penanganan Covid 19	Fasilitas kesehatan tetap melakukan pemantauan terhadap sasaran SPM
				1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	%	100	89	89	Berdasarkan riil data DTKS yang diajukan	Diperlukan verifikasi dan validasi data yang lebih akurat
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar	a Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun (Puskesmas Gombang II, Puskesmas Sadang, Puskesmas Ayah I, Puskesmas Kebumen III)	Paket	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Masyarakat		Jumlah pengadaan tanah untuk Puskesmas Bonorowo	Lokasi	1	1			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan (Puskesmas Poncowarno)	Paket	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun (Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Buayan)	Paket	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	d Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan prasarana fasyankes ambulans	Paket	11	13	100		
					Jumlah pengadaan prasarana PMI	Paket	1	1			
					Jumlah pengadaan puskesmas keliling	Paket	7	7			
					Jumlah pengadaan penyimpan limbah B3	Unit	29	29			
					Jumlah pengadaan generator set dan stabilizer	Paket	29	29			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan	e Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan alkes atau penunjang fasyankes (alat kedokteran umum,	Paket	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Layanan Sosial Dasar Masyarakat		alat kedokteran gigi, alat lab kedokteran)						
					jumlah pengadaan penunjang PMI	Paket	1	1			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	f Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	Paket	24	24	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	g Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket pengadaan BMHP	Paket	6	6	100		
				2 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	%	100	89	89	berdasarkan hasil data DTKS dan capaian naik dari tahun 2020, sedangkan target UHC maksimal 90 % jd sdh mencapai UHC	Verval data

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar	Orang	20.914 orang	19.986 orang	97,78	adanya pandemi Covid sehingga pelayanan banyak yang ditunda untuk memprioritaskan pencegahan dan penanganan Covid 19 dan adanya pendatang yang belum selesai melakukan pemeriksaan kehamilannya	Pembinaan pada BDD dan pemantauan penjangkaran secara ketat
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani sesuai standar	Orang	19.666	18.863	97,92	Adanya persalinan belum sampai pada fasilitas kesh yg terstandart	Pemantauan sasaran lebih ketat
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah pelayanan BBL sesuai standar	Orang	19.151	18.849	99,21	Adanya kematian bayi pada 6 jam pertama	Peningkatan deteksi resiko dan penangan bayi berkualitas sesuai standart

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	d Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah pelayanan balita sesuai standar	Anak	94.64	92.576	97,82	masa pandemi dan pembatasan kegiatan serta belum optimalnya petugas kesehatan dan kader mampu melaksanakan deteksi tumbuh kembang secara standart	Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader dalam pelaksanaan SDIDTK
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	e Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak	176.156	132.614	64,16	masa pandemi sehingga kegiatan penjangkaran kesehatan pada anak usia pendidikan dasar tidak optimal dan Jumlah sasaran sekolah tidak sebanding dengan petugas kesehatan yang melaksanakan screnin	Fasilitas kesehatan tetap melakukan pemantauan terhadap sasaran SPM
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	f Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif (15-59 tahun) mendapat skrining sesuai standar	Orang	888.051	580.766	69,64	masa pandemi, belum seluruh desa terbentuk Posbindu, Terbatasnya sarana prasana (Posbindu Kit dan Reagen)	Pengembangan Posbindu di Desa, Sekolah dan OPD, Meningkatkan gerakan skrining usia produktif pada kegaiaian misalnya di kegiatan masyarakat seperti arisan, pengajian, sholat jumat (posbindu mobile) untuk menjangkare masyarakat yang sehat.

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	g Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Orang	179.998	150.261	55,78	masa pandemi, adanya pembatasan kegiatan dan belum semua petugas kesehatan mampu tatalaksana pelayanan lansia secara standart	peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan lansia
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	h Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi mendapat layanan sesuai standar	Orang	101.499	85.263	83,45	belum semua penderita HT terjangkau ke fasyankes karena masih merasa sehat sehingga belum mendapat pelayanan HT, Belum optimalnya pelaporan pelayanan penderita HT dari RS, BPS, DPS, Klinik Swasta, dan UKBM/Posbindu PTM,	Meningkatkan gerakan skrining posbindu desa untuk menjangkau penderita HT yang belum terperiksa di fasyankes dan meningkatkan jejaring dengan klinik swasta, DPS, BPS untuk pelaporan pemeriksaan/pelayanan HT
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	i Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah pelayanan para penderita DM sesuai standar	Orang	11.903	11.818	96,44	masa pandemi adanya pembatasan kegiatan, belum semua penderita DM terjangkau ke fasyankes, Belum optimalnya pelaporan pelayanan penderita DM dari RS, BPS, DPS,	Meningkatkan gerakan skrining posbindu desa untuk menjangkau penderita DM yang belum terperiksa di fasyankes dan meningkatkan jejaring dengan klinik swasta, DPS, BPS untuk pelaporan pemeriksaan/pelayanan DM

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										Klinik Swasta, dan UKBM/Posbindu PTM	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	j Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	4.123	3.706	80,30	Belum semua ODGJ terobati karena keluarga yang mempunyai ODGJ merasa malu dan enggan/menolak untuk membawa ke pelayanan kesehatan, Belum adanya Pemantau Minum Obat (PMO) sehingga masih banyak ODGJ putus obat	meningkatkan Upaya edukasi keluarga yang mempunyai kasus ODGJ dan pembentukan DSSJ.
					Prosentase skrining Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK)	%	100	100			
					Prosentase orang yang mendapatkan layanan rehab NAPZA	%	100	100			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	k Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah suspek TBC yang dilayani sesuai standar	Orang	12.923	6.648	60,83	Adanya stigma masyarakat bahwa datang ke faskes akan dicovidkan, dan tenaga kesehatan lebih fokus ke penanganan covid serta belum maksimalnya investigasi kontak penderita TBC, screening pada	Meningkatkan gerakan screening pada pondok pesantren dan lapas, meningkatkan kapasitas Program TB

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										Pondok pesantren, lapas	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	I Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV yang dilayani sesuai standar	Orang	22.282	22.282	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	m Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pertemuan peningkatan kapasitas pembuatan Health Mapper Covid 19	Kali	1	1	100		-
					Pertemuan penguatan SKDR dan Covid 19 Tingkat Kecamatan	Puskesmas	35	35			
					Workshop Tracer Tingkat Puskesmas	Puskesmas	35	35			
					Peningkatan Kapasitas Manajemen Data Covid 19	Kali	2	2			
					TOT Workshop besar	Kali	1	1			
					Pertemuan strategi Manajemen Data	Kali	1	1			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Covid 19						
					Rapat koordinasi satgas covid	Kecamatan	26	26			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	n Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah desa yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan krisis bencana kesehatan	Desa	25	25	100		-
					Prosentase penanganan KLB kurang dari 24 jam	%	100	100			
					Prosentase pelaksanaan vaksinasi Covid 19	%	100	100			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	o Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah paket pelayanan gizi masyarakat (gizi buruk, stunting, ibu hamil dan remaja) mendapat tablet Fe dan makanan tambahan	Paket	5	5	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	p Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pelayanan kesehatan kerja	Lokasi	35	35	100		-
					Jumlah orang diukur kebugaran jasmani	Lokasi	1500	1500			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan	q Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah pembangunan jamban keluarga	Unit	1475	1475	100		-
					Jumlah desa pelaksana STBM	Desa	460	460			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Layanan Sosial Dasar Masyarakat		Jumlah pengelolaan Limbah B3 di Fasyankes	%	100	100			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	r Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lokasi	35	35	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	s Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan surveilans kesehatan	Paket	4	4	100		-
					Prosentase signal alert direspon	%	100	100			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	t Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah kegiatan Pengelolaan Kesehatan Khusus	Kegiatan	11	11	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	u Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan pelayanan penyakit menular	Kegiatan	2	2	100		-
					Jumlah kegiatan pelayanan penyakit tidak menular	Kegiatan	2	2			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	v Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	Orang	55393	55393	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	w Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah pembinaan forum kabupaten/kota sehat	Kecamatan	26	26	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	x Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan Akreditasi Puskesmas	Puskesmas	35	35	100		-
					Bintek SDM Kesehatan	Kali	8	8			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	y Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah UCI Desa	Desa	460	460	100		
					Prosentase Penanganan KIPi	%	100	100			
				3 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah PKM yang menerapkan SIK	PKM	35	35	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Profil Kesehatan yang disusun dan SIK	Dokumen	2	2	100		
				C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase Terpenuhinya dan Kebutuhan Pendayagunaan SDM Kesehatan	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah penerbitan SIP Nakes	Buah	1500	1500	100		
					Jumlah penyusunan Profil SDM dan Renbud	Buku	50	50			
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Prosentase Nakes Non ASN menerima insentif bagi yang melaksanakan kegiatan penanganan Covid 19	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				2 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat mutu pelayanan kesehatan	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Kali	2	2	100		
					Pembinaan dan Registrasi Tenaga Kesehatan	Nakes	1400	1400			
					Tenaga Kesehatan Teladan	organisasi profesi	9	9			
				D PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	%	80	80	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, UMOT yang diawasi	Lokasi	100	100	100		
					Jumlah Apoteker yang dibina	Orang	180	180			
					Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengawasan Kefarmasian	Puskesmas	35	35			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				2 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	%	80	80	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi dan dikendalikan serta ditindaklanjuti	Lokasi	175	175	100		
					Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan	Orang	250	250			
					Jumlah Peserta KIE Keamanan Pangan	Orang	600	600			
				E PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	%	91,6	91	99,34	Masih ada masyarakat yang merokok	-
				1 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial	a Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah upaya kegiatan promosi kesehatan, advokasi kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	9	9	100		-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Dasar Masyarakat								
				2 Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Prosentase rumah tangga sehat	%	68,75	91	114.62		-
				3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan penatalaksanaan UKBM tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Prosentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	40	50	125		-
					Prosentase Posyandu Mandiri	%	42,86	70,9	165.42		
		2 RS Dr. SOEDIRMAN		A PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (DAK)	Paket	1	1	100		
				2 Kegiatan Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten/kota							
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan operasional RS	Kegiatan	15	15	100		
		3 RSUD PREMBUN		A PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan, capaian target SPM, capaian target kinerja klinis, bertambahnya aset daerah di RSUD	%	99	68	69		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Sarana dan prasarana (RS, rumah dinas, dan alat kesehatan/alat penunjang medik) dalam kondisi baik, terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan/alat penunjang medik serta paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	%	80	80	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah paket rehabilitasi dan pemeliharaan RS	Paket	5	5	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah unit rumah dinas yang akan direhabilitasi dan dipelihara	Unit	5	5	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Paket	8	8	100		-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Masyarakat								
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	d Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Paket	6	6	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	e Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat-alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Kegiatan	2	2	100		-
				2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya layanan pengelolaan kesehatan khusus, terselenggaranya kegiatan operasional pelayanan RS, terselenggaranya kegiatan akreditasi RS	Bulan	12	12	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1. Jumlah jenis pemeriksaan penunjang kesehatan 2. Jumlah Karyawan yang mengikuti workshop 3. jumlah kegiatan pengelolaan kesehatan khusus	Jenis orang kegiatan	3 200 2	3 200 2	100		-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan operasional RS	Kegiatan	9	9	100		-
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan akreditasi RS	Kegiatan	3	1	33	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit belum terlaksana karena adanya kebijakan Kemenkes : penundaan kegiatan akreditasi sampai dengan waktu yang belum ditentukan (status pandemi selesai)	Koordinasi dan Konsultasi dengan Kemenkes RI tentang proses akreditasi RS

b. Permasalahan

Berdasarkan tabel di atas, dari 5 program urusan kesehatan, ada 4 program yang mencapai target, sedangkan 1 program tidak mencapai target yaitu pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Indikator Kinerja pada program ini yaitu persentase capaian SPM bidang Kesehatan dengan target 100% dan tercapai 83 %, hal ini dikarenakan :

- 1) Adanya pandemic covid-19 sehingga beberapa layanan tidak dilakukan karena memprioritaskan pencegahan dan penanganan covid-19;
- 2) Ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang terbatas.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standart Penerapan Pelayanan Minimal bahwa ketepatan sasaran dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu, sehingga untuk selanjutnya penetapan sasaran atau target akan dilakukan validasi kembali (tidak *universal coverage*) tapi berdasarkan ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan **ketepatan sasaran**.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan kesehatan adalah 90,43% atau kategori Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 90,4%. Terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100,03% atau kategori sangat tinggi.

Faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program salah satunya dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan pandemic covid-19 sehingga terdapat tambahan anggaran refocusing untuk kesehatan, disamping penyediaan anggaran dari BLUD UPTD Dinas Kesehatan dalam menunjang program tersebut.

Sedangkan pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat disamping indicator pencapaian Standart Pelayanan Minimal juga terdapat indicator dari kegiatan antara lain Angka Kematian Ibu, angka Kematian bayi, dan kasus stunting. Target Angka Kematian Ibu tahun 2021 sebesar 25 kasus dengan realisasi 38 kasus,

meningkat tajam dibandingkan tahun 2020 dengan penyebab 50 % karena covid-19, sedangkan target angka kematian bayi sebanyak 215 kasus dengan realisasi 164 kasus, walaupun dibawah target namun jumlah kasus meningkat dibandingkan tahun 2020.

Tabel 3. 5 Data Kasus Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Keterangan (Penyebab)
1.	Ayah	5	Aspeksia, Anencepalus, Diare, Kejang, BBLR
2.	Buayan	10	BBLR, (Septikemia, Anemia), Hidrocephalus, Katarak Kongenital, Ikterik Neonatorum, Infeksi Aspirasi, Meningokel, Ibu Peb, Bayi Kjb, Bacterial Meningitis Not Else Where Classified, Pneumonia, Aspirasi, BBLR Asfiksia, dan Kelainan Kongenital
3.	Puring	11	Sepsis, ISPA, Prematur BBLR, Kel. Kongenital, Febris, Pjb, IUGR/Kel Kongenital, Imatur, Asfiksia, dan Kel. Kongenital,
4.	Petanahan	9	Asfiksia, Asfiksia/Faetaldistres, Respiratory Distres Sindrom, Asfiksia/Faetaldistres, Kel Kongenital, KJB, Asfiksia, dan Pneumonia+BBLR
5	Klirong	7	Kel Jantung, Kejang, BBLSR, Henti jantung, Ikterik Neonatorum, dan BBLR Prematur GAMELI
6.	Buluspesantren	10	Prematur, Prematur Gameli, Diare Dehidrasi, Kelainan Jantung, Diare, KJB, HMD, Prematur BBLR, Diare
7.	Ambal	5	Asfiksi/Kel Jantung, Kejang, PJB, Asfiksia, Ccardiak Ares
8.	Mirit	3	Pneumonia, Ibu Perdarahan PP, BBLR Asfiksia
9.	Bonorowo	2	PJB, Asfiksia
10.	Prembun	6	Sepsis (Asfiksia), Cardiomegali, Gangguan Tumbang Demm, BBLR Ibu Covid
11.	Kutowinangun	5	Asfiksia, Neuroblastom, Prematur Gameli, PJB
12.	Alian	9	IUGR, PJB, Prematur, Gameli, Preterm, Febris, Anencepali, Sus Aspirasi Meconium, Aspirasi, Pneumonia
13.	Padureso	5	Asfiksia Berat, BBLR, Kel Lambung Lengket, Infeksi Otak, Atresia Ani, Premature BBLR
14.	Poncowarno	8	Kelainan Kongenital, Kejang, BBLR & ARDS, Atresia Ani, PJB, Infeksi Usus, Radangparu, Perdarahan Intrakranial, Prematur BBLR
15.	Kebumen	8	Labio Palato Scisis, BBLR, Kel. Kongenital (Penyumbatan Lambung), Prematur, Acites, Kejang Dan Sesak

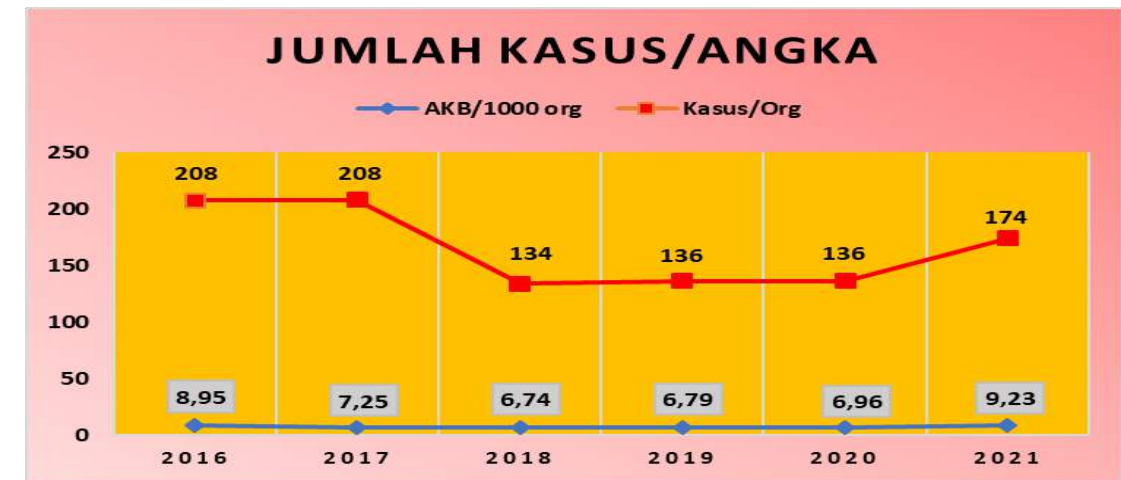
No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Keterangan (Penyebab)
			Nafas, Suspek Hisprung, Kel Kongenitalm, dan Pneumonia
16.	Pejagoan	0	-
17.	Sruweng	13	BBLR Prematur, Gagal Napas, Kelainan Jantung, Prematur, Sesek, Kelainan Paru-Paru, Diare, Infeksi Dd Pneumonia, BBLR Infeksi, dan Asfiksi Berat
18.	Adimulyo	6	Asfiksia, Kelainan Jantung, Pneumonia, Kelainan Jantung, dan Bronchitis
19.	Kuwarasan	9	Asfiksia, Asfiksia Bayi Besar, Diare, Rapid +, Diare Sesek Kejang, BBLR, Pneumonia, dan Febris Kejang
20.	Rowokele	7	Asfiksia, Asfiksi, Diare Akut, Prematur BBLR, Prematur Asfiksia, Diare, dan Anencepalus
21.	Sempor	10	Prematur, KJB, Pneumonia, Kelainan Kongenital (Hidrocephalus), Asfiksia, P0St Op Tumor Ginjal, Anemia, BBLR, AI Tinggi, BBLSR, dan DSS (Demam Syock Syndrom)
22.	Gombong	2	Lahir Asfiksia dan Kelainan Jantung
23.	Karanganyar	5	KJB, Ikterik, Preterm BBL, IUGR Gagal IUD, dan Tersedak
24.	Karanggayam	10	Pneumonia, Kesedak Biji Jeruk, Prematur Bblr, Asfiksia, KJB, Pneumonia, Asfiksia, Obstruksi Usus/Diare, Asfiksia, dan Atresia Ani
25.	Sadang	4	BBLR, Premature, Hidrocephalus, DAN Meningitis,
26.	Karangsambung	5	Prematur Gameli, Anencapalus, dan KJB
JUMLAH		164	

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Selama periode 2016 hingga 2021 di Kabupaten Kebumen ada kenaikan Angka Kematian Bayi, jika dibandingkan dengan tahun 2020. Angka Kematian Bayi tahun 2021 ditargetkan 10,5/1000 KH, terealisasi 9,23/1000 KH atau pencapaian kinerja sebesar 112,1 %.

Pada tahun 2021 Angka kematian bayi sebanyak 174 kasus tersebar pada 26 kecamatan. sebagian besar meninggal pada saat usia 0-28 hari sebanyak 122 kasus/bayi, dan pada usia 29 hari – 11 bulan sebanyak 52 kasus/ bayi. Sedangkan untuk penyebab kematian bayi dikarenakan antara lain 23,56 % karena BBLR (Bayi dengan berat badan lahir rendah), 16,67% karena asfeksia atau gagal nafas setelah lahir, 14,94% karena kelainan bawaan dan pada 44,83 % nya karena penyebab lain-lain. Berikut adalah realisasi Angka Kematian Bayi tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Grafik 3.1 Angka Kematian Bayi Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Tabel 3. 6 Data Kasus Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2021

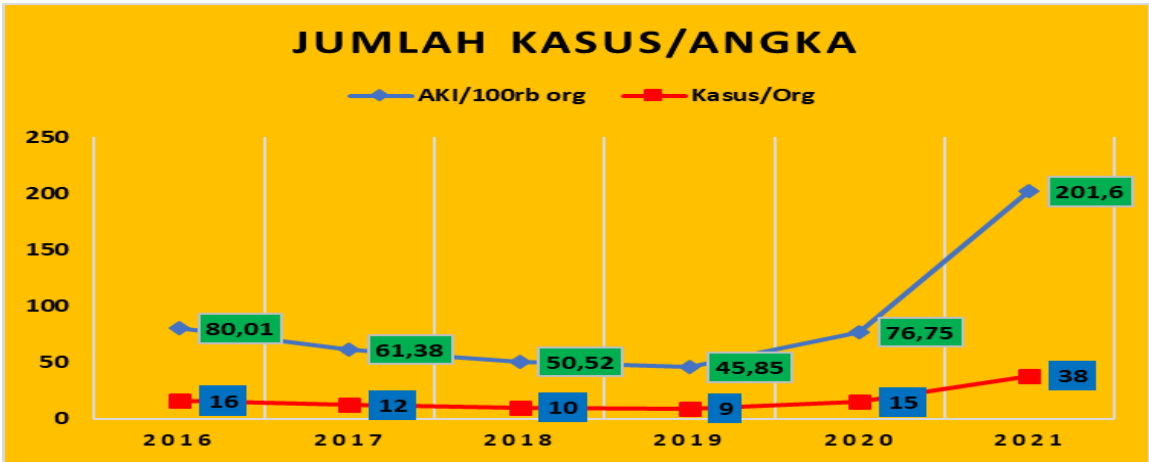
No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Keterangan (Penyebab)
1.	Ayah	2	Covid 19
2.	Buayan	0	-
3.	Puring	2	Covid 19, Hipertensi
4.	Petanahan	1	Covid 19
5	Klirong	1	Lain-lain belum diketahui
6.	Buluspesantren	1	Covid 19
7.	Ambal	4	Pendarahan, Covid 19
8.	Mirit	1	Pendarahan
9.	Bonorowo	2	Covid 19, Post Op Mioma Uteri
10.	Prembun	1	Covid 19
11.	Kutowinangun	3	Pendarahan, Covid 19
12.	Alian	3	CHF Denganoedema Pulmo Suspec SLE, Covid 19, Thalasemia
13.	Padureso	0	-
14.	Poncowarno	1	Pendarahan
15.	Kebumen	0	-
16.	Pejagoan	3	Covid 19
17.	Sruweng	3	Covid 19, hipertensi
18.	Adimulyo	1	Covid 19
19.	Kuwarasan	1	Ca Paru
20.	Rowokele	2	Post SC Pneumonia, Covid 19
21.	Sempor	0	-
22.	Gombang	1	Jantung
23.	Karanganyar	0	-
24.	Karanggayam	2	Covid 19,
25.	Sadang	1	Covid 19
26.	Karangsambung	2	Pendarahan, sakit paru paru
JUMLAH		38	

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Pada tahun 2021 Kabupaten Kebumen Angka Kematian Ibu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 hal ini salah satunya karena adanya

pandemi Covid berdampak pada penurunan kesehatan Ibu Hamil. Adapun dari jenis kematian Ibu di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021, meninggal dalam keadaan hamil 17 orang, keadaan bersalin 3 orang dan ibu nifas 18 orang. Sementara berdasarkan kelompok umur, kejadian kematian maternal terbanyak adalah pada usia 20-34 tahun sebesar 27 orang, kemudian pada kelompok umur >35 tahun sebanyak 11 orang dan pada kelompok umur <20 tahun sebanyak 0 orang. Dari total kematian Ibu (maternal) sebanyak 38 kasus terbanyak dikarenakan perdarahan sebanyak 6 orang, hipertensi pada kehamilan sebanyak 2 orang, dan karena penyebab lain 30 orang (22 orang karena terkonfirmasi Covid, 1 orang dengan penyakit jantung, 1 orang dengan CHF, 3 orang dengan infeksi paru-paru (pneumonia, TBC), 1 orang dengan mioma uteri, 1 orang dengan thalasemia dan 1 orang karena Emboli air ketuban).

Grafik 3.2 AKI Tahun 2016 s/d 2021



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kesehatan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	99
2. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	%	86	100	89	89	100
3. Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	%	84	84	84,2	100	84
4. Cakupan penanganan ibu hamil resiko tinggi	%	99	100	100	100	100
5. Persentase Kasus Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,03	100	0,03
6. Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	%	100	100	100	100	90
7. Tingkat pelayanan kegawatdaruratan	%	100	100	100	100	100
8. Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan	%	100	100	100	100	98
9. Nilai kinerja kesehatan BLUD	-	A	A	A	A	A

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Prosentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam bidang kesehatan. Tolak ukur ini dilihat dari tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, tingkat pelayanan kegawatdaruratan dan tingkat mutu pelayanan kesehatan dilihat dari semua Puskesmas dan Rumah Sakit sudah menerapkan manajemen kesehatan dalam hal ini akreditasi. Capaian sudah melebihi dari target yang ditetapkan berkat adanya dukungan anggaran yang cukup dan semua Puskesmas sudah menerapkan PPK BLUD.

Indikator penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan tolak ukurnya yaitu jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan dibandingkan dengan total jumlah penduduk, dari target yang ditetapkan yaitu 100 % tercapai 89 %. Hal yang mendasar yang sangat mempengaruhi tidak tercapainya indikator kinerja tersebut karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan bahwasanya terdapat harga iuran peserta yang naik dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara perubahan data dan

penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan sasaran penerima merupakan masyarakat yang masuk dalam data DTKS, sehingga diperlukan verifikasi dan validasi data yang lebih akurat.

Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan (Indek Survey Kepuasan Masyarakat) dari target yang ditetapkan yaitu 84 % telah mencapai 84,2 %, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pada masyarakat sudah cukup optimal. Terhadap Cakupan pelayanan ibu hamil resiko tinggi tercapai 100 %, hal ini diartikan bahwa semua ibu hamil yang mengalami resiko tinggi (tidak normal) sudah ditangani dan ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Prosentase kasus Gizi Buruk tercapai (0,029%), Permasalahan gizi buruk dan stunting dipengaruhi oleh bermacam hal seperti masalah ekonomi, keadaan sosial, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat. Rantai pasokan makanan yang terganggu, dan hilangnya pendapatan karena COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah anak-anak yang mengalami masalah gizi. Banyak keluarga yang kehilangan pendapatan rumah tangga sehingga menjadi kurang mampu membeli makanan sehat dan bergizi untuk anak-anak mereka. Pada saat yang sama, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami wasting (gizi kurang dan gizi buruk) akan lebih cenderung mengalami stunting, atau memiliki tinggi badan yang rendah untuk usia mereka.

Deteksi dini wasting anak adalah kunci keberhasilan pencegahan dan pengobatan. Meningkatkan pendekatan pencegahan berbasis bukti untuk mengatasi stunting dan wasting pada anak, dan pendekatan kuratif untuk mengobati wasting. Menghasilkan data dan informasi berkualitas tentang stunting dan wasting pada anak. Meningkatkan akses ke komoditas esensial yang diproduksi secara lokal untuk perawatan wasting anak. Meningkatkan pelayanan gizi untuk anak-anak dan keluarga yang rentan, termasuk pemantauan pertumbuhan, distribusi gizi mikro, dukungan bagi para ibu untuk pemberian makan bayi dan anak secara memadai, dan penapisan serta perawatan anak balita karena gizi buruk.

upaya yang sudah dilakukan dalam menanggulangi masalah gizi, salah satunya, yaitu dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Upaya perbaikan gizi di atas dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan yaitu bayi dan balita, remaja perempuan dan ibu hamil dan menyusui.

Percepatan perbaikan gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Rembug Stunting
- b. kampanye Kesehatan;
- c. advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;
- d. dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;
- e. pelatihan bagi kader dan ibu balita;
- f. intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) untuk menangani masalah gizi; dan
- g. intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) untuk melakukan pembangunan di luar sektor kesehatan;

Tabel 3. 8 Data Kasus Gizi Buruk Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Gizi Buruk
1.	Ayah	1
2.	Buayan	1
3.	Puring	5
4.	Petanahan	0
5	Klirong	0
6.	Buluspesantren	0
7.	Ambal	1
8.	Mirit	2
9.	Bonorowo	0
10.	Prembun	1
11.	Kutowinangun	0
12.	Alian	2
13.	Padureso	0
14.	Poncowarno	0
15.	Kebumen	1
16.	Pejagoan	0
17.	Sruweng	0
18.	Adimulyo	0
19.	Kuwarasan	4
20.	Rowokele	0
21.	Sempor	1
22.	Gombong	2
23.	Karanganyar	1
24.	Karanggayam	0

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Gizi Buruk
25.	Sadang	0
26.	Karangsambung	0
JUMLAH		22

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan tercapai 100%. Adanya kebijakan sesuai dengan SPM Pelayanan Kefarmasian pada Kementerian Kesehatan setiap unit pelayanan dasar minimal terdapat 20 item jenis obat mewajibkan semua Puskesmas mengalokasikan minimal 20 obat item tersebut tercapai 100 %, adanya dukungna dana DAK dan DBHCHT maka obat tersebut bisa terpenuhi. Tingkat pelayanan kegawatdaruratan tercapai 100% bahwa semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah mampu melayani pasien kegawatdarutatan. Terhadap Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan tercapai 100%. Tolok ukur indikator ini bahwa semua Puskesmas sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan yaitu dari total 35 Puskesmas sudah dilakukan penilaian dan lulus akreditasi standart Nasional.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 8) Program Pengembangan Sumber Daya Air (SDA);
- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- 10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 9 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		A PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah terbangunnya infrastruktur SDA dalam mewujudkan pengelolaan SDA dan pengembangan sumber air yang berkelanjutan	%	52,73	52,73	100		
				1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dok	2	2	100		
			Sda	b Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terbangun	Lokasi	3	3	100		
			Sda	c Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terpelihara	Embung	2	2	100		
			Sda	d Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah monev SDA yang dilaksanakan	Sub Keg	3	3	100		
				2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	75,30	75,30	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dok	14	14	100		
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	b Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah JIAT yang terbangun	Paket	17	17	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	c Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang terehabilitasi	Paket	8	8	100		
			Sda	d Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang terpelihara	Paket	12	12	100		
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	e Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah JIAT terpelihara	Paket	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	f Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Komir/P3A/Petugas Alokasi Air yang Di Koordinasi	Paket	1	1	100		
				B PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Penduduk Berakses Air Minum	%	16,53	16,04	97,04	1 Terbatasnya sumber mata air bersih 2 Kondisi geografis kabupaten 3 kebun Sumber akses air minum belum layak	1 Peyediaan SPAM regional bersama 2 Pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM regional bersama 3 Peningkatan kualitas akses air minum layak secara berkala
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Posentase pelayanan air bersih	%	16,53	16,04	97,04	1 Terbatasnya sumber mata air bersih 2 Kondisi geografis kabupaten 3 kebun Sumber akses air minum belum layak	1 Peyediaan SPAM regional bersama 2 Pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM regional bersama 3 Peningkatan kualitas akses air minum layak secara berkala
			Sda	a Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Jumlah tenaga HL Pengelola Kegiatan, Monev	Keg	9	7	77,78	Adanya reconfusing anggaran	Mengurangi lokasi monev/secara

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang dilakukan						langsung dan diantisipasi money melalui alat komunikasi seluler
			Sda	b Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang terbangun	Lokasi	36	36	100		
			Sda	c Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang ditingkatkan	Lokasi	17	17	100		
			Sda	d Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang terpelihara	Paket	6	6	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	15	16,50	110		
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	15	16,50	110		
			Sda	a Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi/dibangun	Paket	2	2	100		
			Sda	b Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah saluran drainase yang terbangun	Paket	6	6	100		
			Sda	c Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jumlah saluran drainase yang terehabilitasi	Paket	12	14	116		
				D PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Capaian Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	87,27	87,27	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Capaian Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	87,27	87,27	100		
			Sda	a Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Penilik Bangunan dalam Penyelenggaraan Penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG	Pemohon	500	213	42,60	adanya peraturan baru terkait PBG dan SLF sehingga diperlukan penyesuaian (PP Nomor 16btahun 2021)	Menyusun Peraturan turunannya (perda PBG dan Perda Retribusi PBG)
			Sda	b Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan gedung dan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Lokasi	8	8	100		
			Sda	c Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Regulasi Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kabupaten Kebumen	Dok	1	1	100		
			Sda	d Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bangutan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Lokasi	20	20	100		
			Sda	e Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Kebumen	Lokasi	30	30	100		
			Sda	f Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Terlaksananya penilikan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung	Lokasi	30	30	100		
			Sda	g Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya bangunan gedung kantor pemerintah	Lokasi	8	8	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				E PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bantuan semen ke tingkat desa/ kelurahan	Zak	17,125	4,915	28,7		
				1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan semen ke tingkat desa/ kelurahan	Zak	17,125	4,915	28,7	Adanya Recofusing Anggaran	Diusulkan pada tahun anggaran berikutnya
			Sda	a Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bantuan semen ke tingkat desa/ kelurahan	Zak	17,125	4,915	28,7	Adanya Recofusing Anggaran	Diusulkan pada tahun anggaran berikutnya
				F PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Capaian jalan dalam kondisi mantap	%	73,16	78,26	107		
				1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Capaian jalan dalam kondisi mantap	%	73,16	78,26	107		
			Sda	a Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Paket	16	16	100		
			Sda	b Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah tanah yang dibebaskan	Lokasi	3	3	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	c Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survei kondisi jalan/jembatan, Jumlah THL Bina Marga yang dibayar	Km	34,3	34,3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	d Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang terbangun	Paket	3	3	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	e Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah panjang jalan menuju standar	Paket	1	4	400	Penambahan lokasi menyesuaikan kebutuhan penanganan jalan	Penyesuaian Pemetaan Lokasi sesuai dengan Kemampuan Anggaran yang semula dialokasikan untuk 1 Lokas
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	f Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara berkala	Km	9	8,7	96,67	Menyesuaikan penanganan di lapangan	Sudah diusulkan pada renja tahun berikutnya
			Sda	g Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara rutin	Km	30	32	106,7		
			Sda	h Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	Paket	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	i Pelebaran Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan	Unit	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	j Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala	Unit	4	4	100		
				G PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase IUJK yang Terekomendasi	%	1	1	100		
				1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Keg	1	1	100		
			Sda	a Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya Rekomendasi Penertiban IUJK	Pemohon	60	20	33,33	ditahun 2021 hanya ada 20 pemohon iujk	Dilaksanakan sosialisasi
				H PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	75	90,95	121,3	data realisasi di tahun 2018,karena LAPAN belum memberikan data realiasasi 2021	Dilakukan foto citra dan berkoordinasi terkait update data dari LAPAN
				1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dok	2	2	100		
			Sda	a Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RTRW yang tersusun	Paket	1	1	100		
			Sda	b Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang tersusun	Paket	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan	%	1	1	100		
			Sda	a Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	umlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW yang terlaksana	Paket	1	1	100		
			Sda	b Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR yang terlaksana	Paket	1	1	100		
			Sda	c Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait penataan ruang kepada masyarakat yang terlaksana	Paket	1	1	100		
				3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	%	1	1	100		
			Sda	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi yang terlaksana	Paket	1	1	100		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		I PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	%	10	10	100		
				1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	Pembangunan tangki septik skala individual (DAK Sanitasi)	Desa	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah pemeliharaan dan operasional pelayanan pengolahan air limbah domestik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah IPLT yang dibangun	Keg	1	1	100		

b. Permasalahan

- 1) Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap memiliki target RPJMD Tahun 2021 yaitu 60,00% dan realisasinya sudah berada diatas target yaitu 78,27%, namun kondisi curah hujan yang tinggi dan banyaknya kendaraan yang ODOL yang melalui jalan kabupaten menyebabkan adanya titik lokasi baru yang mengalami rusak ringan dan berat.
- 2) Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik memiliki target RPJMD tahun 2021 yaitu 80,00% dan realisasi baru mencapai 75,17% atau belum memenuhi target, hal ini disebabkan karena adanya peralihan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan tingginya curah hujan sehingga menyebabkan beberapa titik jaringan irigasi mengalami longsor.
- 3) Cakupan pelayanan air minum sudah memenuhi target RPJMD di tahun 2021, namun angka tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100% rumah tangga telah memiliki akses air minum sampai dengan Tahun 2021 realisasi SPM mencapai 82,3%. Dengan permasalahan terbatasnya sumber mata air bersih, sumber akses air minum belum layak dan kondisi geografis kabupaten kebumen.
- 4) Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang sudah memenuhi target RPJMD tahun 2021 yaitu 75% dan realisasi tahun 2021 masih menggunakan data 2018 yaitu 90,95%. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya update data dari BIG maupun LAPAN.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
- 2) Mengoptimalkan kegiatan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
- 3) Pengadaan sumber air minum menggunakan skema kegiatan SPAM antar Desa sangat membantu masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan air minum.
- 4) Sudah dilakukan Foto Citra dan meminta update data dari LAPAN.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan dimana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 95,99% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja

capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan. Sementara rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 95,22%, terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100,81% atau kategori sangat tinggi.

e. **Capaian Kinerja Urusan**

Pelaksanaan program pada urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Adapun perkembangan indikator kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Capaian jalan kabupaten dalam kondisi matap	%	73,16	60,00	78,27	130,44	60,00
2. Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	73,3	80,00	75,17	93,96	80,00
3. Cakupan pelayanan air bersih	%	19,74	16,53	23,91	144,65	16,53
4. Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,95	75,00	90,95	121,27	75,00

Sumber : DPUPR Kabupaten Kebumen, 2021

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 4 (empat) indikator Kinerja Urusan Perangkat Daerah, dengan penjelasan pencapaian target dan realisasi sebagai berikut :

1) Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2021 adalah 960,358 kilometer. Dimana Proporsi jalan Kabupaten Kebumen yang rusak berat masih terdapat 93.322 Km atau sebesar 9,72 % yang lokasinya tersebar di 19 wilayah yaitu kecamatan Buayan, Gombong, Adimulyo, Ayah, Puring, Kuwarasan, Karanggayam, Karangsambung, Sadang, Alian, Pejagoan, Petanahan, Klirong, Kutowinangun, Prembun, Ambal, Bonorowo, Mirit, Padureso. Adapun data panjang dan proporsi jalan berdasarkan kondisi tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

NO.	URAIAN	Kondisi awal	PANJANG JALAN (km)	
		2015	2020	2021
1	Kondisi Baik	447,82	365,191	584,109
2	Kondisi Sedang	199,61	337,400	167,516
3	Kondisi Rusak Ringan	150,21	124,364	115,411
4	Kondisi Rusak Berat	176,69	133,403	93,322
5	Jalan secara keseluruhan	974,33	960,358	960,358
Proporsi Kondisi Baik (%)		45,96	54,5	60,82
Proporsi Kondisi Sedang (%)		20,49	16,67	17,44
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)		15,42	11,9	12,02
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)		18,13	16,94	9,72

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2021

Adapun realisasi kinerja DPUPR terkait Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2021 adalah sepanjang 751.625 kilometer atau mencapai sebesar 78,27 %. Kondisi ini mengalami peningkatan yang cukup baik, yaitu sebesar 5,11% atau ada peningkatan sepanjang 49.034 Km, jika dibandingkan dengan tahun 2020 sepanjang 702,591 Kilometer atau mencapai 73,16 %. Sedangkan untuk kinerja DPUPR dalam pemenuhan target RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 60 % dengan realisasi 78,27 % menandakan bahwa Kinerja DPUPR telah melampaui target yang telah ditetapkan.

2) Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang saluran irigasi skunder yang menjadi kewenangan kabupaten Kebumen yaitu 184.418 m dengan luas sasaran daerah irigasi 8.621 Ha. Adapun data panjang saluran irigasi sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021
1	Irigasi Teknis Sekunder	M	184.418	184.418
2	Irigasi Kondisi Baik	%	73,3	75,17
3	Irigasi Kondisi Sedang	%	1,73	1,55
4	Irigasi Kondisi Rusak Ringan	%	1,28	1,23
5	Irigasi Kondisi Rusak Berat	%	23,69	22,04

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2021

Adapun realisasi kinerja DPUPR terkait capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2021 yaitu 75,17%, kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu 73,3%. Sedangkan untuk kinerja DPUPR dalam pemenuhan target RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 80% dengan realisasi 75,17%, kondisi ini menandakan bahwa Kinerja DPUPR belum dapat memenuhi target yang

telah ditetapkan. Hal ini disebabkan kerana adanya beberapa titik bendungan dan saluran irigasi mengalami kerusakan dikarenakan tingginya curah hujan serta adanya pengalihan anggaran untuk penanggulangan Covid 19.

3) Cakupan pelayanan air bersih

Pelayanan air bersih di kabupaten kebumen masih disalurkan oleh PDAM, SPAM Perdesaan dan Sumber Air Lainnya, Namun dalam Penghitiungan capaian pelayanan air bersih untuk rumah tangga, hanya memperhitungkan saluran perpipaan, sehingga untuk capaian tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 13 Capaian pelayanan air bersih perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2021	Sambungan s/d Tahun 2020	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI		JUMLAH = (3)+(4)+(5)	CAPAIAN = (6): (2)x100%
	Jumlah Rumah Tangga yang berhak mendapat layanan		PDAM	SPAM PERDESAAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari untuk Rumah Tangga	468.548	301.580	33.603	50.435	385.618	82,3%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2021

4) Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Data Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang masih menyajikan data realisasi tahun 2018 yaitu 90,95% kondisi ini jauh diatas target RPJMD yaitu 75%, tetapi kondisi ini belum menggambarkan kondisi rill 2021 dikarenakan untuk update kesesuaian penataan ruang masih menunggu update data dari BIG dan LAPAN.

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pengembangan Perumahan; dan
- 2) Program Kawasan Permukiman.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 14 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		A PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	cakupan rumah layak huni	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	a Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/dibangun Kabupaten Kebumen. Desa Blater Kec. Poncowarno (Rubangi RT 2/4) Ds. Tirtomoyo Kec. Poncowarno (Rakhmat RT 2/3), Ds. Kedunggong Kec. Sadang (Sartin RT3/3), Ds. Desa Kedungwinangun kec. Klirong (Mahmudin RT01/07 Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/dibangun (P) desa Muktisari 2 unit : (Rijo RT 04/01)(Misro RT 04/01)	Unit	6	6	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	prosentase penanganan luasan permukiman kumuh	%	83,33	83,33	100		
				1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	a Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang dibangun (P2MKM 575 unit, (P) 25 unit dan DAK 129 unit)	Unit	729	726	99,6	Terdapat beberapa penerima bantuan yang mengundurkan diri karena tidak sanggup swadaya	Mengidentifikasi dan memastikan pada saat survey awal terkait kesiapan swadaya penerima bantuan sehingga dalam pelaksanaan tidak mengundurkan diri serta melakukan pendampingan dalam pelaksanaan dilapangan
			Sda	2 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pengurangan Kawasan Kumuh dan Penyehatan Lingkungan						
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	a Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah bantuan keuangan desa untuk penanganan kawasan kumuh	Desa	3	3	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah fasilitasi koordinasi pendampingan penanganan kawasan kumuh	Keg	1	1	100		

b. Permasalahan

Untuk Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni capaiannya adalah 99,9% dikarenakan terdapat 3 (tiga) penerima bantuan yang mengundurkan diri dengan alasan 2 (dua) penerima bantuan rumah tidak sanggup swadaya dan 1 (satu) penerima bantuan rumah sudah ditangani mandiri.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Mengidentifikasi dan memastikan pada saat survey awal terkait kesiapan swadaya penerima bantuan sehingga dalam pelaksanaan tidak mengundurkan diri serta melakukan pendampingan dalam pelaksanaan dilapangan.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Perumahan dan Permukiman diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian kegiatan adalah 99,9%. Analisis tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100,1% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	48,78	83,3	50,91	61,12	100
2. Cakupan rumah layak huni	%	99,55	100	99,77	99,77	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2021

Capaian kinerja penanganan kawasan kumuh belum sesuai dengan target, antara lain disebabkan bahwa target yang ditetapkan seluas 213,622 ha mencakup kewenangan kabupaten 53,556 ha, kewenangan provinsi 47,807 ha dan kewenangan pusat 112,259 ha, sehingga penanganan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Sampai saat ini alokasi anggaran untuk penanganan dari pemerintah provinsi maupun pusat belum sesuai dengan yang ditargetkan, sedangkan untuk tahun anggaran 2021 alokasi anggaran

APBD Kabupaten dialihkan untuk penanganan Covid-19. Upaya yang telah ditempuh antara lain dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat (program kotaku/APBN dan DAK Bidang Sanitasi).

Untuk sisa kawasan kumuh yang belum dapat ditangani pada periode Renstra 2016-2021 mencakup Desa Kuwarisan, Lundong, dan Bagung, akan menjadi prioritas penanganan pada periode Renstra 2021-2026.

Data lokasi kawasan kumuh dan penanganannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 16 Data lokasi kawasan kumuh dan penanganan s/d tahun 2021

No	Kewenangan	Luas (Ha)	Penanganana s/d 2020	Penangan Th 2021	Total Penangan	%	Sisa (Ha)
I	KABUPATEN	53,556	35,864	2,300	38,164	71,26	15,392
1	Wonokriyo	2,197	2,197		2,197	100	0,000
2	Plarangan	4,346	4,346		4,346	100	0,000
3	Karanganyar	0,506	0,506		0,506	100	0,000
4	Kawedusan	0,091	0,091		0,091	100	0,000
5	Bumirejo	5,280	5,280		5,280	100	0,000
6	Kutosari	5,421	5,421		5,421	100	0,000
7	Selang	5,295	5,295		5,295	100	0,000
8	Tamanwinangun	0,964	0,964		0,964	100	0,000
9	Kebumen	9,040	9,040		9,040	100	0,000
10	Gemeksekti	0,274	0,274		0,274	100	0,000
11	Kuwarisan	7,410		2,050	2,050		5,360
12	Lundong	6,343			0,000		6,343
13	Bagung	6,389	2,450	0,250	2,700	38,35	3,689
II	PROVINSI	7,807	45,620	0,250	45,870	95,95	1,937
1	Gombong	14,516	14,516		14,516	100	0,000
2	Candi	10,647	10,647		10,647	100	0,000
3	Panjer	10,997	10,997		10,997	100	0,000
4	Mekarsari	11,647	9,460	0,250	9,710	81,22	1,937
III	PUSAT	112,259	22,720	2,000	24,720	75,00	87,539
1	Kutowinangun	26,324	20,420		20,420	77,57	5,904
2	Tersobo	24,467		0,250	0,250		24,217
3	Prembun	32,706	2,300	0,250	2,550	7,03	30,156
4	Kabekelan	28,762		1,500	1,500		27,262

	JUMLAH	213,622	104,204	4,550	108,754	50,91	104,868

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2021

Penanganan kawasan kumuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 7 indikator yaitu penataan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 213,622 Ha, meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Kec. Gombong (2 kelurahan), Kec. Karanganyar (2 kelurahan dan 1 desa), Kec. Kebumen (5 kelurahan dan 3 desa), Kec. Kutowinangun (4 desa), Kec. Prembun (4 desa).

Belum tercapainya indikator penanganan kawasan kumuh terutama disebabkan anggaran penanganan kawasan kumuh membutuhkan anggaran yang relative besar dengan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sampai saat ini alokasi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat belum sesuai dengan rencana, disamping itu untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah desa masih terkendala dengan permasalahan asset.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi (APBD provinsi) dan pusat (APBN dan DAK). Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya yaitu dengan merencanakan program/kegiatan dan melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran penanganan kawasan kumuh sesuai dengan pembagian kewenangannya.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Berikut data perkembangan cakupan rumah layak huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 :

Tabel 3. 17 Capaian Penanganan Rumah Layak Huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

NO	URAIAN	2020	2021
1	Jumlah rumah	306.885	306.885
2	Jumlah rumah layak huni	305.506	306.883
3	Jumlah rumah tidak layak huni	1.379	2
4	Persentase rumah layak huni	99,55	99,99
5	Persentase rumah tidak layak huni	0,45	0,01

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2021

Berdasarkan Database Perumahan Kabupaten Kebumen yang disusun tahun 2014 sebagai data dasar penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sebanyak 306.885 unit dengan jumlah RTLH sebanyak 26.860 unit. Sampai dengan akhir tahun 2020, dari RTLH sejumlah 26.860 unit sudah tertangani sejumlah 26.260 unit, sehingga masih tersisa 600 unit yang akan ditangani pada tahun 2021, sehingga capaian penangan RTLH sampai dengan 2021 99,99% rumah layak huni, akan tetapi pada Tahun 2020 melakukan updating data RTLH dengan hasil jumlah rumah sebanyak 354.807 unit dengan jumlah RTLH 39.680 unit, sehingga capaian persentase RTLH menjadi 11,18% , yang mana data tersebut akan digunakan untuk target penangan di Tahun 2022 ke depan.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Penanggulangan Bencana;
- 2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

Program prioritas di atas terbagi di dua perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 18 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		A PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan ; Persentase terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	kegiatan	4	4	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah bulan terbayarnya bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan Jumlah bulan terbayarnya bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan bagi 7 ptt Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli, penertiban dan pengawalan bupati Jumlah orang PTT terbayar honorariumnya Jumlah orang tenaga Banpol terbayar honorariumnya	bulan; kegiatan orang	12; 250; 98	12; 730; 98	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas meningkat ketrampilannya	orang	60	60	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	c Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumah Anggota satlinmas meniadang yang mendapat Santunan Jumlah anggota satlinmas dan kasi trantib yang terlatih siaga kebencanaan pada tiap kecamatan	orang	78; 17	78; 16	100		
			Sda	d Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah kegiatan pengamanan hari hari besar keagamaan dan tahun baru	kegiatan	3	3	100		
				2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota	kegiatan	3	3	100		
			Sda	a Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi/penyuluhan/ pembinaan perda dan atau perkara untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha yang rawan melanggar perda dan/atau perkara	kali	24	24	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda, dan / atau perbup untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha	kali	36	36	100		
			Sda	c Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah jenis Perda yang diprioritaskan untuk ditegakkan	perda	18	18	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				3 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang terbina dan terberdayakan	orang	8	8	100		
			Sda	a Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang terbina dan terberdayakan	orang	8	8	100		
				B PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Respon time pemadaman kebakaran ; kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
			Sda	a Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan thl damkar yang terbayar Jumlah terpenuhinya operasional pelayanan pemadaman kebakaran Jumlah THL damkar terbayar honorariumnya	Bulan ; orang	12; 67	12; 67	100		
		2 BPBD		C PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				1 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kawasan yang berisiko / rawan bencana	%	100	100	100		
				2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi Tsunami di sekitar kawasan industri Petanahan 225 Orang; Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana (Candirenggo dan Buayan)	orang	425	425	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya petugas dan peralatan Bencana di PUSDALOPS	bulan set	12 1	12 1	100		
			Sda	c Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan penanganan Bencana	paket	1	1	100		
			Sda	d Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Risiko Bencana	Peta	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	e Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen	Desa	390	390	100		
			Sda	f Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pekerjaan Bahan Bangunan/material untuk rumah rusak pascabencana, Pemulihan lahan pascabencana, Peningkatan kapasitas JITUPASNA, Rehabilitasi tebing sungai Abang Desa Tegalsari Kec. Adimulyo, Rehabilitasi Tebing Sungai Bantar Desa Tugu	Paket	4	4	100		
			Sda	g Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Bagi TRC Kebencanaan (Kaji Cepat Penanganan Darurat)	orang	30	30	100		
				3 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100		
			Sda	a Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Air Bersih dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana; Tersedianya Material/Bahan Bangunan dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana	bulan	12	12	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya Pencarian, Pertolongan, Evakuasi Korban Bencana	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	c Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Logistik Penanganan Bencana (Rescue Dog dan Dapur Umum) serta Sarpras Evakuasi Bencana	Jenis	3	3	100		
				4 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Bupati Kebumen tentang Perencanaan Penanggulangan di Kabupaten Kebumen	Dok	2	2	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi Forum PRB / Relawan	Keg	3	3	100		
			Sda	c Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebencanaan di sekolah	Sekolah	0	0	0	Refocusing Anggaran	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya

b. Permasalahan

Kegiatan Pembentukan Sekolah Aman Bencana anggarannya dilakukan refocusing;

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Akan dianggarkan kembali di tahun 2022

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan, dimana urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Kebumen, diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%. Analisis kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 3. 19 Perkembangan Capaian Kinerja Kebumen Tahun 2020-2021

URAIAN KINERJA	CAPAIAN TAHUN	
	2020	2021
1. Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	49	49
2. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	10.033	9750
3. Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	72,4	72,2
4. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	21	195
5. Jumlah Pelanggaran Perda	60	65

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2021

Pada tahun 2021 kasus pelanggaran hukum Peraturan Daerah yang terjadi di Kabupaten Kebumen semula ditargetkan 300 kasus, teralisasi 65 kasus. Berikut data kasus pelanggaran hukum yang terjadi tahun 2021 :

Tabel 3. 20 Data Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Jenis perda	Jumlah pelanggaran	Proses sidang
1	Perda No 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/Pasangan tidak resmi	48	0
2	Perda No 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/PKL	8	0
3	Perda No 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban	5	0

No	Jenis perda	Jumlah pelanggaran	Proses sidang
	Umum dan Ketenteraman Masyarakat/ <u>Pengemis pengamen</u>		
4	Perda No 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat /Miras	4	3
Jumlah		65 kasus	3 kasus

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2021

6. Urusan Sosial.

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Rehabilitasi Sosial;
- 2) Program Pemberdayaan Sosial;
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 5) Program Penanganan Bencana; dan
- 6) Program Pengelolaan Tempat Makam Pahlawan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 21 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Sosial	1 DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		A PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	prosentase peningkatan kemampuan SDM Kesos	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Keg	3	3	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	Orang	26	26	100		
			sda	b Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga karang taruna yang diberdayakan	Lembaga	21	21	100		
			sda	c Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah anggota LK3 yang diberdayakan	Orang	20	20	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	20	20	Fasilitasi dan penyediaan bansos/bankeu diberikan pada buruh migran sesuai jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen	Sosialisasi tentang permasalahan bencana sosial (korban tindak kekerasan), pemberian layanan kesehatan, pelayanan psikososial dan pelayanan psikologi bagi migran korban tindak kekerasan
				1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan	Orang	10	2	20	Fasilitasi dan penyediaan bansos/bankeu diberikan pada buruh migran sesuai jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen	Sosialisasi tentang permasalahan bencana sosial (korban tindak kekerasan), pemberian layanan kesehatan, pelayanan psikososial dan pelayanan psikologi bagi migran korban tindak kekerasan
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	Orang	10	2	20	Fasilitasi dan penyediaan bansos/bankeu diberikan pada buruh migran sesuai jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen	Sosialisasi tentang permasalahan bencana sosial (korban tindak kekerasan), pemberian layanan kesehatan, pelayanan psikososial dan pelayanan psikologi bagi

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											migran korban tindak kekerasan
				C PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	%	100	100	100		
				1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase jumlah PMKS terlantar yang tertangani	%	100	97,94	97,94		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Penyediaan Permakanan	- Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan - Jumlah disabilitas terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan - Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan	Orang	60 60 80	59 54 66	98 90 82,5	Ada beberapa PM yang meninggal dunia	Di SILPA kan (sisa kembali ke Kas Daerah)
			sda	b Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu	Orang	590	590	100		
			sda	c Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	133	133	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	d Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	Orang	50	50	100		
			sda	e Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal) yang diberi bantuan	Orang	50	83	100		
				2 Rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Prosentase jumlah PMKS terlantar yang tertangani	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	Orang	40	40	100		
			sda	b Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial permakanan	Orang	165	165	100		
			sda	c Penyediaan sandang	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sandang (Rumah Singgah Dosaraso)	Orang	40	40	100		
			sda	d Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso)	Orang	40	40	100		
				D PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Dokumen data kemiskinan	Dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data kemiskinan	Dok	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data kemiskinan	Dok	1	1	100		
				E PROGRAM PENANGANAN BENCANA	ProsentaseKorban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten kota	%	100	100	100		
				1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	Keg	5	5	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	orang	605	605	100		
			sda	b Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	37	37	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	c Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah paket Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Paket	1	1	100		
			sda	d Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah kelompok rentan korban bencana alam dan sosial yang tetangani	kelompok	5	5	100		
			sda	e Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	orang	25	25	100		
				2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	Keg	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah relawan kawasan siaga bencana yang diberdayakan	Orang	120	115	96	kesulitan mencari relawan yang aktif berperan serta dalam penanggulangan bencana	Bekerjasama dengan aparat kepolisian, TNI, Ormas dan Orpol untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana
			sda	F b Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah taruna siaga bencana yang diberdayakan	Orang	50	50	100		
				1 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TMP yang dikelola	TMP	1	1	100		
				a Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang direhab	Unit	1	1	100		
				a Rehabilitasi Sarana dan Prasarana TMPN Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang direhab	Unit	1	1	100		
				b Pengamanan TMPN Kabupaten/Kota	Jumlah orang pengamanan TMP	Unit	1	1	100		

b. Permasalahan

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum komprehensif dan valid :
 - a) Fasilitasi dan penyediaan bansos/bankeu diberikan pada buruh migran sesuai jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen;
 - b) Ada beberapa PM yang meninggal dunia;
 - c) Kesulitan mencari relawan yang aktif berperan serta dalam penanggulangan bencana;
 - d) Belum tersedianya data PPKS yang komprehensif dan valid;
 - e) Banyaknya PPKS yang belum masuk ke DTSK sehingga menghambat tahap intervensi;
 - f) Penanganan PPKS harus ditetapkan BNBA satu tahun sebelum tahun anggaran, sementara kasus baru sering muncul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera;
 - g) Banyaknya lanjut usia terlantar sementara di Kebumen belum ada lembaga yang secara khusus menangani.
- 2) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - a) Tidak bisa mengeluarkan kepesertaan DTKS bagi warga yang sudah mampu;
 - b) Tidak ada perangkikan/status kesejahteraan/desil di dalam DTKS;
 - c) DTKS tidak relevan untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA;
 - d) Sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2021 permohonan DTKS dan BAST ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.
- 3) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
Masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan tentang resiko dan penanggulangan bencana

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas selama tahun 2021 antara lain:

- 1) Sosialisasi tentang permasalahan bencana sosial (korban tindak kekerasan), pemberian layanan kesehatan, pelayanan psikososial dan pelayanan psikologi bagi migran korban tindak kekerasan
- 2) Bekerjasama dengan aparat Kepolisian, TNI, Ormas dan Orpol untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana
- 3) Melakukan pendataan dan pemutakhiran berkala penyandang disabilitas
- 4) Diajukan masuk DTKS jika memenuhi persyaratan
- 5) Dicarikan bantuan dari sumber lain yang bisa diakses secara cepat.
Contoh: berkoordinasi dengan BAZNAS dan CSR

- 6) Berkoordinasi dengan panti sosial milik Provinsi
- 7) Memaksimalkan SDM dan PSKS yang sudah ada dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait
- 8) Mengeluarkan data KPM yang sudah mampu dari data penerima bantuan sosial
- 9) Melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap DTKS untuk menentukan data penerima bansos
- 10) Menggunakan DTKS periode Oktober 2020 dan kroscek ke lapangan
- 11) Pengusulan DTKS menggunakan 11 kriteria fakir miskin teregister sesuai Kepmensos 146/HUK/2013
- 12) Permohonan DTKS menggunakan tandatangan Bupati dan BAST menggunakan tandatangan Kepala Dinas Sosial.
- 13) Penguatan kapasitas kelompok rentan di 8 kecamatan daerah zona merah (Karanggayam, Karanganyar, Puring, Padureso, Karangsambung, Sadang, Sempor dan Kuwarasan.)
- 14) Kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) pada sekolah dari tingkat PAUD s/d SLTA kawasan pesisir, longsor dan banjir
- 15) Kegiatan *Green Belt Mangrove* seluas $\pm$ 104 ha dari DAS Ijo, Telomoyo, Lukulo sampai DAS Wawar
- 16) Pelatihan simulasi untuk pelaku wisata pantai pada 10 titik dari pantai Ayah sampai pantai Lembu Purwo Kecamatan Mirit.
- 17) Kegiatan Tagana masuk nelayan melalui DPC HNSI Kab. Kebumen untuk 4 TPI (TPI Pedalen, Logending, Karangduwur, dan TPI Pasir)
- 18) Pembentukan 2 Kawasan Siaga Bencana (KwSB)
- 19) Kesiapan logistik dan distribusi logistik ke penyintas
- 20) Penyiapan lumbung sosial di 4 Kecamatan (Karanganyar, Gombong, Prembun dan Karangsambung) dan lumbung rumah
- 21) Bimtek Tagana meliputi pengenalan karaktersitik bencana, PPGD dan layanan dukungan psikososial

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan sosial diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 86% atau kategori tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun rata-rata capaian kegiatannya adalah 90%, terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 95,56% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kebumen sebagai indikator capaian urusan sosial menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2020 persentase penanganan PMKS sebesar 96,12% menurun menjadi 89,18% pada tahun 2021. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS. Adapun rincian Jumlah PMKS di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Cakupan Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

NO	URAIAN	2020	2021
1	Jumlah PMKS	640.654	803.592
2	PMKS yang tertangani	615.792	716.639
3	Persentase Penanganan PMKS	96,12%	89,18%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, 2021

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi Dan Informatika, Urusan Koperasi (Usaha Kecil Dan Menengah), Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan. Keseluruhan urusan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Kebumen sesuai dengan Rencana Kerja Daerah Tahun 2021.

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3) Program Hubungan Industrial.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 23 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	1 Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	A PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	800	800	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah kegiatan dan pelatihan yang berkompetensi bagi pencari kerja	kegiatan	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah orang pencari kerja yang mengikuti pelatihan	orang	800	800	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah paket kerjasama dengan LPKS	paket	5	4	80	Adanya refofusing anggaran, yang tadinya 5 paket menjadi 4 paket	Merencanakan kembali target tersebut pada tahun berikutnya
				2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja	orang	60	60	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah instruktur LPKS yang terbina	orang	60	60	100		
				B PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja terdaftar	persen	24,01	51,81	215,78		
				1 Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelayanan antar kerja	kegiatan	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja Jumlah Kegiatan Pelayanan	Jumlah kegiatan pelayanan antar kerja	kegiatan	1	1	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah orang Terserapnya tenaga kerja dari masyarakat setengah menganggur dari keluarga	Jumlah orang Terserapnya tenaga kerja dari masyarakat setengah menganggur dari keluarga miskin dan di PH	orang	660	660	100		
				2 Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja yang terdaftar	persen	24,01	51,81	215,78		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah lokasi terselenggaranya sosialisasi perlindungan dan penempatan PMI Jumlah orang calon PMI yang mempunyai sertifikat dan kompehensi	Lokasi orang	3 30	3 30	100 100		
			Sda	b Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah orang calon PMI yang mengurus paspor	orang	1750	347	43	Adanya pademi Covid 19 banyak Negara belum dibuka, apabila sudah dibuka untuk karantina Negara penempatan masih dibatasi	Menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk penempatan
			Sda	c Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	orang	75	75	100		
				C PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terbinanya Hubungan Industri yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Perusahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan penyelesaian kasus perselisihan dengan perjanjian bersama diluar Pengadilan Hubungan Industrial	kegiatan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PemulihanPerekonomianDaerah BerbasisKomoditas danKawasan UnggulanDaerah BerbasisPertanian danPariwisata	a Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1(satu)daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial	kegiatan	1	1	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan lembaga kerjasama Tripartit	kegiatan	1	1	100		

b. Permasalahan

Adanya pandemi covid 19 untuk penempatan tenaga kerja luar negeri tidak memenuhi target yang direncanakan di karenakan negara untuk penempatan masih di tutup

c. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah dilakukan ditahun 2021 akan tetap dilaksanakan ditahun 2022 untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja antara lain:

1. Menjalin kerjasama dengan Bursa Perusahaan untuk meningkatkan jumlah kualitas pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia industri.
2. Perluasan kesempatan kerja dengan membuka sebesar-besarnya wirausaha baru melalui kegiatan tenaga kerja mandiri diwilayah di desa-desa
3. Optimalisasi penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media sosial yang dimiliki Disnaker (Website, Facebook, Instragram dll).
4. Job canvassing (mencari informasi lowongan pekerjaan dan upaya memasarkan tenaga kerja) kepada Perusahaan baik tingkat lokal maupun nasional agar mau merekrut tenaga kerja dari Kabupaten Kebumen.
5. Memaksimalkan bursa kerja khusus yang ada di SMK/SMA untuk memberikan informasi penempatan kerja alumninya dan secara rutin Disnaker meminta laporan penempatan perbulan.
6. Memfasilitasi tempat seleksi di Kabupaten Kebumen bagi perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja (tempat seleksi di Aula Disnaker).
7. Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak terkait di bidang ketenagakerjaan.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Tenaga kerja diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 110,64% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian kegiatan adalah 124,84%, terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 88,63% atau kategori tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Hasil pelaksanaan program urusan tenaga kerja adalah Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja. Untuk mengetahui jumlah

Peningkatan keterserapan tenaga kerja dihitung dengan rumus % jumlah penempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata ditambah dengan % jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan kemudian dibagi 2, atau lebih jelasnya sebagai berikut :

Capaian
peningkatan
keterserapan
tenaga kerja

=

% jumlah penempatan
tenaga kerja/ jumlah
pencari kerja yang
terdata

+

% jumlah peserta
pelatihan yang
terserap/jumlah pelatihan

2

Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja tahun 2021 sebesar 42%. Capaian tersebut berdasarkan persentase jumlah penempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata sebesar 51,81% ditambah Persentase jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan 32,19% dibagi 2. Adapun rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 24 Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

NO	URAIAN	JUMLAH	
		2020	2021
1	Pencaker	13.582	14.609
2	penempatan pencaker	2.137	7.569
3	prosentase penempatan	15,73	51,81
4	Pelatihan	380	576
5	penempatan pelatihan	60	185
6	prosentase penempatan	15,79	42.00

Sumber: Disnaker Kabupaten Kebumen, 2021

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2021 ini memperparah kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen akan meningkat karena berhenti bekerja, buruh tidak tetap di Kabupaten Kebumen akibat sektor ekonomi yang mempekerjakannya berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen juga meningkat akibat pulangnya penduduk asli Kebumen yang merantau bekerja di kota besar (pekerja migran). Mereka berhenti bekerja karena diterapkannya kebijakan lock down di tempat bekerjanya akibat pandemi Covid-19 dan memilih pulang ke Kebumen untuk mengurangi beban ekonomi kehidupannya.

Pada tahun 2021 Jumlah pengangguran mencapai 6,03 persen. Angka ini diperoleh dari persentase jumlah angkatan kerja tahun 2021 sejumlah 620.127 orang dibagi dengan jumlah Angkatan Kerja Yang Tidak Memperoleh Kesempatan Kerja sejumlah 37.408 orang.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak; dan
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 25 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No .	URUSAN PEMERINTAH AN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
							TARGE T	REALISA SI	%			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.	A	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan	%	7,6	2,4	32	Adanya refocusing anggaran, sehingga pada tahun 2021 hanya melaksanakan peningkatan/penguatan PUG Desa, yaitu sebanyak 11 desa	Mengusulkan anggaran dan merencanakan kembali target tersebut di tahun yang akan datang
				1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan Kecamatan yang dibintek PPRG Jumlah orang yang mendapatkan fasilitasi penguatan PUG	OPD	52	52	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD dan Kecamatan yang dibintek PPRG	OPD	52	52	100		
						Jumlah orang yang mendapatkan fasilitasi penguatan PUG	orang	195	195	100		
				2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok (GOW dan DWP Kabupaten) yang mendapat fasilitasi dalam bentuk raker, sosialisasi dan pelatihan.	Kelompok	31	31	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah perempuan di perdesaan mendapat fasilitasi peningkatan peran dalam pembangunan	Orang	60	60	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok (GOW dan DWP Kabupaten) yang mendapat fasilitasi dalam bentuk raker, sosialisasi dan pelatihan Jumlah perempuan di perdesaan mendapat fasilitasi peningkatan peran dalam pembangunan	Kelompok	31	31	100		
					Jumlah perempuan di perdesaan mendapat fasilitasi peningkatan peran dalam pembangunan	orang	60	100	125		
			Pemenuhan hak perempuan anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak	B PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Kebumen 60 kasus	Kasus	60	110	183		
				1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	Kasus	60	110	183		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	2	100		
				2 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangan	%	100	100	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	Kasus	60	110	183		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan kasus perempuan korban kekerasan	Kegiatan	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			3 Peningkatan kualitas perempuan dalam keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam peningkatan ekonomi keluarga	C PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya pemahaman, kemampuan dan ketrampilan perempuan	Kelompok	31	31	100		
				1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK TKI) tingkat Desa yang terfasilitasi	Kelompok	1	1	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK TKI) tingkat Desa yang terfasilitasi	Kelompok	1	1	100		
				D PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan	Kelompok	108	40	37	Refocusing anggaran	Mengusulkan anggaran dan merencanakan kembali target tersebut di tahun yang akan datang
				1 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupaten	Dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupaten	Dokumen	1	1	100		
				E PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan	Kelompok	108	40	37	Refocusing anggaran	Mengusulkan anggaran dan merencanakan kembali target tersebut di tahun yang akan datang
				1 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yg mendapat sosialisasi FAD	Kelompok	27	27	100		
					Jumlah Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan yang terfasilitasi	Kelompok	27	27	100		
					Jumlah Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA	Kali	3	3	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang terfasilitasi	Kelompok	79	79	100		
					Jumlah Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA	Kali	3	3	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah Sosialisasi Pesantren Ramah Anak	Orang	40	40	100		
				2 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Mendapatkan Sosialisasi DRPA	Kelompok	40	40	100		
					Jumlah KPAD/KPAK di 26 Kecamatan yang Terfasilitasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kesehatan yang mendapat bintek KHA	Kelompok	40	40	100		
					Jumlah Rakor PPT Kecamatan di tingkat Kabupaten	Orang/Kali	1	1	100		
			Peningkatan TataKelolaPemerintahan yangbaik dan bersih danPenciptaanKondusivitasWilayah	a Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yangMendapatkan SosialisasiDRPA	Desa	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah KPAD/ KPAK di 26 Kecamatan yang terfasilitasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kesehatan yg mendapat Bimtek KHA	Kelompok	52	40	100		
					Jumlah Rakor PPT Kecamatan di Tingkat Kabupaten	Orang/ Kali	60/ 1	60/ 1	100		
				F PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan perlindungan khusus anak	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Kegiatan	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Konseling Informasi Edukasi (KIE)	Paket	1	1	100		
				2 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak.	%	100	100	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusifitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak.	Kasus	80	69	86	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani sebanyak 69 kasus.	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Anak dan
					Jumlah petugas P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen yang mengikuti Rakor	Orang	0	0	0	Rakor P2TP2A Kartika tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran	Melaksanakan Rakor P2TP2A Kartika pada tahun 2022
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Kasus bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kasus	80	69	86	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani sebanyak 69 kasus.	Capaian kinerja sebanyak 86,25%

b. Permasalahan

Pada program Prosentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan (PUG) dan target kinerja sebesar 7,6% atau sebanyak 34 desa realisasi sebesar 2,4% atau 11 desa sehingga capaian sebesar 32,24%, karena adanya refocusing anggaran sehingga pada tahun 2021 hanya dapat melaksanakan peningkatan/penguatan PUG Desa saja sedangkan untuk peningkatan/penguatan PUG tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak dapat terlaksana.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, adalah dengan mengupayakan untuk merencanakan kegiatan dan mengusulkan anggaran kembali pada tahun berikutnya dan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 77,45% atau kategori tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 108,30%. Tingkat kesesuaian kegiatan terhadap capaian program adalah 71,51% atau kategori sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

e. Capaian Kinerja Urusan

Target kinerja yang ditetapkan terkait urusan pemberdayaan perempuan adalah Prosentase penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pada tahun 2021 kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 115 kasus yang terdiri kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 69 kasus dan kasus terhadap perempuan dewasa 46. Sedangkan jumlah penanganan kasus terhadap perempuan, baik anak dan dewasa sebanyak 110 kasus, terdiri dari kasus perempuan anak sebanyak 64 kasus dan perempuan dewasa sebanyak 46 kasus, yang mendapat penanganan atau pendampingan dari Dispermades P3A Kabupaten Kebumen.

Karena Kasus kekerasan anak yang terhimpun/terlaporkan di tahun 2021 menurun, sehingga menurun pula layanan kesehatan yang diakses oleh korban. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi.

Tabel 3. 26 Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator	2020	2021
1	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	112	115
2	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	60	41
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	26	35
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	26	29
5	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, 2021

3. Urusan Pangan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- 4) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 27 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komositas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	A PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANAN	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	%	94,20	85,90	91,19	Konsumsi pangan hewan, umbi-umbian dan kacang-kacangan masih rendah, sehingga target capaian skor pola harapan tidak tercapai. Rendahnya konsumsi tersebut dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahamai pengetahuan tentang pangan dan gizi	1 Perlu adanya edukasi, sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi dan seimbang dengan memanfaatkan pangan lokal 2 Perlu dilakukan upaya untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal pengganti beras seperti singkong, jagung, umbi-umbian yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kebumen
				1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan lumbung pangan	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Pembangunan Lantai Jemur	Unit	1	1	100		
					Jumlah Pembangunan Lumbung Pangan	Unit	1	1	100		
					Jumlah Pembangunan Rumah RMU	Unit	1	1	100		
					Jumlah Pengadaan RMU	Unit	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pengembangan/pengisian lumbung pangan masyarakat	Kelompok	26	26	100		
					Jumlah Pembangunan Lantai Jemur	Unit	0	0	0	Indikator pada subkegiatan ini dipindahkan pada subkegiatan penyediaan infrastruktur lumbung pangan	
					Jumlah Pembangunan Lumbung Pangan	Unit	0	0	0	Indikator pada subkegiatan ini dipindahkan pada subkegiatan penyediaan infrastruktur lumbung pangan	
					Jumlah Pembangunan Rumah RMU	Unit	0	0	0	Indikator pada subkegiatan ini dipindahkan pada subkegiatan penyediaan infrastruktur lumbung pangan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Pengadaan RMU	Unit	0	0	0	Indikator pada subkegiatan ini dipindahkan pada subkegiatan penyediaan infrastruktur lumbung pangan	
				B PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	%	94,20	85,90	91,19	Konsumsi pangan hewani, umbi-umbian dan kacang-kacangan masih rendah sehingga target capaian skor pola harapan tidak terapai. Rendahnya konsumsi tersebut dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami pengetahuan tentang pangan dan gizi	1 Perlu adanya edukasi, sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi dan seimbang dengan memanfaatkan pangan lokal 2 Perlu dilakukan upaya untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal pengganti beras seperti singkong, jagung, umbi-umbian yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kebumen

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan penyediaan informasi pangan, koordinasi distribusi pangan, pemantauan pasokan pangan dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan	Kegiatan	3	3	100,00		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen database potensi produk pangan (NBM)	Dokumen	1	1	100,00		
			sda	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen data arus bahan pangan	Dokumen	1	1	100,00		
			sda	c. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Hasil dari pengumpulan dan pengolahan data laporan informasi pasokan, harga pangan dan akses pangan di daerah	Dokumen	52	52	100,00		
			sda	d. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelompok yang dilaksanakan pemberdayaan lembaga distribusi pangan masyarakat (pembangunan pengembangan,	Kelompok	11	11	100,00		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pembinaan)						
					Jumlah kelompok yang dilakukan pembinaan dan pendampingan dana talangan pengadaan pangan	Kelompok	31	31	100,00		
					Jumlah kelompok yang melaksanakan padat karya pangan pembuatan jalan usaha tani	Kelompok	10	10	100,00		
				2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	100,00		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	20	20	100,00		
				3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kegiatan	2	2	100,00		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pemberian stimulan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	Desa	19	19	100,00		
					Jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi P2KP dan promosi P2KP	Desa	13	13	100,00		
			sda	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah kegiatan survey pola konsumsi pangan	Kegiatan	0	0	-	Refocusing	
					Jumlah dokumen Skor Pola Pangan Harapan	Dokumen	1	1	100,00		
				C PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	%	94,20	85,90	91,19	Konsumsi pangan hewani, umbi-umbian dan kacang-kacangan masih rendah sehingga target capaian skor pola harapan tidak terapai. Rendahnya konsumsi tersebut dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami pengetahuan tentang pangan dan gizi	1 Perlu adanya edukasi, sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi dan seimbang dengan memanfaatkan pangan lokal 2 Perlu dilakukan upaya untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal pengganti beras seperti singkong, jagung, umbi-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											umbian yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kebumen
				1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kegiatan penyusunan dan analisis peta ketahanan dan kerawanan pangan	Kegiatan	1	1	100,00		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	Dokumen	1	1	100,00		
				2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa mandiri pangan	Kegiatan	1	1	100,00		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan desa mandiri pangan	Desa	3	3	100,00		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
					Prosentase capaian Skor Pola Pangan Harapan	%	94,20	85,90	91,19	Konsumsi pangan hewani, umbi-umbian dan kacang-kacangan masih rendah sehingga target capaian skor pola harapan tidak terapai. Rendahnya konsumsi tersebut dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami pengetahuan tentang pangan dan gizi	1 Perlu adanya edukasi, sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi dan seimbang dengan memanfaatkan pangan lokal 2 Perlu dilakukan upaya untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal pengganti beras seperti singkong, jagung, umbi-umbian yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kebumen
				1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	100,00		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sampel	170	201	118,24		
					Jumlah sampel pangan yang diperiksa pada pengawasan pangan, pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada produsen dan pedagang						

b. Permasalahan

Konsumsi pangan hewani, umbi-umbian dan kacang-kacangan masih rendah, sehingga target capaian skor pola panan harapan tidak tercapai. Rendahnya konsumsi tersebut dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami pengetahuan tentang pangan dan gizi

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Perlu adanya edukasi/sosialisasi pembinaan terhadap masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam bergizi dan seimbang dengan memanfaatkan pangan lokal.
- 2) Perlu dilakukan upaya untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya lokal pengganti beras seperti singkong, jagung, umbi-umbian yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kebumen

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pangan diketahui rata-rata capaian kinerja programnya adalah 91,19% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%. Dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 91,19% atau sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program yang telah disampaikan telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu berkurangnya penduduk miskin. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase penanganan kerawanan pangan	%	80,91	70,23	83,20	118,47%	70,23
2. Persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya	%	59,57	69,35	69,35	100,00%	69,35
3. Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	%	61,08	60	68,69	114,48%	60,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, 2021

Capaian kinerja indikator prosentase Penanganan Kerawanan Pangan dengan target 70,23% terealisasi sebesar 83,20 %. Prosentase ini diperoleh dengan perhitungan : jumlah desa yang tertangani sampai dengan tahun 2021 yaitu sejumlah 109 desa dibagi jumlah desa rawan pangan (sesuai Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) yaitu sejumlah 131 desa kali 100%.

Capaian kinerja indikator prosentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harganya dengan target 69,35% terealisasi sebesar 69,35 %. Prosentase ini diperoleh dengan perhitungan : Jumlah Gapoktan yang tertangani stabilitas harganya tahun 2021 yaitu sejumlah 319 dibanding jumlah gapoktan sejumlah 460 Gapoktan kali 100%.

Capaian kinerja indikator prosentase kelompok wanita yang melaksanakan penganeka-ragaman konsumsi pangan dengan target 60,00% terealisasi sebesar 68,69 %. Prosentase ini diperoleh dengan perhitungan: Jumlah kelompok wanita yang melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan s.d. tahun 2021 sejumlah 316 desa dibagi jumlah desa dan kelurahan (460 desa/ kelurahan) kali 100%.

4. Urusan Lingkungan Hidup

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 29 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Lingkungan Hidup	DisperkimLH		A PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terfasilitasinya upaya akses informasi sumberdaya lingkungan hidup	%	16,66	16,66	100		
				1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya upaya akses informasi sumberdaya lingkungan hidup	Keg	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (RPPLH)	dok	1	1	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (IKPLHD)	dok	1	1	100		
					Jumlah kegiatan operasionalisasi dan pengembangan aplikasi PPLH	Keg	1	1	100		
				B PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penurunan Beban Pencemaran lingkungan	%	10	10	100		
				1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya encegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	keg	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah bulan operasional kegiatan laboratorium lingkungan Jumlah dokumen hasil pengujian kualitas lingkungan (kualitas air, udara, tanah)	Bulan Dok	12 501	12 501	100		
			Sda	b Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah bulan operasional kegiatan laboratorium lingkungan	dok	1	1	100		
				2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran	Keg	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah kegiatan penyuluhan polusi dan pencemaran lingkungan Jumlah papan edukasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup (prioritas Geopark) Jumlah sarpras (bor biopori dan kelengkapannya dan papan informasi lingkungan mendukung GNKK) Jumlah sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	Kali PaketPaket kali	4 1 2 4	4 1 2 4	100		
			Sda	b Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah IPAL industri kecil/Biogas	Unit	2	2	100		
				3 Kegiatan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemulihan pencemaran	KEG	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	jumlah Faslitasi forum pegiat lingkungan / Forum DAS/ Mangrove jumlah paket Bantuan bibit tanaman konservasi (P : Desa argopeni 20.000.000, K: Desa Semali Rp. 38.250.000,- Ds. kepapangan Rp. 60.000.000,- Ds. kedungdowo Rp. 55.801.000) Jumlah paket bibit tanaman konservasi (Prioritas Lingkungan Hidup) (jumlah Pembentukan dan penguatan kelembagaan kampung iklim jumlah Penanda mata air jumlah Penyuluhan Kelompok Tani Hutan sekitar mata air jumlah Peringatan hari LH Jumlah sarpras (bibit tanaman konservasi, kampung iklim, penanda mata air) jumlah Sosialisasi penanganan koservasi SDA dan sarpras yang dilaksanakan	kali paket paket kel paket kali kali paket kali	4 4 3 12 1 4 1 3 4	4 4 3 12 1 4 1 3 4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	b Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah kegiatan Peringatan HCPSN Jumlah lokasi kegiatan sosialisasi Rencana Induk (RIP) dan renaksi pelestarian sumber daya genetik dan HCPSN Rencana aksi/ demplot pelestarian sumberdaya genetik	kali lokasi lokasi	1 5 2	1 5 2	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian luas RTH perkotaan	%	10	10	100		
				1 Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati/kota	Terfasilitasinya kegiatan upaya keanekaragaman hayati	keg	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jasa konsultasi perencanaan masterplan taman di kota kebumen. Jasa konsultasi perencanaan /reviu tugu batas kab. Kebumen	dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	b Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Biaya non fisik pengadaan tugu batas kota (Ds. Wiromartan), air mancur, pertamanan. Pemindahan taman median jalan dan lampu asmaul husna Jumlah RTH/taman/TPU (gombang, karanganyar, kebumen, kutowinangun, prembun), pemeliharaan taman edukasi, taman tugu lawet, tugu batas kota), meterisasi lampu taman Jumlah RTH yang dipelihara (gombang, karanganyar, kebumen, kutowinangun, Prembun) Jumlah TPU yang terbangun (P.) Rp. 400.000.000	Paket	2 3 5 2	2 3 4 2	96,24	Beberapa Paket Pekerjaan tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak pencukupi	Melakukan Perencanaan yang lebih awal untuk pekerjaan di Tahun berikutnya
				D PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase penurunan sumber polusi dari sumber tidak bergerak	%	10	10	100		
				1 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	keg	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitas dan pembinaan pengelolaan B3	kali	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	b Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3	keg	1	1	100		
				2 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Limbah	Keg	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah pengadaan sarana dan parasana kegiatan pengumpulan limbah B3 medis : motor roda 3, bangunan depo pengumpul limbah b3, APD petugas pengangkut limbah B3, cold storage dan kantong plastik limbah b3 medis	%	100	100	100	Waktu pelaksanaan yang sangat terbatas mendekati akhir tahun anggaran	Alokasi DAK di awal atau pertengahan tahun anggaran
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase perubahan beban pencemaran lingkungan	%	10	10	100		
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	keg	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi ijin lingkungan (UKL UPL, AMDAL)	dok	50	39	78	Adanya perubahan regulasi tentang skala kegiatan sehingga jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL berkurang	
			Sda	b Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	unit	10	10	100		

b. Permasalahan

- 1) Adanya penambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan.
- 2) Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan yang anggarannya direfocusing yang seharusnya menunjang tingkat capaian program.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Sosialisasi secara terus menerus dan terpadu dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen;
- 2) Penerapan teknologi yang murah dan mudah untuk pengolahan air limbah;
- 3) Melakukan konservasi lahan secara massif, melalui gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip”
- 4) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- 5) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan; dan
- 6) Melaksanakan penegakan hukum lingkungan.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Lingkungan Hidup diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapaun rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja adalah 100%, atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Urusan Lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai sasaran kelima RPJMD yaitu meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2020	2021			TARGET AKHIR RPJMD 2021
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,22	77,5	64,44	83,14	77,5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

- 1) Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 3) Sebagai instrument indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator yang digunakan dalam penghitungan IKLH Kabupaten Kebumen berdasarkan Perbup IKU Nomor 30 Tahun 2016 mencakup dua variabel yaitu angka Indeks Kualitas Udara dan angka Indeks Kualitas Air (tidak menggunakan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dikarenakan Urusan Kehutanan menjadi urusan pemerintah Provinsi). Dari target IKLH yang ditetapkan Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 77,5 (RPJMD 2016-2021), realisasi mencapai 64,44 (prosentase capaian sebesar 83,14%). Adapun capaian IKLH tahun 2021 dengan menggunakan 3 variabel berdasarkan standar perhitungan IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan.

Dengan indikator Predikat IKLH: <40 = waspada • 40-50 = sangat kurang baik • 50-60 = kurang baik • 60-70 = cukup baik • 70-80 = baik • > 80 = sangat baik. Pada tahun 2020, nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen sebesar 74,21, atau masuk kategori “BAIK”.

Tabel 3. 31 Capaian IKLH Kabupaten Kebumen

No	Variabel	Capaian Tahun		Predikat
		2020	2021	
1.	Indeks Kualitas Udara	90,75	89,99	Baik
2.	Indeks Kualitas Air	57,69	52,37	Kurang Baik
3.	Indek Tutupan Lahan	70,66	37,86	Kurang Baik
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92	64,44	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2021

Selanjutnya jumlah produksi sampah dengan cakupan pelayanan pada tahun 2021 meliputi wilayah perkotaan Kecamatan Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun dan Prembun, sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN	JUMLAH
Wilayah perkotaan yang dilayani : Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun, Prembun		
1.	Jumlah Desa/Kelurahan kawasan perkotaan	126
2.	Jumlah Desa/Kelurahan di Kawasan Perkotaan Terlayani s/d 2021	74
3.	Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kawasan Perkotaan (Jiwa)	350.050
4.	Timbulan Sampah Yg Dihasilkan (m3/hr)	671,65
5.	Timbulan Sampah Yg Terangkut ke TPA (m3/hr)	397,20
6.	Sampah Yg Terangkut Ke TPA (%)	59,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2021

5. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pendaftaran Penduduk;
- 2) Program Pencatatan Sipil; dan
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 33 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		A PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pendaftaran Penduduk	%	100	100	100		
				1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan pendaftaran penduduk	kegiatan	7	7	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	jumlah pelaksanaan pelayanan adminduk di CFD/hari libur, jumlah sekolah yang difasilitasi program ketapel, jumlah tempat perekaman data kependudukan	Bulan	12	12	100		
			Sda	b Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Bulan	12	12	100		
			Sda	c Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	jumlah lokasi monitoring evaluasi dan pelaporan peristiwa kependudukan	Lokasi	27	27	100		
				2 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penataan administrasi kependudukan	kegiatan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis formulir dan buku pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Paket	2	2	100		
				3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	kegiatan	1	1	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Orang	486	486	100		
				B PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pendaftaran Penduduk		100	100	100		
				1 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil	kegiatan	2	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Percepatan capaian IKU penerbitan akta kematian dan penerbitan dokumen pencatatan sipil lainnya	dokumen	2.000	2000	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	b Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan, Jumlah lokasi pelayanan bayi lahir pulang membawa akte kelahiran, jumlah lokasi pelayanan jemput bola	Lokasi	12	12	100		
				2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	kegiatan	8	8	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Jumlah Koordinasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Institusi Lainnya	Kali	12	12	100		
				D PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Buku Data Kependudukan	Buku	150	150	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah agregat buku kependudukan	Buku	3	3	100		
				2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	kegiatan	3	3	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lokasi Penerima pengadaan sarana dan prasarana fasilitas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, Jumlah petugas SIAK yang terfasilitasi	Lokasi	12	12	100		
			Sda	b Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	lembaga	5	5	100		
			Sda	c Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Orang	75	75	100		

b. Permasalahan

- 1) Pada indikator cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya karena pada indikator capaian penerbitan Akta Kematian sudah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100% namun pada pencapaiannya ada sebagian akta kematian yang memiliki status terlambat melapor sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian terhadap data yang harus selalu update agar kantor, lembaga dan pihak-pihak yang memanfaatkan data dukcapil dapat terintegrasi dengan baik;
- 2) Pada indikator capaian kartu keluarga sudah mencapai target yang ditetapkan namun dalam pelaporannya masih mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat hanya melaporkan perubahan data kependudukan jika dibutuhkan saja;
- 3) Pada indikator capaian KTP-el sudah mencapai target yang ditetapkan namun masih ada sebagian jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman;
- 4) Adanya pandemi covid 19, sehingga diberlakukan pembatasan kegiatan pelayanan adminduk (sosialisasi dan jemput bola).

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen maka dapat dilakukan upaya mengatasi permasalahan diantaranya :

- 1) Pelayanan prima administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju antara lain:
 - a) Penduduk menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan tanpa biaya;
 - b) Perkembangan TI menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat;
 - c) Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam hal pelayanan adminduk;
- 2) Satu data kependudukan secara nasional. NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk dari lahir bahkan dibawa setelah meninggal dunia sehingga diperlukan NIK sebagai identitas tunggal administrasi.

- a) Implementasi integrasi *big data* kependudukan dalam semua proses pemerintahan di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2019. Integrasi *big data* ini memudahkan dalam semua proses pemerintahan. Proses tersebut secara bertahap telah dilakukan oleh jajaran Dukcapil. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut yang terkoneksi dengan banyak lembaga dan instansi-instansi pelayanan publik.
 - b) *Big data* mendorong penduduk untuk mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik;
- 3) Administrasi kependudukan menuju *Go-Digital*.
- a) Implementasi *Go-Digital* bertujuan mewujudkan pelayanan yang cepat dan membahagiakan masyarakat;
 - b) Mulai tahun 2019 jajaran Dukcapil telah menggunakan tanda tangan digital untuk mengurus data administrasi kependudukan (Admindak).
 - c) Masyarakat bisa mengurus keperluan layanan kependudukan seperti akta kelahiran tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Cukup mengisi formulir online, tekan enter dan data kependudukan yang diperlukan pun hadir sekejap mata. Bisa di-print out sendiri aktanya oleh penduduk dari rumah.
- 4) Semua penduduk memiliki identitas.

Salah satu hak penduduk diantaranya adalah setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya dokumen pendudukan tersebut maka penduduk tercatat dalam *database* kependudukan sehingga kementerian/lembaga (K/L) hingga swasta dapat memanfaatkan data administrasi kependudukan, khususnya nomor induk kependudukan (NIK) dan KTP-elektronik untuk segala keperluan pelayanan publik maupun penegakan hukum.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Urusan Ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran urusan, Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah berdasarkan kesadaran atas hukum. Capaian kinerja urusan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 34 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Prosentase cakupan penerbitan akta kematian	%	100	70	100	142,86	70
Presentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	%	97,07	96,60	91,72	94,95	90

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, Semester 1 Tahun 2021

Selain pada UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan, Pembuatan Akta kematian diatur dalam Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dari data diatas Indikator penduduk yang memiliki akta kematian pada tahun 2021 memperoleh angka capaian yaitu 100%. Capaian tersebut dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan Penerbitan} \\ \text{Akta Kematian} \end{array} = \frac{\sum \text{Kutipan Akta Kematian pada thn Y}}{\sum \text{Kematian pada thn Y}} \times 100\%$$

Jumlah penduduk yang meninggal pada tahun 2021 berjumlah 2.144 jiwa sedangkan jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 2.144 jiwa. Pada dasarnya warga masyarakat pada umumnya masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian. Warga merasa akta kematian tersebut hanya penting bagi mereka dengan ekonomi menengah ke atas yang memiliki warisan saja. salah satu pentingnya akta kematian adalah untuk validasi data kependudukan. Aspek kepentingan terkait pemuktahiran data kependudukan memang lebih pada kebutuhan negara, sehingga masyarakat kurang merasa hal itu sebagai kebutuhan dan kewajiban untuk mereka penuhi. Dengan demikian menjadi tugas aparatur negara untuk proaktif mendorong dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan memfasilitasi berbagai kemudahan untuk masyarakat yang mengurus dokumen akta kematian.

Secara prosedural setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh pemerintah desa/kelurahan ke Disdukcapil. Disdukcapil kemudian mengeluarkan akta kematian untuk validasi data kependudukan, agar yang sudah mati tidak masuk lagi database kependudukan. Selain itu dapat digunakan untuk pengklaiman asuransi ataupun perbankan, taspen dan urusan lainnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk. kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Capaian sasaran kepemilikan akta kelahiran Tahun 2021 sebesar 95,35% angka ini bersifat fluktuatif (setiap detik, menit dan hari bisa berubah) sehingga belum optimal dan masih perlu perhatian. Angka tersebut dihasilkan dari perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran} = \frac{\sum \text{Kepemilikan Akta 0-18 Thn pada Thn Y}}{\sum \text{Usia 0-18 Thn pada Thn Y}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 jumlah Kutipan Akta Kelahiran 356.518 dokumen, sementara jumlah kelahiran mencapai 388.704 jiwa. Permasalahan ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang terlambat dalam pembuatan akta kelahiran atau melaporkan kelahirannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terus melakukan upaya peningkatan capaian kinerja tersebut diantaranya dengan adanya:

- 1) Pencanaan pelayanan BALADA PAK-KIS (Bayi Lahir Dapat Paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Indentitas Anak, dan Kartu Indonesia Sehat) Balada Pak-Kis merupakan program penerbitan Akta Kelahiran cepat bagi bayi yang dilahirkan pada bangsal rumah sakit/puskesmas di Kabupaten Kebumen.
- 2) Melaksanakan Kerjasama dengan seluruh puskesmas, beberapa RS/RSKIA di Kabupaten Kebumen serta kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, bahwasanya bayi yang lahir di Puskesmas, RS/RSKIA dan BPJS di Kabupaten Kebumen dapat langsung membawa Paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Indentitas Anak, dan Kartu Indonesia Sehat pada saat keluar dari tempat tersebut.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 35 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		A PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Terfasilitasinya Kerjasama Pembangunan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama antar Desa	Desa	15	15	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama antar Desa	Desa	15	15	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kegiatan TMMD	Lokasi	3	3	100		
					Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Desa	1	1	100		
			Sda	c Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa kawasan perdesaan yang terfasilitasi	Desa	22	22	100		
					Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi programeberlanjutan pengembangan potensi Desa	Desa	26	26	100		
					Jumlah kegiatan TKPKP Kabupaten dan 5 TKPKP kawasan	Kegiatan	2	2	100		

No .	URUSAN PEMERINTAH AN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah terbentuknya kawasan perdesaan	Kawasan	1	1	100		
				B PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun APBDes sesuai standar	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan	13	13	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pendampingan KPMD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli	Desa/ Orang	449/ 130	449/ 130	100		
					Jumlah Penghargaan Desa Award (Lomba inovasi desa, Lomba Gototng Royong, Kades Teladan, UPK Terbaik, Dekelana, Bumdes terbaik, Pasar Desa Terbaik, Pendamping Desa terbaik)	Kegiatan/Ke giatan	1/1	1/1	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitas penyusunan produk hukum desa	Desa	26	26	100		
			Sda	c Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes	Dssa	449	449	100		
					Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan	Dssa	26	26	100		

No .	URUSAN PEMERINTAH AN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Musrenbangdes/kelnya						
					Jumlah desa yg mendapat fasilitasi pendampingan perencanaan/kelurahan	Dssa	2	2	100		
			Sda	d Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapat pelatihan aplikasi Siskeudes	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang menyusun APB Desa, APB Desa Perubahan, Penjabaran APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa.	Desa	449	449	100		
			Sda	e Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Baru yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa	Orang	104	104	100		
					Jumlah aparatur Pemerintah desa yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa	Orang	130	130	100		
			Sda	f Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi pelaksanaan Musdes	Kecamatan	26	26	100		
			Sda	g Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUM Desa yang mendapatkan fasilitasi kelayakan usaha	Unit	10	10	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah desa yg mendapat fasilitas pembentukan BUMDES	Desa	98	98	100		
					Jumlah kelembagaan pengelolaan aset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan tingkat Kecamatan yang difasilitasi	Desa	26	26	100		
			Sda	h Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa Pilkades Antar Waktu	Desa	2	2	100		
					Jumlah Kades yang diberhentikan	Orang	2	2	100		
					Jumlah kegiatan fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kegiatan	2	2	100		
			Sda	i Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Sosialisasi Jam Kerja Aparatur Pemerintah Desa	Desa	26	26	100		
					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kegiatan	1	1	100		
					Jumlah Perangkat Desa yang diangkat	Orang	25	25	100		

No .	URUSAN PEMERINTAH AN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	j Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Profil Desa/Kelurahan, Pelatihan Sistem Informasi Desa serta Penyusunan IDM	Desa/ Kelurahan	130	130	100		
					Jumlah Kelurahan yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Profil Desa/Kelurahan, Pelatihan Sistem Informasi Desa serta Penyusunan IDM	Desa/ Kelurahan	11	11	100		
			Sda	k Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi dan Bimtek aset-aset desa	Desa	52	52	100		
			Sda	l Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa	Orang	130	130	100		

No .	URUSAN PEMERINTAH AN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	m Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi ADD (Dana Desa APBN) Jumlah desa yg mendapat fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap) Jumlah desa yg mendapat fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah desa yg mendapat fasilitasi Bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan Kabupaten dan bantuan keuangan lainnya	Desa	449	449	100		
				C PROGRAMPEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKAT AN,LEMBAGA ADAT DANMASYARAKATHUKUM ADAT	Terfasilitasinya upayapeningkatan keberdayaanmasyar akat desa	Pelatihan	11	11	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yg mendapat fasilitasi pemberdayaan LKD (RT,RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK dan LPMD	Desa	52	52	100		

No .	URUSAN PEMERINTAH AN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan KP SPAMS	Desa	160	160	100		
					Jumlah desa yg mendapat fasilitasi pembentukan Satgas Adat dan pemberdayaan lembaga adat	Desa	26	26	100		
					Jumlah desa yg mendapat fasilitasi pemberdayaan LKD (RT,RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK dan LPMD)	Orang	52	52	100		
			Sda	b Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantekdes yang dibentuk (Kecamatan Adimulyo)	Unit	1	1	100		
			Sda	c Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah kelompok usaha lembaga ekonomi msyarakat desa (UED-SP CPPD, UP2K) yang difasilitasi	Kelompok	21	21	100		
					Jumlah pasar desa yang dibina	lokasi	86	86	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	d Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang mendapat pendampingan perencanaan BBGRM Provinsi Jawa Tengah (didesa Bejrung Kecamatan Sempor)	Desa	1	1	100		
			Sda	e Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan kegiatan Evaluasi TP.PKK	Desa	49	49	100		
					Jumlah peserta yang mendapat pelatihan penguatan pengelolaan gerakan PKK	Orang	972	972	100		
					Jumlah desa yang mendapat paket bantuan alat pembuatan Minuman Rempah Sari Minuman Lawan Korona (Semilakor)	Desa	130	130	100		
					Jumlah peserta yang mendapat pelatihan pembuatan minuman Semilakor	Orang	130	130	100		
					Jumlah TP.PKK desa yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 200	Orang	200	200	100		
					Jumlah TP.PKK Kecamatan yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 26 Kec	Kecamatan	200	200	100		

No .	URUSAN PEMERINTAH AN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah TP.PKK kelurahan yang mendapat pembinaan/pemberda y aan	Kelurahan	11	11	100		

b. Permasalahan

Pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kinerjanya Terfasilitasinya upaya peningkatan keberdayaan masyarakat desa dan target sebanyak 11 pelatihan, dengan capaian kinerja sebanyak 100% atau sebanyak 11 pelatihan. Tetapi jumlah peserta pelatihan belum sesuai target, dikarenakan terbatasnya ketersediaan anggaran yang disebabkan oleh adanya refocusing anggaran. Disamping itu waktu pelaksanaan pelatihan juga mengalami pengurangan, antara lain untuk pelaksanaan pelatihan LKD yang semula direncanakan atau ditargetkan selama 2 (dua) hari menjadi 1 (satu) hari.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, adalah dengan mengupayakan untuk merencanakan kegiatan dan mengusulkan anggaran kembali pada tahun berikutnya dan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan masyarakat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan sebesar 100% sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau sangat tinggi

e. Capaian Kinerja Urusan

Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan urusan dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 36 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Prosentase pembentukan Bumdes	%	16 ,92 (76 desa)	100 (449 desa)	100 (449 desa)	100	100
2. Prosentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan tentang pemerintahan desa	%	27,65% (2.236 orang)	16,66 (1.347 orang)	4,5 (364 orang)	27,01 (total capaian : 94,28) / s/d 2020 total capaian 89,78 +	90

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
					4,5	
3. Prosentase penanganan kasus penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100% (126 kasus tertangan)	100%	100 (137 kasus tertangani)	100	100 (412 kasus)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, 2021

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), maka Renstra/RPJMD menargetkan sebanyak 449 telah membentuk Bumdes. Adapun tujuan pendirian Bumdes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa, meningkatkan, pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pada tahun 2021 atau pada akhir periode Renstra ditargetkan sebanyak 100% atau sebanyak 449 Bumdes dan telah terealisasi sebanyak 449 Bumdes atau seluruh desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa. Selama periode Renstra Dispermades P3A Kabupaten Kebumen telah menargetkan sebanyak 8.082 orang aparatur pemerintah desa atau sebanyak 90,50% dari jumlah aparatur yang ada pada awal periode Renstra yaitu sebanyak 8.930 orang. Sampai dengan tahun 2020 aparatur pemerintah desa yang sudah dilatih sebanyak 7.256 orang dan pada tahun 2020 melatih sebanyak 2.236 orang jadi jumlah seluruh aparatur pemerintah desa yang sudah dilatih sampai dengan tahun 2020 sebanyak 7.256 orang atau sebanyak 89,78% dari target periode Renstra. Selanjutnya pada tahun 2021 telah melatih sebanyak 364 orang aparatur pemerintah desa dan BPD atau sebanyak 27,01% dari target renstra pada tahun 2021 sebanyak 1.347 orang dan sebanyak 4,5% dari target RPJMD (8.082 orang), sehingga sampe tahun 2021 telah melatih sebanyak 7.620 orang atau sebanyak 94,28 dari target akhir RPJMD, yaitu sebanyak 8.082 orang.

Penanganan kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat ditangani 100%. Terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat atau kasus, pada Dispermades

P3A, setiap tahun pada periode Renstra telah ditargetkan sebanyak 100%, dengan rumus jumlah kasus yang masuk dibagi dengan jumlah kasus atau pengaduan masyarakat yang tertangani. Pada tahun 2021 kasus atau aduan masyarakat yang masuk seluruhnya berjumlah 137 kasus, yang terbagi dalam dua kriteria, yaitu kasus tentang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak 25 kasus dan sebanyak 112 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari jumlah kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, hampir sebagian besar adalah kasus mengenai pelanggaran larangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pengendalian Penduduk;
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana; dan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 37 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		A PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	25	25	100		
				1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	jumlah dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Dok	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Penyusunan dan Pemanfaat Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Grand design kependudukan tingkat Kabupaten/Kota yang tersusun	Dok	1	1	100		
			Sda	b Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Jumlah pendidikan kependudukan formal dan nonformal yang mendapatkan sosialisasi kependudukan	Lembaga	5	5	100		
				2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	Dok	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen kajian dampak kependudukan yang tersusun	Dok	1	1	100		
			Sda	b Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	- Jumlah dokumen parameter kependudukan - Jumlah dokumen profil kependudukan keluarga berencana	Dok	1 1	1 1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan pembangunnan keluarga yang tersusun						
				B PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	%	85,5	69,05	80,76	- DO dan Unmeet Need yang masih tinggi - Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan pertemuan menjadi tertunda atau bahkan tidak dilaksanakan - Pembatasan Pelayanan KB MKJP	- KB pasca salin dan paska keguguran untuk bisa dimaksimalkan - KIE dipertajam melalui berbagai media baik elektronik, cetak dan media luar ruang, KIE perorangan dan kelompok serta media sosial lainnya - Sisa target yang belum tercapai ditambahkan ke tahun berikutnya
				1 Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan sarana dan prasarana KIE program KKBPK, Promosi dan Advokasi serta sarana dan operasional di balai penyuluh KKBPK	kegiatan	4	4	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Sda	a Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	jumlah advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	kali	3	3	100		
				b Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah paket sarana KIE program KKBPK yang tersedia dan terdistribusi	Kecamatan	26	26	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	c Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang dalam promosi dan KIE program KKBPK	Paket	1	1	100		
			Sda	d Pengelolaan Operasional an Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	jumlah lokasi tersedianya sarana dan operasional di balai penyuluh KKBPK	Kecamatan	26	26	100		
				2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapanga KB (PKB/PLKB)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional PKB/PLKB dalam menggerakkan kader IMP	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	- Jumlah sarana pendukung operasioanl PKB/PLKB yang tersedia - Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	Unit	5 26	5 26	100		
			Sda	b Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKB dan Sub PPKBD yang dibina	Orang	2.647	2.647	100		
				3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fasilitas kesehatan terfasilitasi alat dan dan obat kontrasespi dan sarana penunjang pelayanan KB dalam meningkatkan kesertaan penggunaan MKJP, serta kesehatan dan hak-hak reproduksi	Klinik/unit	57	57	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringannya yang difasilitasi distribusi alat dan obat kontrasespi dan sarana penunjang pelayanan KB	Alat	57	57	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	b Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah akseptor MKJP yang difasilitasi	Akseptor	4.891	7.553	154,4		
			Sda	c Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang difasilitasi kesehatan dan kelompok kegiatan yang terfasilitasi promosi dan konseling dan hak-hak reproduksi	Orang	750	750	100		
				4 PEMBERDAYAAN dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kebumen/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jumlah kampung KB yang terfasilitasi	Desa	70	70	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terfasilitasi	Desa	70	70	100		
				C PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	%	32,27	45,25	140,2		
				1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	Kegiatan	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	- Jumlah BKB KIT Stunting - Jumlah KIT Nikah Anti Stunting	Paket	10 10	10 10	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	b Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksanaan / Kader Keahan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	jumlah anggota kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R) yang di bimtek	Orang	130	130	100		
			Sda	c Promosi dan Sosialisai Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah anggota UPPKS yang mendapatkan promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orang	80	80	100		

b. Permasalahan

Permasalahan yang di hadapi selama pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan urusan PPKB adalah :

- 1. Belum adanya fasilitasi permodalan bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 2. Drop Out (DO) dan Unmeet Need yang masih tinggi;
- 3. Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan pertemuan menjadi tertunda atau bahkan tidak dilaksanakan.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya yang ditempuh di tahun 2021 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Membantu kelompok UPPKS dalam pemasaran produk;
- 2. KB pasca salin dan paska keguguran untuk bisa dimaksimalkan;
- 3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dipertajam melalui berbagai media baik elektronik, cetak dan media luar ruang, KIE perorangan dan kelompok serta media sosial lainnya.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 93,59% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 93,59% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Adapun capaian kinerja urusan dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 38 Perkembangan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISA SI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAAN	
1. Cakupan peserta KB aktif	%	70,60	85,50	69,05	80,76	85,10
2. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	%	44,04	32,27	45,25	140,22	32,31

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kebumen, 2021

Capaian kinerja tahunan cakupan Peserta KB Aktif tahun 2021 sebesar angka 80,84%. Realisasi 2021 sebesar 69,12% diperoleh dari jumlah peserta

KB aktif sebesar 133.698 jiwa dibagi jumlah PUS sebesar 193.410 jiwa. Dengan bertambahnya peserta KB aktif diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan dapat mengentaskan kemiskinan. Adapun perkembangan cakupan peserta KB aktif, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 39 Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2020-2021

NO.	URAIAN KINERJA	2020	2021
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,3
2.	Jumlah akseptor KB	137.676	133.723
	a. Laki-Laki	5.618	6.703
	b. Perempuan	132.058	127.020
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	199.214	193.660
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	137.183	133.723

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kebumen, 2021

Capaian kinerja cakupan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebesar angka 140,22%. Atau dengan kata lain Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 45,25%. Persentase ini dihitung dari jumlah PUS poktan Tribina yang ber KB Pra KS dan KS 1 sebesar 21.645 jiwa di bagi jumlah PUS Tribina dan UPPKS sebesar 47.836 jiwa di kali 100%.

Tabel 3. 40 Rekapitulasi Tingkat Kesejahteraan Keluarga

NO	TINGKAT KESEJAHTERAAN	JUMLAH
1.	Tahapan Keluarga Pra Sejahtera	25.143
2.	Tahapan Keluarga Sejahtera I	55.006
3.	Tahapan Keluarga Sejahtera II	113.261
4.	Tahapan Keluarga Sejahtera III	-
5.	Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus	-
TOTAL		193.410

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kebumen, 2021

8. Urusan Perhubungan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Perhubungan dilaksanakan melalui program prioritas Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 41 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN	1	A PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	71,89	85,80	119		
				1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rasio Cakupan Kebijakan Penetapan Jaringan Rencana Induk LLAJ	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Evaluasi dan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Jumlah dokumen tatralok kabupaten Jumlah kajian trayek angkudes	Dok	4	4	100		
				2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Cakupan Kebijakan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah DED ATCS Prembun dan Gombang	Dok	0	0	0	DED ATCS Prembun dan Gombang tidak ada dalam perencanaan anggaran TA 2021	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah LPJU dan Penyediaan Perlengkapan Jalan yang tersedia; Jumlah paket Perlengkapan Jalan di Jalan; Jumlah pengadaan lampu penerangan jalan umum (meterisasi, PJU); Jumlah pengadaan marka jalan Jumlah pengadaan pagar pengaman jalan Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan palang pintu Jumlah pengadaan rambu lalu lintas (60 x 60 dan RPPJ Geopark dan rawan laka dan wisata) Miniatur perlengkapan jalan dan rambu elektornik Jumlah pengadaan sarpras pengamanan lalu lintas (patok pengaman, cermin tikungan, paku jalan) Jumlah pengadaan warning lamp dan peningkatan traffic light berbasis ATCS Jumlah perlengkapan jalan Warning Lamp Solar Cell,Listri,RRLL,Rambu Parkir,Barikade	Paket	32	32	100		
					(usulan pokok pikiran) Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana ATCS Master Plan LPJU	Dok	3	3	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah LPJU yang dipelihara Jumlah paket Perlengkapan Jalan terehabilitasi dan terpelihara Jumlah perlengkapan jalan (warning lamp, traffic light, rambu,palang pintu KA) yang dipelihara	Paket	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rasio Cakupan Kebijakan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pengawasan parkir; Jumlah monev pengawasan; Jumlah rapat pengawasan	Kali	34	26	76,47	Pada saat pandemi membatasi pelaksanaan monev pengawasan parkir	Peninjauan langsung ke lapangan untuk lokasi yang bermasalah atau urgen
				4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Cakupan Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan kartu Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tersedia (smartcard, blue e,)	Bulan	12	12	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah unit pemeliharaan SarPras Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (braketester, smoketester, CO/HC tester, side slip tester, exeload tester, spedo tester, head light tester dst)	Unit	9 unit	9 unit	100		
				5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi lintas sektoral (forum lalu lintas)	Kali	11	2	18,18	Forum Lalu Lintas dan Operasi laik jalan tidak dapat memenuhi target yang ditentukan dalam RKPD 2021	Angaran pada oprasi laik jalan dialihkan untuk pengendalian dan pengaturan lalu lintas karena pada saat pandemi giat banyak terfokus pada operasi simpatik, pengamanan insidentil dan lain-lain
					Jumlah Operasi laik jalan	Kali	48	3	6,25	Forum Lalu Lintas dan Operasi laik jalan tidak dapat memenuhi target yang ditentukan dalam RKPD 2021	Angaran pada oprasi laik jalan dialihkan untuk pengendalian dan pengaturan lalu lintas karena pada saat pandemi giat banyak terfokus pada operasi simpatik, pengamanan insidentil dan lain-lain
					Jumlah pelaksanaan posko lebaran, natal dan tahun baru	Kali	2	2	100		
					Jumlah pengamanan pengendalian arus lalu lintas (pengamanan carfreeday dan carfreenight)	Bulan	12	12	100		
				6 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rasio-Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah kebijakan Andalalin yang ditetapkan	Kegiatan	1	1	100		
					Jumlah pengawasan Andalalin	Kegiatan	1	1	100		
					Jumlah Rakor Penilaian Hasil Andalalin Terkoordinasi dan Tersinkronisasi	Kali	18	10	56	Persetujuan pengesahan andalalin sesuai ijin yang diajukan ke dinas	Selalu berkoordinasi dengan BPMSTP dan DLHKP
				7 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pemilihan pelajar pelopor keselamatan	Kali	0	0	0	Tidak dapat melaksanakan giat pemilihan pelajar pelopor karena pandemi covid dan anggaran sudah direfocusing	Menganggarkan kembali ditahun berikutnya
					Jumlah sosialisasi kepada pelajar/ masyarakat umum	Kali	10	10	100		
					Terlaksananya sosialisasi keselamatan LLAJ kepada pelajar, masyarakat umum dan terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Cakupan Kebijakan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan angkutan gratis	Kec	0	0	0	Anggaran refocusing di triwulan I	Menganggarkan kembali ditahun berikutnya
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	b Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemilihan sopir teladan	Kali	0	0	0	Pemilihan sopir teladan tidak dilaksanakan karena pandemi covid dan Anggaran pemilihan sopir teladan dialihkan untuk sosialisasi pengukuran kapal di Jembatan, waduk sempor dan Muktisari bersama BPTD Wilayah X DIY Jateng	Menganggarkan kembali ditahun berikutnya
					Jumlah sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (paguyuban, agen bus)	Kali	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Cakupan Kebijakan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dlm Trayek Kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang terfasilitasi	Dok	80	80	100		
					Jumlah Unit Fasilitas yang terbangun	Unit	1	1	100		

b. Permasalahan

Beberapa sub kegiatan tidak bisa dilaksanakan di tahun 2021 karena terkena rasionalisasi/refocussing antara lain :

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
- 2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (angkutan gratis);
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; dan
- 4) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Menganggarkan kembali ditahun berikutnya untuk sub kegiatan diatas dikarenakan :

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota didalamnya yaitu pembangunan Pintu Perlintasan Kereta Api Kuwarisan, Kutowinangun karena sebagai poros penghubung antar desa (terdapat 5 desa) dan sebagai penghubung aktivitas perekonomian masyarakat.
- 2) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (penyediaan angkutan gratis) dapat menekan pertambahan angka kemiskinan yang terjadi sebesar 2,3% (sesuai hasil kajian studi).

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perhubungan, dapat diketahui capaian kinerja program adalah 119% atau kategori Hasil Sangat Tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga tingakta kesesuai antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram adalah 119% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Kualitas Layanan transportasi. Adapun dalam pelaksanaan urusan dengan indicator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 42 Perkembangan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	%	73,21	83,33	76,76	92,11	83,33

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Kebumen, 2021

Cakupan Kualitas Transportasi diperoleh dengan cara menghitung persentase dari perbandingan :

$$x = \frac{\left\{ \frac{\text{Jlh sarana kelengkapan jalan kondisi baik}}{\text{Jlh sarana kelengkapan jalan yg harusnya ada}} \times 100\% \right\} + \left\{ \frac{\text{Jlh sarpras LLAJ kondisi baik}}{\text{Jlh sarpras LLAJ yang harusnya ada}} \times 100\% \right\} + \left\{ \frac{\text{Jlh kendaraan yang uji KIR}}{\text{Jlh kendaraan yg harus uji KIR}} \times 100\% \right\}}{3}$$

Cakupan Kualitas Layanan Transportasi capaiannya 76,76% realisasi menggunakan persentase perbandingan (Jumlah sarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik/jumlah sarana kelengkapan jalan yg seharusnya ada x 100%)+(Jumlah sarana prasarana LLAJ dlm kondisi baik/Jumlah sarana prasarana LLAJ yang seharusnya ada x 100%)+(Jumlah kendaraan yang uji KIR / Jumlah kendaraan yang seharusnya uji KIR x 100%)/3).

Tabel 3. 43 Sarana Kelengkapan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Kelengkapan Jalan	Jumlah	Kebutuhan	%
1	Rambu – Rambu Lalu Lintas	2.461	8.000	30,76
2	LPJU	5.037	14.000	35,97
3	Traffic Light/WL	60	60	33,33
	Total Persentase I	7.558	22.060	34,26
1	Pagar Pengaman Jalan	1.204	2.000	60,2
2	Deliniator	381	350	108,85
3	Paku Jalan	241	350	68,85
4	Barikade	552	550	100,36
5	Water Barrier	242	100	242
	Total Persentase II	2.620	3.350	78,20
1.	Jumlah Kendaraan Uji KIR	7.659	6.500	117,83

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Kebumen, 2021

Dengan demikian perhitungan Capaian kinerja adalah sebagai berikut :
:(34,26+78,20+117,83)/3= 76,76%.

9. Urusan Komunikasi Dan Informatika

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Program Aplikasi Informatika.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 44 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		A PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Terwujudnya Program Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	%	100	100	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	jenis	2	2	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pembinaan PPID Pembantu/Bimtek Sosialisasi/Rapat Koordinasi	kegiatan	1	1	100		
			Sda	c Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah pertemuan LKM dan FK Metra	pertemuan	8	8	100		
				B PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Capaian Layanan SPBE	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet dan LAN	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang Diselenggarakan	paket	3	3	100		
				2 Kegiatan Pengelolaan e government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikelola	%	100	100	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikelola	paket	1	1	100		
			sda	b Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah yang Dikembangkan dan Dikelola	paket	1	1	100		

b. Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika adalah perlunya koneksi inetrnet yang stabil untuk layanan SPBE namun di beberapa lokasi (dikarenakan kondisi geografisnya) koneksi internetnya belum stabil sehingga menghambat layanan.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

dapun upaya yang dilaksanakan adalah menggunakan sewa jalur metronet (jasa pihak ketiga), dan sudah dilakukan di 5 kecamatan yaitu Ayah, Rowokele, Karanggayam, Sadang, dan Karangsambung).

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga tingkat kesesuain antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas layanan komunikasi. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 45 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATU AN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Capaian Layanan Komunikasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Kebumen, 2021

Cakupan Layanan komunikasi yang dimaksud dalam hal ini meliputi jumlah zona layanan komunikasi yang ada) : (jumlah zona layanan telekomunikasi yang seharusnya ada) x 100%. Dari 460 desa dan kelurahan yang ditargetkan mendapatkan pelayanan, terealisasi 460 desa dan kelurahan, atau dengan kata lain capaian layanan komunikasi mencapai target 100 %.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi;
- 2) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
- 6) Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 46 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH		A PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Prosentase Koperasi Aktif	persen	92	92	100		
				1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		persen	100	100	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub.Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah orang bagi pelatihan SPI,BINTEK,SAK ETA	orang	40	40	100		
			sda	b Sub.Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Koperasi yang patuh terhadap peraturan/regulasi Koperasi	koperasi	30	30	100		
				B PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang sehat	persen	92	92	100		
				1 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	persen	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dan Pembinaan Koperasi yang dinilai	orang	20	20	100		
			sda	b Sub.Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat	unit	0	0	0	anggaran direfocusing	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya
				C PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI	Prosentase koperasi yang mengikuti pelatihan	persen	92	92	100		
				1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	orang	120	120	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub.Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan komputerisasi akuntansi, pelatihan manajemen resiko, pelatihan on line koperasi dan sosialisasi peraturan perkoperasian	orang	120	120	100		
				D PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase koperasi yang mengikuti pemberdayaan	persen	92	92,36	100,39		
				1 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pemberdayaan perlindungan koperasi	Orang	120	120	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub.Kegiatan Pemberdayaa n Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah orang perwakilan koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan	Orang	120	120	100		
				E PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Jumlah UMKM	UMKM	46.057	46.100	100,09		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	%	100	100	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub.Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembanga n Usaha Mikro	Jumlah Paket teridentifikasi penyelenggaraan Pendampingan UMKM	Paket	5	2	40	Tahun 2021 adanya refocusing dari target 5 paket realisasi 1	Dinggarkan kembali ditahun berikutnya

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	b Sub.Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	jumlah lokasi kemitraan UMKM pada lokasi wisata Jumlah Paket Pembinaan Jejaring UKM produktif umlah lokasi Kemitraan Pasar Moderen	Lokasi	10	10	100		
			sda	c Sub. Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengembangan SDM UMKM Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Fasilitas Jaminan Halal jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi kebijakan UMKM jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi PIRT	Orang	75	75	100		
			sda	d Sub.kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah orang peningkatan kapasitas dan sertifikasi pendamping UMKM Jumlah orang sarasehan dengan pemangku kepentingan Jumlah paket pengurus komunitas/kelompok UMKM	Paket	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Paket Rangka Peningkatan UMKM Mikro menjadi Kecil						
			sda	e Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pemangku kepentingan yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi	Orang	50	50	100		
				F PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Jumlah UMKM dari skala Mikro ke UMKM kecil	UMKM	54	54	100		
				1 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Bantuan sosial tunai UMKM terdampak covid-19 yang tersalurkan	Orang	5500	3360	61,09	Pemberian Bantuan Sosial kepada UMKM yang terdampak Covid berupa uang tunai @ Rp 750.000,00 dari 5500 hanya terealisasi 3762 dikarenakan ada sebagian data UMKM yg tidak valid	Data yang tidak valid tidak dicairkan sejumlah 1738 dan dikembalikan ke kas daerah karena di tahun 2022 program tidak dilanjutkan
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub.Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan n Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Bantuan Sosial Uang Modal Kepada UMKM Jumlah Desa Pengembangan UMKM Jumlah Pokok Pikiran DPRD satu paket kegiatan Bazar	Orang	5500	3360	61,09	Pemberian Bantuan Sosial kepada UMKM yang terdampak Covid berupa uang tunai @ Rp 750.000,00 dari 5500 hanya terealisasi 3762 dikarenakan ada sebagian data UMKM yg tidak valid	Data yang tidak valid tidak dicairkan sejumlah 1738 dan dikembalikan ke kas daerah karena di tahun 2022 program tidak dilanjutkan

b. Permasalahan

- 1) Kualitas SDM koperasi baik pengurus maupun pengawas mayoritas masih kurang dalam mengelola koperasi, sehingga pertumbuhan koperasi lambat dan upaya peningkatan kesejahteraan anggota menjadi lambat pula.
- 2) Keberpihakan stakeholder koperasi, dimana di era sekarang ini koperasi dituntut untuk mandiri dan berdaya saing serta harus bisa mengikuti perkembangan jaman. disisi lain stakeholder harus memaksa agar koperasi bisa mengubah mainsetnya agar tidak terlalu bergantung pada pihak luar dan harus mandiri.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas sehingga dapat mendukung tugas-tugas secara profesional dan produktif.
- 2) Perlu adanya koordinasi internal maupun eksternal secara terpadu untuk lebih dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, khususnya gerakan koperasi di kabupaten kebumen, selain itu juga perlu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan pengkajian, pengembangan dan pembinaan personil serta penggalan dukungan dana yang proporsional.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Koperasi Dan UMKM diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100,10% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 80,16%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 124,88% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indicator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 47 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Presentase Koperasi Aktif	%	87,11	92	92,36	100,39	92
Peningkatan Jumlah UMKM	Jumlah	45.414	46.057	46.100	100,09	46.057

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, 2021

Adapaun rincian persentase jumlah koperasi aktif dan jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. 48 Data Jumlah Koperasi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	JML
1	KUD	22	1	23
2	Kop. Pertanian	12	0	12
3	Kop. Perkebunan	0	0	0
4	Kop. Peternakan	0	0	0
5	Kop. Perikanan	14	0	14
6	Kop. Kehutanan	0	0	0
7	Kopti	1	0	1
8	Kopra	0	0	0
9	Kopinkra	1	0	1
10	Koppontren	12	5	17
11	Kopkar	10	2	12
12	Kop. Angkatan Darat	2	0	2
13	Kop. Angkatan Laut	0	0	0
14	Kop. Angkatan Udara	0	0	0
15	Kop. Kepolisian	1	0	1
16	Kop. Serba Usaha	77	9	86
17	Kop. Pasar	3	2	5
18	Kop. Simpan Pinjam	46	0	46
19	Kop. Angkutan Darat	1	0	1
20	Kop. Angkutan Laut	0	0	0
21	Kop. Angkutan Udara	0	0	0
22	Kop. Angkutan Sungai	0	0	0
23	Kop. Angkutan Penyeberangan	0	0	0
24	Kop. Wisata	0	0	0
25	Kop. Telkom	0	0	0
26	Kop. Perumahan	0	0	0
27	K.B.P.R	0	0	0
28	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	89	3	92
29	Kop. Listrik Perdesaan	0	0	0

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	JML
30	Koperasi Asuransi Indonesia	0	0	0
31	Kop. Wanita	7	0	7
32	Kop. Profesi	0	0	0
33	Kop. Veteran	1	0	1
34	Kop. Wredatama	7	0	7
35	Kop. Pepabri	3	0	3
36	Kop. Mahasiswa	0	0	0
37	Kop. Pemuda	0	0	0
38	Kop. Pertambangan	0	0	0
39	Kop. Pedagang Kaki Lima	2	0	2
40	Kop. Jamu Gendong	0	0	0
41	Kop. Lainnya	2	1	3
42	KJKS/KSPPS	36	6	42
43	Koperasi sekunder Kabupaten	2	0	2
Jumlah KOPERASI		351	29	380

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, 2021

Tabel 3. 49 Jumlah UMKM Kabupaten Kebumen Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Adimulyo	1.973
2	Ambal	1.113
3	Ayah	885
4	Buayan	14
5	Buluspesantren	3.371
6	Gombang	4.478
7	Karanganyar	767
8	Kebumen	7.612
9	Klirong	3.942
10	Kutowinangun	1.089
11	Kuwarasan	1.205
12	Mirit	1.169
13	Padureso	457
14	Petanahan	1.452
15	Poncowarno	1.041
16	Prebun	1.106
17	Puring	1.972
18	Rowokele	1.436
19	Sempor	1.505
20	Sruweng	1.766
21	Bonorowo	878
22	Pejagoan	857
23	Karangsambung	1.338
24	Alian	3.504
25	Sadang	667
26	Karanggayam	503
	Total	46.100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, 2021

11. Urusan Penanaman Modal

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 2) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- 4) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 50 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
18	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		A	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN	dok	2	2	100	
				1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dok	2	2	100	
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dok	1	1	100	
			sda	b	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Keg	1	1	100	
				2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi	Dok	2	2	100	
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM yang disusun	Dok	1	1	100	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
			sda	b	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang disusun	Peta	1	1	100	
				B	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan, persentase usaha perdagangan berizin	dok	2	2	100	
				1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non perizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	Keg	2	2	100	
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dok	1	1	100	
			sda	b	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan	Dok	1	1	100	
			sda	c	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Keg	1	1	100	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6			7	8	9	10	11	12
			sda	d	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Keg	1	1	100		
				C	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN	Keg	2	2	100		
				1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keg	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Keg	1	1	100		
			sda	b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Keg	1	1	100		
			sda	c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Keg	1	1	100		
				D	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMA/PMDN	dok	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6			7	8	9	10	11	12
				1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Dok	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Dok	2	2	100		

b. Permasalahan

1. Proses Penerbitan Rekomendasi

Dalam proses tahapan penerbitan izin perlu dilakukan pemenuhan persyaratan dan validasi, kelengkapan yang sering tidak segera dipenuhi oleh pemohon.

2. Permasalahan pengadaan lahan

Pengadaan lahan yang dibutuhkan oleh masing-masing investor dengan kriteria yang dibutuhkan berbeda beda, dikarenakan terkendala terbatasnya informasi ketersediaan lahan sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi pengadaan lahan.

3. Permasalahan regulasi atau kebijakan

Realisasi investasi dapat berjalan lancar bila adanya kepastian regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Regulasi atau kebijakan investasi di Indonesia banyak yang tumpang tindih, atau selalu berubah-ubah, sehingga membuat ketidakpastian bagi investor.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

1. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)

Online Single Submission/OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan usaha. Sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia termasuk UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Semua perizinan untuk usaha mikro dan kecil gratis tanpa ada pungutan biaya apapun.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Kabupaten Kebumen mendirikan Mal Pelayanan Publik dengan tujuan untuk memperpendek proses pelayanan perizinan agar lebih cepat, mudah, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum masyarakat dan investor.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Penanaman modal, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan

penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Capaian indicator kinerja urusan penanaman modal sebanyak 3 Indikator yang seluruhnya telah mencapai target tahunan yang tetapkan di dalam RPJMD 2016-2021, dengan 2 indikator kinerja yang melampaui target RPJMD 2016-2021. Secara lengkap capaian kinerja Urusan Penanaman Modal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 51 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Nilai investasi PMA/PMDN	Rp. Miliar	388.644.285.520	392.000.000.000	488.529.005.110	124,63%	405.729.000.000
2. Nilai Survey (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	Nilai rata-rata tertimbang	82,85	82,25	89,49/A	108,80%	82,50/ A
3. Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	Izin	1502	2413	2415	100,082%	2413

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2021

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP OSS”) yang mana sekarang perizinan penanaman modal umumnya diselenggarakan berdasarkan sistem Online Single Submission (“OSS”). Akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 OSS tidak mengatur ketentuan investasi dan permodalan. Target nilai investasi PMA/PMDN tahun 2021 adalah Rp.392.000.000.000 dengan Realisasi Rp. 488.529.005.110, hal ini menggambarkan Investasi di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan.

Kinerja pelayanan publik merupakan salah satu cermin kinerja birokrasi secara umum. Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Fungsi utama Pemerintah Daerah adalah melayani masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintah yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal

yang penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat, memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat.

Atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial dapat segera diproses, ditindaklanjuti dan diselesaikan. Sehingga dengan kecepatan dalam penanganan keluhan tersebut, dapat ditangani dengan baik untuk memberikan dampak positif terhadap Pemerintah Daerah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara.

Berbagai upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan oleh Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara dalam memberikan pelayanan prima (*excellent service*) kepada masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah mengukur kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik melalui SKM.

Dalam rangka memperoleh Indeks Pelayanan Publik Daerah dengan memperhatikan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara yang beragam, maka dalam melaksanakan SKM diperlukan metode survei yang sama.

Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan persyaratan; system, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; tariff / biaya; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Survei dilakukan secara online melalui web skm.kebumenkab.go.id setelah selesai mengurus perizinan yang diajukan, pemohon yang datang mengajukan perizinan secara langsung di DPMPTSP mengisi SKM di ajungan yang sudah disediakan dalam pengambilan data atau responden berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang

didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan secara prima dapat segera dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

12. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
- 3) Program Pengembangan Kepramukaan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 52 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
19	Kepemudaan dan Olahraga	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		A PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan skala regional dan nasional(%)	Orang	120	422	352		
				1 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Kebumen (kegiatan)	Keg	7	7	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya keg Upacara HSP, Pengiriman peserta HSP, Seleksi TUB BB, Kabupatn/Provinsi, Seleksi Paskibraka, Seleksi dan Pengiriman JPI, Pelatihan TUB BB, Pengiriman Peserta KWP dan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan KWP (Pertukangan) (kegiatan)	Keg	7	7	100		\
				B PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Terfasilitasinya pengembangan kapasitas kepramukaan (persen)	%	12	12	100		
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Presentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan (persen)	%	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	1. Pesta Siaga Tk.Kab, 2. Pesta Siaga Tk.Kedu, 3.Persari Siaga Tk.Jateng, 4.LT III Tk.Kab, 5.Kursus Pengelola Adm,6.Hari Pramuka,7.LCTP, 8.KML, 9.Dianpinru, 10.Gelar Ketrampilan,11. Uji Pramuka Garuda,12.PWD Tk.Jateng (kegiatan)	Keg	12	12	100		
				C PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi Olahraga (persen)	%	64,10	65,38	102		
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga (kegiatan)	Keg	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembangunan GOR Panjer dan Pemeliharaan/Perawatan GOR/Stadion; Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasaran Olahraga Kepada kelompok masyarakat/ karangtaruna (kegiatan)	Keg	2	2	100		
				2 Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten (kegiatan)	Keg	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	terselenggaranya POPDA SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA tingkat kabupaten kebumen, tingkat karesidenan kedu dan pengiriman atlet ke Tk Provinsi Jawa Tengah (kegiatan)	Keg	4	4	100		
				3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pemusatan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) dan Gerak Jalan 28 K serta Pemberian Penghargaan bagi atlet yang berdedikasi dan berprestasi serta Upacara HAORNAS (kegiatan)	Keg	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terselenggaranya Pemusatan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) (kegiatan)	Keg	2	2	100		
			sda	b Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada atlet berprestasi Tk Provinsi (kegiatan)	Keg	49	0	0	Refocusing Anggaran karena perkiraan event olahraga ditiadakan akibat pandemi	Dianggarkan ditahun 2022 sebesar Rp.159.000.000,- dengan total pagu sub kegiatan Rp.227.567.000,-
				4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	Keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					(organisasi)						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi belanja Hibah Kepada KONI (organisasi)	Organisasi	1	1	100		

b. Permasalahan

Adanya Pandemi Covid-19 sehingga Event Olah raga yang dilaksanakan tingkat Provinsi dikurangi jumlah Cabang Olahraganya.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara optimalisasi fasilitasi bagi pemuda untuk tetap berperan aktif dalam kegiatan skala regional dan nasional dengan protokol kesehatan dan optimalisasi pembinaan pengurus cabang olahraga serta meningkatkan nilai tali asih bagi kesejahteraan pelaku olahraga yang beprestasi.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kepemudaan dapat diketahui rata-rata capaian kiner program adalah 184,55% atau kategori hasil sangat tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehinggat tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 184,55 atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan kepemudaan dan olahraga melalui pelaksanaan program diatas adalah Capaian Prestasi Pemuda dan olahraga, yang mencapai target, bahkan melebihi target RPJMD, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 53 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga	%	23,50	65,38	62.84	94,83	65,38

Pada indikator sasaran ini mencapai target sebesar 62,84% dari yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 65,38% atau dengan capaian kinerja sebesar 94,83%, Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 ada peningkatan sebesar 71,33% untuk capaian prestasi pemuda dan olahraga. Adapun rumus perhitungannya adalah Capaian Prestasi Cabang Olahraga ditambah Capaian Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional dibagi dua.. Berikut data capaian prestasi pemuda dan olahraga tahun 2015-2021

Tabel 3. 54 Jumlah Perhitungan Capaian Realisasi

Tahun	Capaian Prestasi Cabang Olahraga		Capaian keikutsertaan Pemuda dalam skala Regional dan Nasional	
	Jumlah Cabang Olahraga yang mendapatkan kejuaraaan	Jumlah cabang olahraga yang mewakili Kabupaten	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Jumlah rencana kegiatan Kepemudaan skala regional dan nasional
2015	14	39	250	6
2016	19	40	350	7
2017	20	40	400	8
2018	20	40	586	8
2019	35	19	1210	9
2020	0	0	188	4
2021	16	24	422	7

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, 2021

13. Urusan Statistik

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Statistik dilaksanakan melalui Program Prioritas Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 55 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Statistik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	A PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Tersedianya Dokumen Data Statistik Sektoral	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan data statistik sektoral Kabupaten Kebumen	%	100	100	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral yang dikoordinasi dan disinkronisasi	paket	1	1	100		

b. Permasalahan

Kurangnya pemahaman SDM pengelola statistik tentang prinsip satu data Indonesia sehingga data yang dihasilkan belum memenuhi prinsip satu data tersebut.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan maupun *coaching clinic* terhadap pengelola statistic.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Statistik dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah. Pengembangan data statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor/urusan sehingga memudahkan dalam analisis perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Capaian kinerja urusan statistik selama periode 2021 antara lain tersusunnya Buku Daerah Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto, Buku Profil Daerah, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan dan Buku Studi Nilai Tukar Petani. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik, melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah, seperti SIM Pengentasan Kemiskinan, Sistem Informasi Profil Daerah, SIM Keuangan Daerah, SIM Perencanaan, SIM Pengendalian, SIM Pelaporan, SIMBADA, dan lain-lain. Hal lainnya adalah mampu mewujudkan kemudahan mengakses data statistik melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah yang terintegrasi melalui aplikasi Data Analisis Pembangunan Daerah (SIPD).

Tabel 3. 56 Kinerja Urusan statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

No	Indikator	2019	2020
1.	Jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan	6	6
2.	Kebumen Dalam Angka	ada	ada
3.	PDRB Kabupaten	ada	ada
4.	Profil Daerah (SIPD)	ada	ada
5.	Studi Ketimpangan Pendapatan	ada	ada
6.	Studi Nilai Tukar Petani	ada	Ada
7.	Statisik Sektoral Kab. Kebumen	ada	Ada

Sumber: Diskominfo dan BAPPEDA Kabupaten Kebumen, 2021

14. Urusan Persandian

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Persandian dilaksanakan melalui Program Prioritas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 57 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		A PPROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Capaian Layanan Keamanan Informasi	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang Dilaksanakan	bulan	12	12	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Disediakan	paket	1	1	100		

b. Permasalahan

Kurangnya kesadaran terhadap Keamanan Informasi.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Sosialisasi Keamanan Informasi.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Persandian dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan urusan persandian dilaksanakan untuk mencapai sasaran Penyusunan kebijakan keamanan informasi, Literasi keamanan informasi, Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), Pengujian keamanan sistem elektronik dan Penerbitan sertifikat elektronik. Urusan Persandian dilaksanakan guna mendukung peningkatan keamanan data/informasi dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Dengan adanya kegiatan persandian dan keamanan informasi diharapkan segala bentuk data/informasi dapat terjaga kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi.

Capaian kinerja urusan persandian selama periode 2021 antara lain terlaksananya penerbitan sertifikat elektronik untuk seluruh Kepala OPD dan 86 Kepala Desa serta implementasi tanda tangan elektronik pada Tata Naskah Dinas Elektronik dalam aplikasi e letter.

15. Urusan Kebudayaan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan; dan
- 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 58 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Kebudayaan	Dinas Pendidikan		A PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase fasilitasi pengelolaan keragaman budaya	%	69,23	70	101,11		
				1 Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pemeliharaan dan pengelolaan Kampung Jawa Kebumen	Paket	1	1	100		
					Jumlah Pentas selapanan Kampung Jawa Kebumen	Kali	2	2	100		
			sda	b Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi warga Penghayat Kepercayaan	Orang	50	50	100		
					Jumlah paket pembinaan sumber daya, lembaga dan pranata tradisioanl	Orang	50	50	100		
					Jumlah Sosialisasi tentang Pemajuan Kebudayaan	Orang	50	50	100		
				2 Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah alat kesenian Campursari	Paket	1	1	100		
					Jumlah alat kesenian Gamelan	Paket	1	1	100		
					Jumlah alat kesenian Hadroh	Paket	7	7	100		
					Jumlah alat kesenian Jamjaneng	Paket	3	3	100		
					Jumlah alat kesenian Kuda lumping	Paket	7	7	100		
					Jumlah alat kesenian Lengger lanang	Paket	1	1	100		
					Jumlah alat kesenian Ndolalak	Paket	1	1	100		
					Jumlah alat kesenian Rebana	Paket	90	90	100		
					Jumlah cagar budaya yang di alih mediakan	Obyek	10	10	100		
					Jumlah Festival Karawitan	Kelompok	13	13	100		
					Jumlah Festival Tari Dolanan Anak	Kelompok	13	13	100		
					Jumlah kajian pengusulan warisan budaya	Obyek	13	13	100		
					Jumlah Parade Seni dalam rangka Hari Jadi Kebumen	Paket	1	1	100		
					Jumlah sekolah penyelenggara Gerakan Seni Masuk Sekolah (GSMS)	Sekolah	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Seragam Kesenian	Paket	1	1	100		
			sda	b Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah peserta kegiatan dialog seniman dan pelaku seni	Orang	75	75	100		
				B PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Banyaknya fasilitasi pengelolaan keragaman budaya	Kali	3	3	100		
				1 Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah peserta bimtek juru kunci	Orang	50	50	100		
			sda	b Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang di alih mediakan Jumlah kajian pengusulan warisan budaya	Obyek	10	10	100		
					Jumlah kajian pengusulan warisan budaya	Obyek	1	1	100		

b. Permasalahan

Dalam melaksanakan Program, kegiatan maupun sub kegiatan, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan, sehingga capaian kinerja Program, Kegiatan maupun sub Kegiatan dapat tercapai secara maksimal.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

-

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan data diatas, rata-rata capaian program adalah 100,56% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100,56% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Di wilayah Kabupaten Kebumen banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Sebagian benda tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah yang ada hingga tahun 2021 sebanyak 91 buah (sama dengan tahun 2020) dibandingkan tahun 2019 hanya 82 buah. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan, khususnya yang merupakan kesenian dan kebudayaan asli Kebumen, adalah dengan menyelenggarakan festival seni dan budaya serta pelestarian benda, situs dan kawasan Cagar Budaya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya selain memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda, juga untuk melestarikan seni dan budaya asli Kebumen.

Tabel 3.59

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

NO.	URAIAN KINERJA	2020	2021
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	3
2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	91	91
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0	14
4.	Jumlah grup kesenian	442	469
a	Kuda lumping	202	202
b	Ketoprak	24	24
c	Wayang Kulit	34	34
d	Campursari	10	10
e	Angguk	7	7
f	Rebana	72	72
g	Karawitan	24	24

h	Jamjaneng	24	24
i	Calung	13	13
j	Lengger	9	9
k	Seni Peran	5	5
l	Sanggar Seni	15	15
m	Cepetan	2	2
n	Angklung	2	2
o	Teater	6	6

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kebumen, 2021

Capaian kinerja urusan kebudayaan menunjukkan bahwa secara umum kinerja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dengan penyesuaian pelaksanaan kegiatan utamanya yang berupa festival dan kegiatan dalam bentuk fisik dilaksanakan mengikuti protap pencegahan Covid 19.

16. Urusan Perpustakaan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan; dan
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 59 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Perpustakaan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		A PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa.	%	15	15	100	-	-
				1 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah koleksi bahan pustaka buku dan CD di Kabupaten.	%	17,81	17,81	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas	a Sub Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik.	kegiatan	1	1	100	-	-
			Sda	b Sub Kegiatan Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah yang terakreditasi.	unit	5	5	100	-	-
					Jumlah perpustakaan yang pengelolaannya sesuai standar	unit	5	5	100	-	-
			Sda	c Sub kegiatan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM perpustakaan binaan yang meningkat kapasitas/kompetensinya.	orang	100	100	100	-	-
					Jumlah SDM perpustakaan daerah yang meningkat kapasitas kompetensinya.	orang	4	4	100	-	-
			Sda	d Sub kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah buletin perpustakaan	paket	1	1	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah koleksi bahan pustaka	paket	2	2	100	-	-
				2 Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah pengunjung ke perpustakaan	%	100	100	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas	a Sub Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat.	Jumlah layanan mobil perpustakaan bergerak generasi terkini (Lamphorgini)	kali	40	40	100	-	-
					Jumlah pelayanan perpustakaan keliling dan motor pintar	kali	100	100	100	-	-
					Jumlah penjemputan anak sekolah terpencil dan kelompok disabilitas	kali	10	10	100	-	-
					Jumlah story telling	kali	10	10	100	-	-
			Sda	b Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan GPMB	kegiatan	8	8	100		
					Jumlah lomba-lomba literasi perpustakaan	kegiatan	8	8	100		
					Jumlah fasilitasi komunitas di Disarpus	kegiatan	80	80	100		
				B PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	%	20	20	100	-	-
				1 Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah naskah kuno yang terdaftar di perpustakaan	%	100	100	100	-	-
			Peningkatan Tata	a Sub Kegiatan	Jumlah	kegiatan		2	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno.	seminar/sosialisasi terkait pendaftaran naskah kuno.		2				

b. Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian target program dan kegiatan yaitu adanya rasionalisasi anggaran, sehingga terjadi penurunan target dari perencanaan awal. Penutupan layanan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sejak awal Tahun 2020 hingga Bulan Agustus 2021 karena adanya Pandemi Covid-19. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan Kabupaten.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yaitu dengan layanan perpustakaan online melalui aplikasi iKebumen, serta melakukan seminar dan lomba-lomba secara daring.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perpustakaan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Capaian kinerja kegiatan rata-rata adalah 100%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan adanya beberapa penghargaan yang diterima oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagai berikut pada Tahun 2021 :

- 1) Juara III Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Juara III Lomba Perpustakaan Sekolah SLTA/MA/SMK Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Juara 5 Lomba Bercerita bagi Siswa SD/MI Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan perpustakaan secara umum ditunjukkan dengan satu indikator yaitu capaian kunjungan perpustakaan. Persentase kunjungan ditargetkan 19,27 % dan terealisasi 29,33 % atau telah tercapai bahkan melebihi target yang direncanakan. Secara lengkap capaian kinerja Urusan perpustakaan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 60 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Capaian kunjungan perpustakaan	%	59.073	19,27	29,33	152,20	19,27

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2021

Cara menghitung capaian kunjungan perpustakaan adalah (Jumlah kunjungan perpustakaan / Jumlah populasi yang harus dilayani) x 100 %. Semakin tinggi jumlah kunjungan menggambarkan semakin meningkatkan minat baca masyarakat. Pada Tahun 2021 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 286.211 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan dari jumlah kunjungan tahun 2020 sebesar 59.073 orang atau kenaikannya sebesar 284%.

Secara rinci perkembangan capaian kinerja urusan perpustakaan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 61 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

NO	URAIAN	TAHUN	
		2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan (unit)	988	993
2	Jumlah Kunjungan Perpustakaan (Orang)	59073	286211
3	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (Buku)	44736	45844
4	Prosentase Pengunjung Perpustakaan %	6,06	29,33

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2021

17. Urusan Kearsipan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan ini dilaksanakan melalui program prioritas yaitu Program Program Pengelolaan Arsip. Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 62 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Kearsipan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		A PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku.	%	68,95	68,95	100	-	-
				1 Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip dinamis Kabupaten Kebumen	%	100	100	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah pelaksanaan pengawalan kearsipan internal OPD	OPD	30	30	100	-	-
					Jumlah pembinaan arsip desa	desa	10	10	100	-	-
					Jumlah pendampingan pengelolaan arsip PD	OPD	6	6	100	-	-
					Jumlah rapat koordinasi petugas arsip OPD	kali	6	6	100	-	-
					Jumlah SDM pendukung pengelola arsip	orang	4	4	100	-	-
			Sda	b Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen arsip dinamis in aktif yang diolah di depo arsip	dokumen	2.000	2.000	100	-	-
					Jumlah penyelenggaraan bimbingan teknis penyusutan arsip dinamis	kegiatan	1	1	100	-	-
					Jumlah SDM pendukung pengelola arsip LKD	orang	5	5	100	-	-
				2 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah arsip atau dokumen yang dilestarikan atau diselamatkan	inventaris arsip	2	2	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah dokumen arsip statis menjadi inventaris arsip	dokumen	2	2	100	-	-
					Jumlah kegiatan fumigasi arsip di Depo Arsip	kali	1	1	100	-	-
					Jumlah OPD yang melakukan akuisisi arsip	OPD	1	1	100	-	-
					Jumlah pengadaan paket sarana preservasi arsip	paket	1	1	100	-	-
				3 Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya layanan informasi arsip melalui JIKN	%	20	20	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah film dokumenter yang dibuat	buah	1	1	100	-	-
					Jumlah informasi arsip statis melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	dokumen	24	24	100	-	-
					Jumlah paket pengadaan sarana layanan informasi arsip	paket	1	1	100	-	-
					Jumlah SDM pendukung pengelola arsip	orang	2	2	100	-	-

b. Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yaitu adanya rasionalisasi anggaran, sehingga mengurangi target kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan seperti pembinaan pengelolaan arsip OPD dan Desa, karena adanya pembatasan mobilitas serta kegiatan yang mengumpulkan masa.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dengan mengoptimalkan layanan konsultasi dan pendampingan pengelolaan arsip bagi OPD dan Desa melalui media berbasis online (aplikasi zoom dan Whatsapp)

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kearsipan dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku dan Prosentase peningkatan layanan informasi arsip.

Tabel 3. 63 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASAI	CAPAIAN	
Persentase jumlah Perangkat Daerah menerapkan arsip baku	%	64,55	49,43	68,95	136,82	49,43

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2021

Capaian kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2020-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, persentase unit kerja yang telah menerapkan arsip baku hanya 64,55 % atau 337 unit kerja, Namun pada tahun 2021, unit kerja yang telah menerapkan arsip baku telah mencapai 353 unit kerja atau 68,95 %. Dari target yang telah

direncanakan, Urusan Kearsipan telah tercapai 136,82 % atau melebihi target yang telah direncanakan.

Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk terwujudnya unit kerja yang menerapkan arsip secara baku yaitu melalui pelatihan aplikasi pengelolaan arsip secara otomatis kepada para pengelola arsip di OPD. Selain itu, untuk mengembangkan serta meningkatkan kapasitas pengelola kearsipan di desa juga telah dilakukan sosialisasi penyuluhan dan pendampingan kearsipan kepada Sekretaris Desa. Hal ini bertujuan agar arsip di desa tertata dengan baik, sehingga memudahkan perangkat desa untuk mencarinya dan membantu dalam pengambilan kebijakan. Adapun capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 64 Perkembangan Penerapan Arsip Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

URAIAN	2020	2021
1. Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	337	353
2. Jumlah OPD	522	512
3. Presentase OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	64,55%	68,95%

Sumber : Disarpus Kab. Kebumen 2021

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan adanya penghargaan yang diterima oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagai berikut pada tahun 2021 yaitu Penghargaan Nasional Kategori “Sangat Memuaskan” Sebagai Peringkat I Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen tahun 2021 meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; dan
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 65 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		A PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi ikan tangkap	Ton	9.026	9647	106,9	Adanya produksi ubur-ubur yang melimpah	
				1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai , Danau Waduk,Rawa dan Genangan Qir lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Keg	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah pembangunan sarana operasional & penunjang TPI	Paket	1	1	100		
			Sda	b Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah BBM Operasional Pengawasan / TPKL	lt	3.000	3.000	100		
					Jumlah pengadaan alat tangkap ikan ramah lingkungan (DAK)	Paket	4	4	100		
					Jumlah pengadaan bantuan alat bantu penangkapan	Paket	1	1	100		
					Jumlah pengadaan kapal uk. < 5 GT (DAK)	Paket	1	1	100		
					Jumlah pengadaan mesin motor tempel	unit	9	9	100		
					Jumlah pengadaan perahu dan alat tangkap ikan untuk nelayan	Paket	5	5	100		
					Jumlah Pengadaan Perahu Uk. < 3 GT	unit	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah penyediaan alat keselamatan operasional pengawasan/TPKL	Paket	1	1	100		
				2 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas serta fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Keg	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah KUB yang dimonev	kelompok	10	10	100		
					Jumlah KUB Yang Terbina	kelompok	30	30	100		
					Jumlah nelayan yang dilatih	orang	100	100	100		
			sda	b Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan premi asuransi	orang	375	375	100		
				3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	keg	1	1	100		
			Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang mendapatkan pemeliharaan fasilitas pokok dan penunjang	lokasi	5	5 lokasi	100		
					Jumlah TPI yang mendapatkan sarana operasional	lokasi	8	8 lokasi	100		
				4 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Pwerikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai , Danau, Waduk Rawaa dan Genangan Air lainnya yang dapat	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas serta fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	keg	1	1 kegiatan	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							
			Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Pelayanan Fasilitas Pelayanan usaha Perikanan Tangkap	bulan	12	12 bulan	100		
				B PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi ikan budidaya	Ton	3.030	3220,87	106,3	Munculnya kelompok-kelompok baru sehingga produksi bertambah	
					Tersedianya Benih Dengan Mutu Terjamin	Juta ekor	36,23	37,19	102,65	Adanya bantuan induk ikan, sehingga produksi dari UPR meningkat	
				1 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	keg	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan	orang	40	40	100		
					Jumlah pokdakan yang di dapatkan pembinaan	kelompok	70	70	100		
					Jumlah pokdakan yang mendapatkan pemantauan	kelompok	20	20	100		
				2 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDIPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pelayanan Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya	bulan	12	12	100		
				3 Pengelolaan Pembudayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Usaha serta Fasilitas Penyediaan Perbenihan dalam Rangka Budidaya Perikanan	keg	5	5	100		
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	a Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Individu yang mendapatkan Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	orang	147	116	78,91	Refocusing Anggaran	Diajukan kembali di tahun 2022 dalam bentuk hibah kepada kelompok pembudidayaan ikan
					Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	kelompok	50	43	86	Refocusing Anggaran	Diupayak an kembali di tahun 2022 tetapi hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan karena keterbatasan anggaran
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	b Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan lan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Sarpras Operasional BBI Pringtutul	keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Terfasilitasinya sarpras operasional BBI Pringtutul, pasar ikan dan tambak dinas	keg	1	1	100		
			sda	c Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pokdakan dan UPR yang terfasilitasi	kelompok	50	72	144		
			sda	d Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah penerima bantuan hibah sarpras dempond budidaya ikan	kelompok	4	4	100		
					Jumlah pokdakan yang dipantau di Kabupaten Kebumen	kelompok	38	38	100		
			sda	e Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah penerima dempond budidaya ikan	kelompok	6	6	100		
					Jumlah penerima pembangunan/rehabilitasi sarpras unit pembenihan rakyat	kelompok	2	2	100		
					Jumlah penerima sarpras budidaya udang	kelompok	3	3	100		
					Rehabilitasi gedung dan fasilitas fungsional lainnya di BBI Pringtutul	gedung	1	1	100		
				C PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Jumlah Pokwasmas	kelompok	30	33	110		
				1 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai, Danau , waduk , Rawa dan Genangan air	Jumlah kegiatan pelestarian sumber daya ikan	keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penebaran ikan di PUD	lokasi	1	1	100		
					Jumlah pengadaan kumbang ikan	Paket	1	1	100		
				D PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan angka konsumsi makan ikan	%	23,58	24,54	104,1		
				1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Pengolahan Dan Pemasaran	keg	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu	kelompok	10	10	100		
				2 Penyediaan daan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan daalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ota	Jumlah kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan serta fasilitasi usaha perikanan	Keg	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Bantuan Sosial berupa Pemberian Ikan bagi RTM	RTM	1.500	1.500	100		
			sda	b Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Gemarikan dan Promosi Produk Perikanan	Keg	1	1	100		
			sda	c Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Fasilitas Peralatan Pengolahan Ikan dan Sarpras Usaha Garam Rakyat	kelompok	31	31	100		

b. Permasalahan

Permasalahan sektor perikanan budidaya yang dialami adalah rendahnya kemampuan pembudidaya ikan untuk mengembangkan usaha budidaya ikan. Keterbatasan ini mencakup permodalan usaha yang terbatas dan pengetahuan teknis yang kurang memadai. Hal ini tentu membutuhkan uluran tangan dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, Pada tahun 2021 telah dilakukan upaya pengalokasian bantuan bagi para pembudidaya ikan, baik untuk sarana dan prasarana pengembangan budidaya ikan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui diklat teknis budidaya ikan. Namun seiring berjalannya waktu, pandemic covid-19 datang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia, sehingga anggaran pemerintah dialihkan untuk penanganan penyakit ini.

c. Upaya Mengatasi Masalah

Guna mengatasi permasalahan berkurangnya anggaran pemerintah daerah dikarenakan untuk penanganan pandemic covid-19 tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran kembali pada tahun 2022 bagi para pelaku pembudidaya ikan (Pokdakan) yang dibatalkan tahun 2021. Dengan demikian diharapkan para pembudidaya ikan dapat mengatasi permasalahan ditengah pandemic covid-19.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kelautan, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 106,81% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 106,81% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Terdapat 4 indikator Capaian kinerja Urusan kelautan dan perikanan pada RPJMD Tahun 2015-2021, akan tetapi 1 indikator sejak tahun 2016 berperpindahan kewenangan dari daerah ke propinsi). Hal ini berdasarkan ketentuan peraturan tentang Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah Undanf-undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun capaian kinerja urusan kelautan sesuai dengan perjanjian kinerja adalah :

Tabel 3. 66 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021			T.AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Peningkatan produksi benih ikan	Juta Ekor	36,82	36,23	37,19	102,65	36,23
2	Peningkatan Produksi ikan	ton	12.207,85	12.055,59	12.867,53	106,73	12.055,59
	- Perikanan Tangkap	ton	9.068,53	9.025,59	9.646,66	106,88	9.025,59
	- Perikanan Budidaya	Ton	3.139,32	3.030	3.220,87	106,30	3.030
3	Peningkatan produksi hasil olahan ikan	Ton	288,07	316,80	452,17	142,73	316,80
4	Angka Konsumsi Makan Ikan	Kg/ka/ta	22,46	23,58	24,54	104,07	23,58
5	Peningkatan Produksi Garam	Ton	144,62	138	155,95	107,83	138

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, 2021

2. Urusan Pariwisata

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pemasaran Pariwisata;
- 2) Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; dan
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 67 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pariwisata	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		A PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Bertambahnya fasilitas sarana,/prasarana obyek wisata (obwis)	Obwis	9	9	100		
				1 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (kegiatan)	Keg	4	4	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (kegiatan)	Keg	4	4	100		
				2 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (persen)	%	100	100	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyusunan DED Revitalisasi Obwis Goa Jatijajar Penyusunan DED Revitalisasi Obwis Pantai Karangbolong Penyusunan DED Revitalisasi Obwis Pantai Logending Penyusunan DED Revitalisasi Obwis Pantai Suwuk Penyusunan Laporan Dokumen Lingkungan Obyek Wisata Penyusunan Redesign DED Rehab Locket Obwis Waduk Sempor, Revitalisasi Kamar Mandi PAP Krakal (paket)	Paket	6	6	100		
			sda	b Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Gapura/ Gerbang Obwis Pantai Suwuk (paket)	Paket	1	0	0	Rasionalisasi anggaran	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	c Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Belanja Sewa Alat Berat Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaLainnya (Fasilitas Sarpras Obyek Wisata) Rehabilitasi Locket Masuk Obyek Wisata Waduk Sempor Revitalisasi Kamar Mandi Obyek Wisata PAP Krakal Revitalisasi Obyek Wisata Goa Jatijajar Revitalisasi Obyek Wisata Pantai Logending (paket)	Paket	6	2	33,33	Rasionalisasi anggaran : Rehabilitasi loket masuk obyek wisata waduk sempor, revitalisasi kamar mandi obyek wisata PAP Krcal, Revitalisasi obyek wisata goa jatijajar , Revitalisasi obyek wisata pantai logending (paket)	Memaksimalkan anggaran yang ada
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	d Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah intensifikasi dan ekstensifikasi obyek wisata (bulan)	Bulan	12	12	100		
					Jumlah tahun Operasional Badan Pengelola Geopark (tahun)	Tahun	1	1	100		
					Jumlah Tenaga Buruh Tak Terlatih untuk mendukung kegiatan di Kantor, obyek wisata dan GOR/ Stadion/ Sanggar Pramuka (orang)	Orang	91	89	97,8	Ada 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL) resign	Silpa anggaran di kembalikannya ke kas daerah
				3 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota (kegiatan)	Keg	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	sosialisasi bidang daya tarik desa (desa wisata), sosialisasi bidang usaha jasa makanan dan minuman, sosialisasi bidang usaha akomodasi pariwisata, sosialisasi bidang usaha kegiatan hiburan dan rekreasi (kegiatan)	Keg	4	4	100	Pelaksanaan tidak sesuai dengan anggaran kas karena adanya aturan PPKM	Tetap dilaksanakan pada saat ada kelonggaran PPKM dengan protokol kesehatan
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	b Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	sosialisasi / pembinaan pelaku usaha DTW (obyek wisata) kabupaten dan perjanjian pedagang obyek wisata (kegiatan)	Keg	1	1	100		
				B PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (persen)	Orang	19,69	13,18	66,9	Masih pandemi covid 19	Optimalisasi pemasaran pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan kunjungan
				1 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara (orang)	Orang	3.006.422	966.941	32,2	Masih pandemi covid 19	Optimalisasi pemasaran pariwisata dengan tetap menerapkan protokol

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											kesehatan dan pembatasan kunjungan
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (persen)	%	100	100	100		
			sda	b Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Promosi Pariwisata Kabupaten Kebumen, Media Promosi di Luar Kabupaten Kebumen	Keg	3	3	100		
			sda	c Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Obyek Bagi Hasil Retribusi Kepada Perhutani P. Logending dan Bagi hasil Retribusi Kepada KPIPW Serayu Bogowonto Sempor	Obwis	2	2	100		
				C PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Terfasilitasinya program pengembangan pariwisata dan kebudayaan (kegiatan)	Keg	1	1	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (kegiatan)	Keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi dan Ekonomi Kreatif (kegiatan)	Keg	1	1	100		

b. Permasalahan

- 1) Secara umum adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- 2) Masih adanya Pandemi covid- 19 sehingga Pemerintah melaksanakan pembatasan kunjungan wisatawan atau aktifitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Melaksanakan event promosi wisata dengan Hybrid dan off air dan promosi lewat media sosial ,Virtual serta penerapan Protokol Kesehatan dalam pelayanan penerimaan kunjungan wisatawan

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pariwisata dapat diketahui rata-rata capaian program adalah 88,98% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 86,43%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 102,95% atau kategori sangat tinggi

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan pariwisata ditunjukkan dengan satu indikator yaitu Persentase Persentase peningkatan kunjungan wisata.

Tabel 3. 68 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATU AN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	% Capaian	
1. Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	854.315	3.006.422	966.941	32,16	1.310.000
2. Lama tinggal wisatawan	Hari	0.32	0,70	0,50	71,43	0,70

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, 2021

Kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan sejak tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, dan kebijakan penutupan obyek wisata yang dikelola pemerintah daerah dan yang dikelola oleh masyarakat.

3. Urusan Pertanian

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pertanian dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
- 5) Program Penyuluhan Pertanian.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 69 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		A PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Produksi Perkebunan;	Juta Rupiah	672,82	338,688	50,338,57		Keterangan : 1) Target diambil dari RPJMD 2016-2021 2) Perhitungan realisasi: 2.646.000 btg kelapa butir x 64 (produksi kelapa per pohon dlm setahun) x Rp.2000 (harga per butir)
					Produksi Industri Pengolahan Perkebunan;	000 Rupiah	480.530,00	129.004.687,50	26.846,33		Keterangan : 1) Target diambil dari RPJMD 2016-2021 2) Perhitungan realisasi: 2.646.000 btg kelapa butir x 64 (produksi kelapa per pohon dlm setahun) x Rp.2000 (harga per butir)
					Prosentase Peningkatan Produksi Hortikultura;	%	0,50	0,50	100		
					Bertambah nya jumlah produksi bibit sapi;	Paket	500	516	103,2		
					Capaian produksi daging;	Kg	11.102.580	14.739.171	132,75		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Capaian produksi telur;	Kg	3.836.510	3.250.188	84,72	Produksi telur tidak tercapai dikarenakan populasi ayam petelur berkurang, yang disebabkan menurunnya animo peternak untuk memelihara ayam petelur karena pada tahun 2021 terjadi penurunan harga telur.	Membantu membangun jejaring pemasaran telur.
					Jumlah Fasilitasi promosi hasil produksi pertanian dan peternakan	Kali	0	0	0	Refocusing covid 19	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
				1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	3	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Lokasi	2	2	100		
			sda	b	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Orang	150	150	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah peserta pembinaan calon kelompok penangkar benih	Orang	150	150	100		
			sda	c Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	jumlah alat angkut roda 3;	Unit	0	0	0	anggaran difocusing	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
					Jumlah Alat Pengolahan Produk Hortikultura/ Perkebunan (Minyak Atsiri;	Paket	1	1	100		
					Jumlah Bantuan alat mesin pasca panen komoditas hortikultura dan perkebunan lainnya (Peralatan Pengolahan GulaKelapa);	Paket	0	0	0	anggaran difocusing	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
					Jumlah Bibit Tanaman Hortikultura dan Perkebunan untuk diversifikasi;		0	0	0	anggaran difocusing	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
					Jumlah Bibit Tanaman Hortikultura dan Perkebunan untuk diversifikasi (kuota kecamatan);		0	0	0	anggaran difocusing	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
					Jumlah Bibit Tanaman Hortikultura dan Perkebunan untuk diversifikasi (POKIR);	Batang	2.660	2.660	100		
					Jumlah bibit tanaman hortikultura untuk sentra tanaman;		0	0	0	anggaran difocusing	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
					Jumlah Lokasi Pemeliharaan sentra tanaman hortikultura, buah-buahan dan perkebunan unggulan	Lokasi	8	8	100		
					Jumlah pameran dan promosi hasil produksi pertanian dan perkebunan yang diikuti;	Kali	0	0	0	anggaran difocusing	Diusulkan kembali di tahun berikutnya

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Peralatan Pascapanen Karet,	Unit	0	0	0	anggaran direfocusing	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
					Jumlah peserta sosialisasi pembinaan hortikultura;	Orang	360	360	100		
					Luas demplot bawang merah dan cabe .	Ha	10	10	100		
				2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kelompok	8	8	100		
					Jumlah timbangan ternak yang terpelihara	Unit	2	2	100		
				3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah kartu ternak yang terimplementasi	Buah	2.000	2.000	100		
				B PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan JITU dan JIDES dalam Kondisi Baik;	%	100	100	100		
					Prosentase Penurunan Angka kehilangan Hasil;	%	10,82	10,125	106,42		
					Jumlah Terpeliharanya sarana pemasaran hasil produksi peternakan;	Kegiatan	2	2	100		
					Capaian produktivitas padi;	Ton/ Ha	6,57	6,74	102,59		
					Capaian produktivitas jagung;	Ton/ Ha	7,48	5,99	80,08	Adanya Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Peningkatan upaya Gerakan Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Peningkatan Kapasitas Petani dengan Sekolah Lapang
					Capaian produksi kedelai.	Ton/ Ha	1,23	1,19	96,75	Adanya Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Peningkatan upaya Gerakan Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Peningkatan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Kapasitas Petani dengan Sekolah Lapang. Pengaturan pola tanam palawija
				1 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan serta koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Kegiatan	6	6	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah kelompok yang dibantu benih padi, pelatihan dan pendampingan	Kelompok	1	1	100		
					Luas Demplot Area Corporate Farming;	Ha	15	15	100		
					Luas Demplot Area Tanaman Jagung	Ha	25	25	100		
					Luas Demplot Area Tanaman Kedelai	Ha	50	50	100		
					Luas Demplot Area Tanaman Padi	Ha	150	150	100		
					Luas Demplot Rintisan Padi Organik	Ha	10	10	100		
			sda	b Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Data Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Jaringan Irigasi;	Dokumen	2	2	100		
					Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);	Kecamatan	26	26	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Pengadaan Cultivator	Unit	26	26	100		
					Jumlah Pengadaan Handsprayer	Unit	102	102	100		
					Jumlah Pengadaan Pompa Air 2 inch	Unit	8	8	100		
					Jumlah Pengadaan Pompa Air 3 inch	Unit	13	13	100		
					Jumlah Pengadaan Pompa Air 4 inch;	Unit	11	11	100		
					Jumlah Pengadaan Pompa Air 6 inch	Unit	12	12	100		
					Jumlah Pengadaan Traktor Roda Dua 6,5 PK	Unit	5	5	100		
					Jumlah Pengadaan Traktor Roda Dua 8,5 PK	Unit	22	22	100		
					Jumlah Pengadaan Traktor Rotary	Unit	4	4	100		
					Jumlah Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Kecamatan yang Mendapatkan Pendampingan.	Kecamatan	13	13	100		
					Jumlah pengadaan APPO (DBHCHT)	Unit	6	6	100		
					Jumlah pengadaan mesin perajang	Unit	10	10	100		
					Jumlah lokasi demplot tembakau	Lokasi	11	11	100		
				2 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian, peternakan dan penyuluhan	Kegiatan	6	6	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Paket	23	23	100		
					Jumlah Pembangunan JIAT	Paket	11	11	100		
			sda	b Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT)	Paket	33	33	100		
			sda	c Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan Dam Parit (DAK);	Unit	2	2	100		
					Jumlah Pembangunan Dam Parit (DAU)		1	1	100		
			sda	d Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Dokumen DED RPH;	Dokumen	1	1	100		
					Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Rumah Potong Hewan (RPH)	Unit	2	2	100		
			sda	e Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah pengadaan alat uji tanah	Unit	10	10	100		
					Jumlah pengadaan Alat Ukur Ubinan Pertanian;	Unit	26	26	100		
					Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan;	Paket	8	8	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah rehabilitasi/penyempurnaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Paket	8	8	100		
			sda	f Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Dokumen DED;	Dokumen	1	1	100		
					Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas;	Paket	1	1	100		
					Jumlah Pembangunan JIAT	Paket	0	0	0		
					Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	Paket	33	32	96,97	Adanya salah satu usulan JIDES yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga tidak dilaksanakan pembangunan.	Menyarankan kepada pemohon atau pengusul agar diajukan proposal yang sesuai dengan petunjuk teknis
				3 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak	Kegiatan	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Bantuan Bibit Ternak Sapi/Kambing dan Perlengkapannya;	Paket	4	4	100		
					Jumlah Kelompok yang dilaksanakan Pembinaan Kelompok Perbibitan dan Budidaya;	Kelompok	29	29	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan	Kelompok	44	44	100		
					Jumlah Kontes Ternak Sapi PO Kebumen;	Paket	0	0	0	Anggaran difocusing	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
					Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Kawin Suntik (IB);	Paket	1	1	100		
					Jumlah Pengamanan Bibit Unggul Ternak Sapi;	Ekor	6	6	100		
					Jumlah Temu Usaha antara Pengusaha dan Peternak Ayam Petelur	Kali	2	2	100		
				C	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
				1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis						
					Jumlah pengadaan obatobatan ternak;	Paket	1	1	100		
					Jumlah workshop kesehatan hewan	Kali	8	8	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Kegiatan	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah pendataan penyakit ternak	Ekor	13,750	13,814	100,47		
					Jumlah sampel feses dan darah ternak dan sampel produk bahan asal hewan yang mendapatkan diagnostik veteriner.	Buah	900	1,04	115,56		
				D PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	%	92,01	92,01	100		
				1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan	Kegiatan	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah lokasi yang melaksanakan BIMTEK PHT	Kali	10	10	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah pengadaan bahan pengendalian/perlindungan tanaman pangan	Paket	1	1	100		
					Jumlah pengadaan stok pestisida tanaman perkebunan	Paket	1	1	100		
					Jumlah petani peserta SLPHT	Orang	100	100	100		
				E PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah kelompok tani yang bankable; Prosentase Penurunan Angka Kehilangan Hasil.	%	12	12	100		
					Prosentase Penurunan Angka Kehilangan Hasil.	%	10,82	10.125	106,42		
				1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian	Kegiatan	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan yang tersusun	Dokumen	27	27	100		
					Jumlah kegiatan LAKUSUSI, penyuluhan pertanian swadaya, dan penyegaran tenaga pendamping	Kegiatan	3	3	100		
					Jumlah lokasi yang mendapatkan pendampingan dan penyuluhan pertanian	Kecamatan	26	26	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	b Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah alsintan pasca panen power thresher;	Unit	4	4	100		
					Jumlah kegiatan pengelolaan irigasi partisipasi dan terpadu	Kegiatan	10	10	100		
					Jumlah kelompok Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)	Kelompok	50	50	100		
					Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan penilaian kelas kelompok;	Kelompok	1.794	1.794	100		
					Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan peningkatan petani nelayan kecil (P4K)	Kelompok	25	25	100		
					Jumlah kelompok yang mendapatkan peningkatan kualitas lembaga tani	Kelompok	150	150	100		
					Jumlah petani yang menerima pelatihan pembuatan pupuk organik;	Orang	400	400	100		
					Jumlah petani yang mengikuti pembinaan kehilangan hasil pertanian	Orang	560	560	100		
			sda	c Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Pendataan Pertanian	Dokumen	26	26	100		

b. Permasalahan

- 1) Adanya refocusing anggaran;
- 2) Adanya salah satu usulan JIDES yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga tidak dilaksanakan pembangunan.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1)Menganggarkan kembali di tahun berikutnya;
- 2)Menyarankan kepada pemohon atau pengusul agar diajukan proposal yang sesuai dengan petunjuk teknis

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pangan diketahui rata-rata capaian kinerja progrma adalah 90,16% atau kategori tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. rata-rata capaian kegiatan 100%, sehingga analisis kesesuai kegiatan terhadap kinerja program adalah 90,16% atau kategori tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan Pertanian ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 3. 70 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
1. Produktivitas padi	Ton/ Ha	5,77	6,57	6,74	102,59%	6,57
2. Produktivitas jagung	Ton/ Ha	5,99	7,48	5,99	80,08%	7,48
3. Produktivitas kedelai	Ton/ Ha	1,12	1,23	1,19	96,75%	1,23
4. Kenaikan Angka Nilai Tukar Petani (NTP)	%	101,79	103,20	100,37	97,26%	103,20
5. Produksi kelapa	Ton	187.828	190.225,42	203,213	106,83%	190.225,42
6. Produksi tembakau	Ton	438,7	415,35	439,461	105,80%	415,35
7. Produksi daging	Kg	18.897.717	11.102.580	14.739.171	132,75%	11.102.580

8. Produksi Telur	Kg	3.838.154	3.836.510	3.250.188	84,72%	3.836.510

Sumber : DISTAPANG Kab. Kebumen 2021

Terdapat beberapa indikator kinerja urusan daerah yang belum mencapai target, adapun indikator tersebut yaitu capaian produktivitas jagung, dan kedelai. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a) Produktivitas jagung tidak tercapai, karena serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- b) Produktivitas kedelai tidak tercapai, karena Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
- c) Produksi telur tidak tercapai dikarenakan populasi ayam petelur berkurang, yang disebabkan menurunnya animo peternak untuk memelihara ayam petelur karena pada tahun 2021 terjadi penurunan harga telur.

Upaya-upaya dalam peningkatan dan pencapaian target produktivitas Padi, Jagung dan kedelai, yaitu:

- 1) Peningkatan upaya Gerakan Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- 2) Peningkatan Kapasitas Petani dengan Sekolah Lapang.
- 3) Pengaturan pola tanam palawija
- 4) Meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan monitoring secara lebih intensif,
- 5) Budidaya baik sesuai kondisi iklim seperti pemilihan komoditas dan melakukan kegiatan tanam tepat waktu
- 6) Melakukan koordinasi di tingkat lapangan,
- 7) Melakukan pendataan dan pelaporan secara berjenjang,
- 8) Membantu membangun jejaring pemasaran telur.

4. Urusan Perdagangan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 3) Program Pengembangan Ekspor;

- 4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
- 5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 71 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	STATUS	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		A PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Pasar Tradisional Dalam Kondisi Baik, Banyaknya Lokasi PKL dan Asongan Yang Tertata	%	43	43	100		
				1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar Tradisional Dalam Kondisi Baik, Banyaknya Lokasi PKL dan Asongan Yang Tertata	%	9	9	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pasar Pasar Daerah, Lokasi PKL dan Asongan	keg	5	5	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah lokasi terlaksananya kegiatan operasional ,penyediaan peralatan/sarana kebersihan Pasar	keg	4	4	100		
				2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prosentase Pasar Tradisional Dalam Kondisi Baik, Banyaknya Lokasi PKL dan Asongan Yang Tertata	%	34	34	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah Terlaksananya UPTD Pasar; Intensifikasi/Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	keg	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	STATUS	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	b Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terfasilitasinya pembentukan organisasi PKL dan meningkatkan disiplin PKL serta terlaksananya operasional pengelolaan Sistem Resi Gudang dan berfungsinya gudang untuk penyimpanan komoditas (Gabah) oleh masyarakat, petani, poktan dan gapoktan 4 UPTD dan 26 Kecamatan KELUARAN Tersedianya THL dalam kegiatan pemberdayaan PKL dan pengelolaan Sistem Resi Gudang	keg	30	30	100		
				B PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Banyaknya Pelaku Usaha Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan barang kena cukai yang terawasi	orang	26	26	100		
				1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peredaran Barang dan Jasa sesuai ketentuan Tata Niaga Perdagangan Barang Bersubsidi, Bahan Berbahaya dan Barang Kena Cukai di Kabupaten Kebumen	barang	26	26	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Peredaran Barang dan Jasa sesuai ketentuan Tata Niaga Perdagangan Barang Bersubsidi, Bahan Berbahaya dan Barang Kena Cukai di Kabupaten Kebumen	barang	26	26	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	STATUS	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Banyaknya Pelaku Usaha Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan barang kena cukai yang terawasi	orang	4	4	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terinformasinya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar Rakyat di Kabupaten Kebumen	informasi	4	4	100		
				C PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pasar Rakyat yang terinformasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	pasar	2	2	100		
				1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi perdagangan luar negeri dan peningkatan produk ekspor unggulan daerah	keg	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Berkembangnya perdagangan luar negeri dan perdagangan ekspor	keg	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	STATUS	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar luar negeri dan terciptanya eksportir (pameran trade ekspor indonesia)	keg	2	2	100		
				1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya kegiatan tera dan tera ulang	keg	2.000	2.000	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang di tera/tera ulang	buah	2.000	2.000	100		
				E PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	buah	2	2	100		
				1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	keg	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya promosi akses pasar dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	keg	2	2	100		

b. Permasalahan

- 1) Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan pasar;
- 2) Kasus penyebaran covid, sehingga kegiatan pameran atau pemasaran kurang optimal.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Koordinasi lebih lanjut terkait penambahan anggaran dengan OPD terkait;
- 2) Melakukan optimalisasi promosi dan pemasaran melalui media online

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perdagangan, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan perdagangan ditunjukkan dengan indikator Capaian sebagai berikut :

Tabel 3. 72 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
1. Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	%	82,50	100	87,50	87,50	100
2. Jumlah usaha perdagangan berizin	unit	3718	2413	3727	154,45	2413

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2021

Berikut Data pasar tradisional di kabupaten kebumen disertai dengan kondisi pasar.

Tabel 3. 73 Data Pasar Tradisional Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
1	Pasar Jatiluhur	Desa Jatiluhur Kec. Rowokele	2000	APBD	Rusak Berat
2	Pasar	Desa	2005	APBD	Rusak

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
	Karangjambu	Karangjambu Kec. Sruweng			Berat
3	Pasar Dorowati	Desa Dorowati Kec. Klirong	2000	APBD	Rusak Berat
4	Pasar Banyumudal	Desa Banyumudal Kec Buayan	2015	DAK	Baik
5	Pasar Ayah	Desa Ayah Kecamatan Ayah	2011	TP	Baik
6	Pasar Karangsari	Desa Karangsari Kec. Buayan	2019	DAK	Baik
7	Pasar Tanjungsari	Desa Tanjungsari Kec. Petanahan	2005	APBD	Rusak Berat
8	Pasar Candirenggo	Desa Candirenggo Kec. Ayah	2011	DAK	Baik
9	Pasar Rowokele	Desa Rowokele Kec.Rowokele	2015	DAK	Baik
10	Pasar Kritig	Desa Kritig Kec. Petanahan	2018	DAK	Baik
11	Pasar Jatisari	Desa Jatisari Kec. Kebumen	2012	TP	Baik
12	Pasar Kelapa Prembun	Desa Prembun Kec. Prembun	2016	APBD	Rusak
13	Pasar Sruni	Desa Sruni Kec. Alian	2014	TP	Baik
14	Pasar Jogosimo	Desa Jogosimo Kec. Klirong	2018	APBD	Baik
15	Pasar Caruban	Desa Caruban Kec. Adimulyo	2017	DAK	Baik
16	Pasar Sidomulyo	Desa Sidomulyo Kec. Adimulyo	2019	DAK	Baik
17	Pasar Giwangretno	Desa Giwangretno Kec. Sruweng	2015	TP	Baik
18	Pasar Tamanrejo	Kel Tamanwinangun Kec. Kebumen	2007	APBD	Rusak Berat
19	Pasar Indrakila	Desa Krakal Kec. Alian	2011	TP	Baik
20	Pasar Hewan Purbowangi	Desa Purbowangi Kec Buayan	2019	APBD	Baik
21	Pasar Demangsari	Desa Demangsari Kec. Ayah	2016	DAK	Baik
22	Pasar Kuwarasan	Desa Kuwarasan Kec. Kuwarasan	2017	APBD	Baik
23	Pasar Ungaran	Desa Ungaran Kec. Kutowinangun	2017	DAK	Baik
24	Pasar Puring	Desa Sitiadi Kec. Puring	2017	TP	Baik
25	Pasar Hewan Argopeni	Desa Argopeni Kec. Kebumen	2018	APBD	Baik

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
26	Pasar Bocor	Desa Bocor Kec. Buluspesantren	2016	TP	Baik
27	Pasar Prembun	Desa Prembun Kec. Prembun	2012	TP	Baik
28	Pasar Tlogopragoto	Desa Tlogopragoto Kec. Mirit	2012	APBD	Baik
29	Pasar Ambal	Desa Ambalresmi Kec. Ambal	2011	TP	Baik
30	Pasar Petanahan	Desa Petanahan Kec. Petanahan	2013	APBD	Baik
31	Pasar Kabekelan	Desa Kabekelan Kec. Prembun	2018/2020	TP	Baik
32	Pasar Tumenggungan	Kelurahan Kebumen Kec. Kebumen	2012	APBD	Baik
33	Pasar Kutowinangun I	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun	2013	TP	Baik
34	Pasar Karanganyar	Kel Karanganyar Kec. Karanganyar	2012	TP	Baik
35	Pasar Wonokriyo	Kel Wonokriyo Kec. Gombang	2018	APBD	Baik
36	Pasar Karanggayam	Desa Karanggayam Kec Karanggayam	2014	APBD	Baik
37	Pasar Burung dan Klithikan	Kelurahan Kebumen Kec. Kebumen	2019	APBD	Baik
38	Pasar Kayu Gombang	Desa Plumbon Kec. Karangsambung	2011	TP	Baik
39	Pasar Hewan Karanganyar	Kel Karangayar Kec. Karanganyar	2015	DAK	Rusak
40	Pasar Kutowinangun 2 (Ps Lama)	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun			Rusak Berat

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2021

Kenaikan Usaha Perdagangan berizin khususnya di bidang industri menggambarkan kesadaran pelaku usaha/industri akan pentingnya Izin usaha. Dengan ijin usaha yang dimiliki menandakan peluang pasar semakin besar, dikarenakan untuk produk produk IKM yang ingin masuk atau diperjual belikan ke Pasar/toko Modern dipersyaratkan untuk memiliki izin seperti SP-PIRT yaitu Sertifikat Produksi-Pangan Industri Rumah Tangga yang dalam hal ini masuk ke kategori Usaha Mikro. Setiap tahun Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mengadakan fasilitasi SP-PIRT berikut uji lab yang dipersyaratkan.

5. Urusan Perindustrian

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; dan
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 74 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	STATUS	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Perindustrian	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		A PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Kualitas SDM dan terbangunnya sarana prasarana Industri	%	100	100	100		
				1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Industri Kab Kebumen	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Industri	Keg	20	29	145		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	b Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya kegiatan pelatihan; Terlaksananya kegiatan pendampingan	Keg	15	15	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	c Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pengadaan peralatan produksi gula semut; Terlaksananya pembangunan dapur bersih produksi gula semut	%	100	100	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	d Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Pendampingan; Jumlah pelaku IKM yang mendapat pelatihan	Kelompok	80	80	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	STATUS	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya jumlah IKM yang menerapkan perijinan bagi usaha dan produknya	%	100	100	100		
				1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Terfasilitasi Perijinan	%	100	100	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang terfasilitasi perizinan	%	100	100	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terupdatenya data IKM Kabupaten Kebumen	IKM	200	200	100		
				1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terdatanya IKM Kab Kebumen	IKM	200	200	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	STATUS	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pendataan Industri di Kabupaten Kebumen	%	2500	1157	46,3	Keterbatasan SDM, PPKM	

b. Permasalahan

- 1) Pengalihan penggunaan/peruntukan lahan yang semula untuk Kawasan industri menjadi Shrimp Estate, dan penanggungjawab pelaksana kegiatan beralih dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Dinas Perikanan dan Kelautan;
- 2) Keterbatasan SDM dalam rangka update data IKM

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Koordinasi lebih lanjut dengan OPD terkait penggantian peruntukan penggunaan lahan;
- 2) Penambahan tenaga pendata atau melaksanakan update data

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perindustrian, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan Perindustrian ditunjukkan dengan indikator Capaian Perindustrian sebagai berikut :

Tabel 3. 75 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
1. Terbangunnya kawasan industri	%	80	100	80	80	100
2. Jumlah industri kecil menengah	unit	56.411	54.959	56.423	102,66	100,02

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2021

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Pembangunan Kawasan merupakan strategi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2015 merupakan tahap awal perencanaan pembangunan Kawasan Industri berupa rapat rapat koordinasi dengan OPD terkait, ditindak lanjuti

Pada Tahun 2016 tercapai 20% yaitu Pembuatan Rencana Induk, Studi Kelayakan, pembentukan Surat Keputusan penetapan lokasi Kawasan Industri, Tahun 2017 tercapai 20% untuk Konsultasi, Penyusunan BED (Basic Engineering Design, Tahun 2018 tercapai 20% Koordinasi dan konsultasi ke Pemprov Jateng, Kemenperin, Kemendagri, Bappenas dan BKPM, pendataan lahan milik masyarakat. Tahun 2019 tercapai 20% untuk kegiatan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Industri bersama Disperindag Prov. Jateng, Pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tahun 2020 capaian 20% dengan melakukan Penilaian Aset, Lelang Pengelola Kawasan Industri dan Kontrak Kerjasama dengan Pihak Pengelola Kawasan Industri.

6. Urusan Transmigrasi

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Transmigrasi dilaksanakan melalui program prioritas Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 76 Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH		A PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Keluarga Miskin daerah bencana yang difasilitasi perpindahannya ke daerah transmigrasi	KK	7	0	0		
				1 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Keg	7	0	0		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta Transmigrasi	Orang	7	0	0	Alokasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Daerah asal Jawa Tengah dibatalkan untuk 6 lokasi daerah tujuan di SP 3 palingkan,Kab.Kapuas Kalteng, Kabupaten Luwu Timur,Sulawesi selatan,Kab.Gorontalo,Gorontalo,Kab.Konawe,Sulawesi Tenggara,Kab.Mamuju Tengah,Sulawesi Barat, Kab. Mamasa, Sulawesi Barat, Hal ini mendasari surat dari: Surat Menteri Keuangan Nomor :S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi belanja Kementrian/Lembaga TA 2021 Tahap IV; Surat Dirjen PDK Trans No 593/PKT 04.01/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Revisi Alokasi penempatan transmigrasi Tahun 2021; Surat Kepala Dias Nakertrans Prov.Jawa Tengah No.475/6845 tanggal 27 Juli 2021 hal Revisi Alokasi penempatan Transmigrasi Tahun 2021: Surat Kepala Dinas Nakertrans Jawa Tengah No.475/7633/2021 tanggal 26-8-2021 perihal Alokasi program pembangunan permukiman Transmigrasi dan penempatan transmigran Tahun 2021 sehingga dalam hal ini	Melakukan Koordinasi baik ke Pusat maupun Propinsi jawa tengah terkait untuk alokasi penempatan transmigrasi 2022 agar usulan target penempatan Kabupaten Kebumen dapat dipenuhi sebanyak 7 KK

										Kab.Kebumen tidak bisa mengirimkan Transmigrasi dikarenakan alokasi Kab.Kebumen di Kab.Konawe Sulawesi Tengah dan Kab.Luwu Timur Sulawesi Selatan ditangguhkan.	

b. Permasalahan

Alokasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Daerah asal Jawa Tengah dibatalkan untuk 6 lokasi daerah tujuan di

- SP 3 palingkan, Kab. Kapuas Kalimantan Tengah;
- Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
- Kabupaten Gorontalo, Gorontalo;
- Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
- Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat;
- Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat

Hal ini mendasari surat dari

- 1) Surat Menteri Keuangan Nomor :S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi belanja Kementrian/Lembaga TA 2021 Tahap IV
 - 2) Surat Dirjen PDK Trans No 593/PKT 04.01/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Revisi Alokasi penempatan transmigrasi Tahun 2021
 - 3) Surat Kepala Dinas Nakertrans Prov. Jawa Tengah No.475/6845 tanggal 27 Juli 2021 hal Revisi Alokasi penempatan Transmigrasi Tahun 2021
 - 4) Surat Kepala Dinas Nakertrans Jawa Tengah No.475/7633/2021 tanggal 26-8-2021 perihal Alokasi program pembangunan permukiman Transmigrasi dan penempatan transmigran Tahun 2021
- sehingga dalam hal ini Kab. Kebumen tidak bisa mengirimkan Transmigrasi dikarenakan alokasi Kab. Kebumen di Kab. Konawe Sulawesi Tenggara dan Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan ditangguhkan.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan Koordinasi baik ke Pusat maupun Propinsi Jawa Tengah terkait untuk alokasi penempatan transmigrasi 2022 agar usulan target penempatan Kabupaten Kebumen dapat dipenuhi sebanyak 7 KK

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan transmigrasi diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 0% atau kategori sangat rendah dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

e. Capaian Kinerja Urusan

Meskipun pada tahun 2021 tidak dilaksanakan program dan kegiatan transmigrasi dikarenakan pandemi covid, capaian kinerja Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan jumlah fasilitasi transmigrasi penduduk

Kabupaten Kebumen. Jumlah KK yang difasilitasi pada kurun waktu 2016-2021 cukup fluktuatif. Secara lengkap capaian kinerja urusan transmigrasi tersaji dalam tabel di berikut ini:

Tabel 3. 77 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah KK yang difasilitasi untuk bertransmigrasi	13 KK	5 KK	4KK	10 KK	0 KK	0 KK

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, 2021

3.1.4. Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen tahun 2021 meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

1. Sekretariat Daerah

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Administrasi Umum;
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 78 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sekretariat Daerah			A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai SAKIP	%	60	63,84	106		
				1 Kegiatan Penataan Organisasi	Nilai SAKIP	%	60	63,84	106		
				A Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Jumlah Perbup Rincian Tupoksi - Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan - Jumlah Perda SOTK	dok dok dok	3 2 1	3 2 1	100		
				B Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Jumlah SOP yang dievaluasi/review - Jumlah kompetisi inovasi pelayan publik tingkat kabupaten - Jumlah peraturan bupati yang disusun (tentang ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik) - Jumlah Unit kinerja pelayanan publik yang dievaluasi - Jumlah pelaksanaan forum konsultasi publik - Jumlah peserta Bimtek Pelayanan Publik / e-SKM - Jumlah laporan Forum Konsultasi Publik - Jumlah fasilitasi kompetisi inovasi tingkat nasional dan provinsi - Jumlah laporan Survei Kepuasan Masyarakat - Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis	OPD kali dok OPD kali peserta dok kali dok draft	10 1 1 25 1 120 1 2 1 1	10 1 1 25 1 120 1 2 1 1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Jumlah Dokumen LkjiP yang disusun - Jumlah perjanjian kinerja bupati dan setda - Jumlah peserta Bintek SAKIP - Jumlah Pegawai Teladan - Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi - Jumlah Draft Renstra Setda	dok dok orang orang dok dok	2 2 60 4 2 1	2 2 60 4 2 1	100	-	
		Bagian Umum		1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Program Administrasi Keuangan	%	100	100	100		
				A Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	174	174	100		
				B Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang	dok	12	12	100		
		Bagian Umum		2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang mendapatkan fasilitas, kenaikan pangkat, dll	%	100	100	100		
				A Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat dll	dok	174	174	100		
		Bagian Umum		3 Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	%	100	100	100		
				A Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12	100		
				B Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit pengadaan peralatan rumah tangga	unit	15	15	100		
				C Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100		
				D Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				E Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	dok	12	12	100		
				F Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket penyediaan alt tulis kantor	paket	4	4	100		
				G Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	keg	400	400	100		
		Bagian Umum		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				A Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebelair	unit	5	5	100		
				B Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	30	30	100		
				C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	unit	25	25	100		
		Bagian Umum		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bertambahnya Sarana dan prasarnan Aparatur	%	15	15	100		
				A Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				B Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		
				C Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	100		
				D Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	12	100		
		Bagian Umum		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Presentase Pemerliharaaan barang milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	%	100	100	100		
				A Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	109	109	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				jabatan							
				B Pemeliharaan mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebelair	unit	5	5	100		
				C Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	unit	2	2	100		
				D Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	8	8	100		
		Bagian Umum		7 Adminisrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase capaian Adminisrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100		
				A Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH dan WKDH yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	2	2	100		
				B Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas	paket	2	2	100		
				C Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah personil yang mendapatkan fasilitas medical chek up	orang	8	8	100		
				D Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daaerah dan Wakil Kepala Daerah	Volume pemberian dana operasional KDH dan WKDH	bulan	12	12	100		
		Bagian Umum		8 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	100	100		
				A Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	bulan	12	12	100		
				B Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	bulan	12	12	100		
		Bagian Prokopim		1 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan, Komunikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah	%	100	100	100		
				A Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati	keg	1.000	1.000	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B Sub Kegiatan Fasilitas dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang di Publikasikan	dok	3	3	100		
				C Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	keg	2	2	100		
		Bagian perekonomian dan SDA		1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan pendukung cukai	keg	8	8	100		
				A Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	iklan layanan masyarakat tentang ketentuan bidang cukai di media cetak	kali	8	8	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	B PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tercapainya nilai EKPPD; Peningkatan kapasitas pemerintah daerah	Nilai	>3	>3	100		
		Bagian Pemerintahan		1 Administrasi Tata Pemerintahan	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan	keg	2	2	100		
				A Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah fasilitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	keg	1	1	100		
					Jumlah Kegiatan inventarisasi Rupabumi	keg	1	1	100		
					Jumlah Rapat Koordinasi Subbag Pemerintahan	kali	12	12	100		
				B Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kali rapat koordinasi dalam rangka evaluasi kecamatan	kali	2	2	100		
					Jumlah kali rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan	kali	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah kali rapat koordinasi dalam rangka harmonisasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	kali	1	1	100		
					Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan	kec	1	1	100		
					Jumlah kali rapat koordinasi dan bintek dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	kali	24	24	100		
					Jumlah kali rapat koordinasi fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	kali	1	1	100		
					Jumlah kali rapat koordinasi fasilitasi penataan batas wilayah pemerintahan	kali	2	2	100		
				C Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	dok	2	2	100		
					Jumlah Rakor Manajemen Sub Bag Otda KSD	keg	1	1	100		
					Jumlah Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Kab. Kebumen	keg	1	1	100		
		Bagian Pemerintahan		2 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	keg	1	1	100		
				A Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah	dok	8	8	100		
					Jumlah Lap. Pelaksanaan Kerjasama Daerah	dok	1	1	100		
					Jumlah rakor kerjasama daerah	kali	1	1	100		
		Bagian Kesra		1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	keg	15	15	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rakyat	Kesejahteraan Rakyat						
				A Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam	keg	3	3	100		
					Terlaksananya Penerimaan dan Pelepasan KKN	orang	20	4	20	PPKM	Mahasiswa langsung terjun ke Lokasi KKN
					Terlaksananya Monitoring KKN	keg	12	12	100		
					Terlaksananya Kegiatan Yasin Tahil	keg	32	32	100		
					Terlaksananya Peringatan Hari Santri	keg	1	1	100		
				B Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Bintek Peningkatan Kapasitas Kasi Umum & Perencanaan, modin, WPA/FKD tentang penyakit Menular	orang	750	750	100		
					Rakor Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan KBKes	keg	2	2	100		
				C Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Pembinaan Mental dan Spiritual	Jumlah OPD/BUMD yang mendapatkan sosialisasi Zakat	organisasi	125	125	100		
					Jumlah Usulan Pokir	keg	77	77	100		
					Pelaksanaan Hibah Kepada Tempat Ibadah	lokasi	100	100	100		
					Jumlah Lembaga Yang menerima Hibah	lembaga	2	2	100		
					Jumlah Desa Penerima Bantuan Keuangan kepada Desa Untuk Operasional TPQ	desa	449	449	100		
					Jumlah peserta Sosialisasi Pencairan Hibah & Bankeu	orang	649	649	100		
					Jumlah peserta Sosialisasi Pertanggungjawaban	orang	200	200	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Hibah						
					Jumlah Cek Lokasi dan Verifikasi Hibah & Bankeu	lokasi	160	160	100		
					Jumlah Monev hibah & Bankeu	desa	449	449	100		
		Bagian Hukum		1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	keg	3	3			
				A Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah	dok	570	619	108		
				B Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	perkara	465	467	100		
				c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	keg	547	547	100		
				C PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100		
		Bagian perekonomian dan SDA		1 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terfasilitasinya Kegiatan Pemantauan Kebijakan SDA	Keg	2	2	100		
				A Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan Perikanan	Terlaksananya monev dan rapat koordinasi	kali	36	36	100		
				B Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya monev dan rapat koordinasi	kali	20	20	100		
				2 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Perekonomian	Terfasilitasinya Kegiatan Pemantauan Kebijakan Perekonomian	keg	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				A Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BMD dan BLUD	Terlaksananya monev dan rapat koordinasi	kali	24	24	100		
				B Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya monev dan rapat koordinasi	kali	24	24	100		
		Bag. Adm. Pembangunan		1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tingkat penyerapan/realisasi anggaran berjalan baik	%	94	94	100		
					Persentase SKPD yang terkendali dalam pelaksanaan APBD-nya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO	%	50	49,07	98,14	Ada OPD yang pada akhir tahun anggaran 2021 fisik tidak mencapai 100%	mengintensifkan pengendalian dalam pelaksanaan
				A Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Rakor Pengendalian Evaluasi Pembangunan	kali	2	2	100		
					Jumlah Monitoring pengendalian Pembangunan	keg	1	1	100		
					JUmlah Review Perbup Juklak APBD	dok	1	1	100		
					Jumlah Rakor Pembinaan Jasa Konstruksi	kali	1	1	100		
				B Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan Rakor POP Kabupaten	kali	4	4	100		
					Jumlah Laporan Output Sempel		12	12	100		
					JUmlah Laporan Pelaksanaan Banprov	dok	1	1	100		
					Jumlah Laporan TEPR	dok	12	12	100		
					Jumlah Rakor Banprov	kali	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bagian PBJ		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa melalui UKPBJ tepat waktu dan tepat kualitas	%	100	100	100		
				A Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa melalui UKPBJ tepat waktu dan tepat kualita	%	100	100	100		
				B Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi/Koordinasi proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Keg	4	4	100		
				C Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	117	117	117		

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dialami dalam melaksanakan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan sebagaimana tabel diatas antara lain:

- 1) Alih informasi pengetahuan antar pejabat (ketika mutasi) terkait SAKIP dan RB tidak maksimal;
- 2) adanya pembahasan di DPRD mengenai Perda yang melampaui tahun anggaran;
- 3) penyelesaian perkara utamanya yang berperkara di pengadilan baik TUN atau perdata tidak mesti selesai dalam satu tahun anggaran, karena masih ada proses lebih lanjut ke pengadilan yang lebih tinggi, adanya pandemi sehingga adanya pembatasan kegiatan penyuluhan;
- 4) website tidak bisa diakses dan PHD tidak bisa didownload;
- 5) PPKM karena adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
- 6) Ada OPD yang pada akhir tahun anggaran 2021 fisik tidak mencapai 100%;
- 7) Adanya gangguan Sistem LPSE yaitu dengan rusaknya server LPSE sehingga menyebabkan kegagalan layanan dan mundurnya proses tender;
- 8) Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tahun 2021 dari tadinya 2 (dua) orang menjadi 1 (satau) orang untuk jumlah anggota Pokja pada tahun 2021 yaitu 15 orang;
- 9) Pasal 88 huruf d Perpres 16 tahun 2018, paling lambat 31 Desember 2023, personel yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah diatas sehingga capaian kinerja Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan dapat maksimal antara lain:

- 1) Fasilitasi, Pendampingan dan Bimbingan Teknis;
- 2) Koordinasi dengan pihak terkait;
- 3) Koordinasi dengan para pihak terkait dan selalu memantau perkembangan kasus, penyuluhan dilakukan dengan menggunakan media Ratih Tv sehingga sasaran masyarakat lebih luas, serta materi dapat diakses tidak terbatas waktu dan tempat;
- 4) Koordinasi dengan Kominfo, serta penataan arsip softfile pada Bagian Hukum;
- 5) Beberapa kegiatan dilakukan secara daring;
- 6) Mengintensifkan pengendalian dalam pelaksanaan

- 7) Perlunya kualitas server LPSE yang sesuai standar LKPP dan SOP back up data server;
- 8) Perlu adanya penambahan Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 9) Perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikat Dasar Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan fungsi penunjang lainnya diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 102% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Rata-rata capaian kegiatan adalah 99,89%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 102,11% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Selama tahun 2020-2021 kinerja pelayanan publik Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan. Secara umum gambaran pelayanan publik di Kabupaten Kebumen sampai tahun 2021 masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik mencapai skor 85,82. Namun kinerja pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan hingga capaian di atas skor 90.

Indek layanan pada pelayanan terpadu mengalami peningkatan di tahun namun di tahun 2021 apabila dibandingkan tahun 2020, pelayanan kembali meningkat dengan pembukaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya peningkatan kemudahan perijinan. Capaian Indek survey layanan Kesehatan tahun 2021 mengalami sedikit penurun bila dibandingkan dari tahun 2020 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 81,27. Perkembangan capaian kinerja pelayanan publik di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019-2021 selengkapnya tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 3. 79 Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2021

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021
1	Indek survey layanan Pendidikan	B	B	B
2	Indek survey layanan terpadu	82,15	82,15	95,50
3	Indek Survey layanan Kesehatan	82,92	82,92	81,27
4	Nilai IKM Kebumen	80,61	81,97	85,82

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Kebumen, 2022

Upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat ditempuh melalui beberapa hal antara lain dengan perbaikan mutu SDM, peningkatan sarana dan prasarana layanan termasuk memperhatikan pelayanan yang ramah anak atau bersifat inklusif, serta perbaikan prosedur pelayanan.

2. Sekretariat DPRD

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota; dan
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 80 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Sekretariat	Sekretariat DPRD	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan kesekretariatan DPRD	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kali Diklat/Seminar/ Workshop yang diikuti oleh ASN Sekretariat DPRD	kali	3	3	100		
				a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pertemuan ASDEKSI/Sosialisasi Perundang-undangan yang diikuti oleh ASN Setwan	kali	3	3	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	dok	3	3	100		
				a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	paket	1	1	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang disusun	dok	4	4	100		
				a Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan pencetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah layanan administrasi DPRD yang terpenuhi dan selesai tepat waktu	layanan	4	4	100		
				a Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah paket fasilitasi fraksi	paket	6	6	100		
				b Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah paket rapat	paket	10	10	100		
				c Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan RT Pimpinan	paket	1	1	100		
				5 Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	layanan	4	4	100		
				a Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah paket medical check up untuk setiap anggota DPRD	paket	50	50	100		
				b Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket penyediaan pakaian dinas dan atribut	paket	4	4	100		
				c Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang memperoleh gaji dan tunjangan	orang	50	50	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
				a Pemeliharaan Mebel	jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	paket	1	1	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	1	1	100		
				d Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	bulan	12	12	100		
				7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit barang milik daerah yang diadakan	unit	60	60	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pengadaan Mebel	jumlah paket mebeleur	paket	1	1	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah paket perlengkapan gedung kantor	unit	60	60	100		
				8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				9 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	dok	4	4	100		
				a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	dok	2	2	100		
				b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	2	2	100		
				c Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	dok	2	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	B PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	70	70	100		
				1 Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	dok	20	20	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda Inisiatif DPRD yang dibahas di lingkungan DPRD	dok	2	2	100		
				b Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah raperda yang dibahas	dok	15	11	73,3	Pada tahun 2021 hanya dapat dibentuk 11 Perda, Sedangkan 4 Raperda belum dapat diselesaikan oleh pembahasannya oleh alat kelengkapan DPRD	Pembahasannya dilanjutkan pada tahun 2022
				c Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundangan- undangan yang disusun	dok	2	2	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	dok	6	2	33,3	NA tidak selesai pengerjaannya oleh pihak ketiga antara lain: 1. Digitalisasi usulan komisi C 2. Raperda Pesantren usulan Komisi A 3. Pengawasan Inspektorat usulan Komisi A 4. Sistem Informasi Kesehatan usulan Komisi B	Kegiatan ini sifatnya penyediaan sehingga yang tidak terealisasi anggaran dikembalikan
				2 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	dok	6	6	100		
				a Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD yang dibahas	dok	1	1	100		
				b Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen APBD Perubahan yang dibahas	dok	1	1	100		
				c Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang dibahas	dok	1	1	100		
				d Pembahasan Laporan Semester	Jumlah laporan semester yang dibahas	dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD yang dibahas	dok	1	1	100		
				f Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan yang dibahas	dok	1	1	100		
				3 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang tersusun	dok	6	6	100		
				a Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang tersusun	dok	1	1	100		
				b Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang tersusun	dok	1	1	100		
				c Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang tersusun	dok	1	1	100		
				d Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang tersusun	dok	1	1	100		
				e Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang tersusun	dok	1	1	100		
				f Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang tersusun	dok	1	1	100		
				4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kali Bimbingan Teknis/Orientasi Tugas yang diikuti oleh Anggota DPRD	kali	6	6	100		
				a Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek DPRD	kali	6	6	100		
				b Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah alkel yang difasilitasi tenaga ahlinya	AKD	7	7	100		
				c Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	orang	6	6	100		
				d Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan kehumasan	keg	2	2	100		
				e Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD	dok	1	1	100		
				f Publikasi dan Dokumentasi	Jumlah dokumen publikasi	dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dewan	dan dokumentasi						
				5 Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	keg	3	3	100		
				a Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah paket kunjungan kerja dalam daerah	paket	1	1	100		
				b Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	kali	3	3	100		
				c Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pikir	dok	2	2	100		
				6 Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilakukan	keg	2	2	100		
				a Pengawasan Kode Etik DPRD					100		
				7 Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Kerja Sama Daerah yang dibahas	dok	1	1	100		
				a Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah yang dilaksanakan	paket	1	1	100		
				8 Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang diberikan	jenis	3	3	100		
				a Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Bulan pemenuhan fasilitasi pimpinan DPRD	bulan	12	12	100		
				b Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah paket pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	paket	1	1	100		
				c Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD	dok	1	1	100		

b. Permasalahan

- 1) Pada tahun 2021 hanya dapat dibentuk 11 Perda, Sedangkan 4 Raperda belum dapat diselesaikan oleh pembahasannya oleh alat kelengkapan DPRD;
- 2) Naskah Akademik tidak selesai pengerjaannya oleh pihak ketiga antara lain:
 - Digitalisasi usulan komisi C
 - Raperda Pesantren usulan Komisi A
 - Pengawasan Inspektorat usulan Komisi A
 - Sistem Informasi Kesehatan usulan Komisi B

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) 4 Raperda Pembahasannya dilanjutkan pada tahun 2022
- 2) Kegiatan ini sifatnya penyediaan sehingga yang tidak terealisasi dikembalikan ke Kas Daerah

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

e. Capaian Kinerja Urusan

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah sebesar 70% atau 100% dari target sehingga pada tahun ini kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen secara umum telah tercapai.

Penghitungan indikator dilakukan dengan menghitung capaian output dari 2 (dua) kegiatan utama yang berada di dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 14 Ayat 2 disebutkan bahwa Anggota DPRD dapat melaksanakan bimbingan teknis pendalaman tugas sebanyak maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun. Untuk DPRD Kabupaten Kebumen sendiri

pada tahun 2021, setiap Anggota DPRD-nya melaksanakan bimbingan teknis sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun atau 66,6% dari target yang seharusnya. Bimbingan teknis sendiri ditampung dalam kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD. Sedangkan kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang didalamnya mendukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi, fungsi penganggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan fungsi legislasi yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah maupun Panitia Khusus Pembahas Raperda pada tahun 2021 tercapai sebesar 73,4%.

Dari untuk menghitung capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah maka dua kegiatan tersebut dijumlah untuk kemudian dibagi dua, sehingga dapat dilihat dalam perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{66,6\% + 73,4\%}{2} = 70\%$$

Tabel 3. 81 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah	%	65	70	70	100	70

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Kebumen, 2021

3.1.5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan. Fungsi penunjang dilaksanakan oleh Badan.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, mempunyai kedudukan sebagai urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. BPKAD mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Selain BPKAD, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen nomor 85 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Badan pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kedudukan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Daerah, Tugas BAPPENDA juga membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, BKPPD mempunyai kedudukan melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan, dinamika dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal melaksanakan fungsi kelitbangan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah bekerjasama dengan Perguruan tinggi, diantaranya dalam hal penyusunan kajian yang dibutuhkan dan pelaksanaan riset unggulan daerah dengan melibatkan beberapa pakar di Perguruan Tinggi yang ada. Berikut uraian terkait pelaksanaan urusan fungsi lainnya.

1. Fungsi Perencanaan, Penelaitian dan Pengembangan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang perencanaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 82 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Perencanaan	BAPPEDA		A PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan	Dok	3	3	100		
				1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	presentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Fasilitasi MusrenbangWil RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten, Fasilitasi MusrenbangProv RKPD, Fasilitasi MusrenbangNas RKP, Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD, Musrenbang RPJMD)	Keg	8	8	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai aturan Perundangan (RKPD Tahun 2022, RKPD Perubahan Tahun 2021, RPJMD Tahun 2021-2025 (Tahun Periode RPJMD selanjutnya akan disesuaikan dengan evaluasi Gubernur terhadap RPJMD tersebut))	Dok	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi, profile dan satu data	dok	4	4	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan jumlah dokumen profil daerah Jumlah dokumen satu data	dok	3	3	100		
				B PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan sosial dan budaya; tersusunnya dokumen perencanaan dan pembangunan ekonomi; tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; terkoordinasikannya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah urusan perencanaan bidang pemerintahan & pembangunan manusia	keg	10	10	100		
			Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen SDGs yang tersusun, jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD-P 2021) bidang PPM yang tersusun, jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan bidang PPM yang tersusun	dok	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang tersusun, jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD-P 2021) bidang PPM yang tersusun, jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan bidang PPM yang tersusun	dok	5	5	100		
				2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah kegiatan fasilitasi dan monev dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Keg	2	2	100		
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Laporan Capaian Target Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Perekonomian yang tersusun	Dok	5	5	100		
			Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun	Dok	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen evaluasi urusan	Dok	10	10	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum; Perhubungan; Penanggulangan Bencana; Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Koordinasi IPDMIP (irigasi partisipasi masyarakat terpadu) Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD dan RKPDP) Urusan Pekerjaan Umum; Perhubungan; Penanggulangan Bencana; Komunikasi Informatika	Dok	5	5	100		
			sda	b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Koordinasi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan atau Geopark	Dok	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penelitian dan Pengembangan		1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan OPD Teknis dalam pengembangan teknologi tepat guna serta peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan	A PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terfasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Prosentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	%	8	8	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen kajian dan pengembangan yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen penelitian Riset Unggulan Daerah Jumlah kegiatan fasilitasi DRD Jumlah kegiatan kreasi dan inovasi masyarakat	Dok	8	8	100		

b. Permasalahan

- 1) Belum terintegrasinya secara total SIPD dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga monitoring dan evaluasi
- 2) Belum terbangunnya jejaring kelitbangan daerah, belum optimalnya diseminasi hasil-hasil kelitbangan. Pada bidang inovasi dan teknologi upaya sosialisasi pelaksanaan KRENOVA sudah dilaksanakan, namun masih belum mampu mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam kegiatan KRENOVA. Selain itu terkait dengan inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang harus dilaporkan melalui Kemendagri sebagai tolok ukur penilaian Innovative Government Award masih rendah. Hal ini bukan berarti Perangkat Daerah minim inovasi namun seringkali Perangkat Daerah tidak melengkapi data dukung administrasi terkait pelaksanaan inovasinya.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Penggunaan aplikasi SIPD dalam proses perencanaan daerah;
- 2) Pemutahiran atau mapping dalam dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 kedalam Renstra 2021-2026;
- 3) Penyusunan dokumen proses bisnis dan cascading Bappeda Kab. Kebumen;
- 4) merintis jurnal kelitbangan daerah sebagai salah satu wahana diseminasi hasil-hasil kelitbangan daerah, melakukan digitalisasi hasil-hasil kelitbangan dan membangun digital library untuk kemudian dapat dibangun jaringan dengan perpustakaan digital daerah dan perpustakaan-perpustakaan yang dimiliki oleh perguruan tinggi guna akses hasil-hasil kelitbangan yang dilakukan non pemerintah daerah. Pada bidang inovasi dan teknologi sosialisasi KRENOVA akan dilaksanakan secara lebih massif kepada perguruan tinggi dan sekolah menengah guna menjaring lebih banyak inventor yang mengikuti KRENOVA. Selain itu sosialisasi mengenai kelengkapan administrasi inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah agar predikat Inovatif Government Award Kabupaten Kebumen semakin baik.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan penunjang fungsi perencanaan adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%. Terhadap

tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

Pada tahun 2019 telah terbit Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut telah mengatur secara detail pembagian berdasarkan urusan dan kewenangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program antar Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah dilakukan pemetaan perubahan nomenklatur sub kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan mensinkronkan indikator maupun sub indikator kegiatan dengan tetap mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Selain itu, telah terbit Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya. Adanya peraturan tersebut maka proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pertanggungjawaban terintegrasi dalam satu sistem yang terhubung. Penerapan SIPD dilaksanakan mulai penyusunan perencanaan tahun 2021.

e. Capaian Kinerja Urusan

Sasaran program urusan penunjang perencanaan yang dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2021 adalah :

- 1) Berkembangnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
- 2) Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

Capaian kinerja urusan perencanaan BAPPEDA tahun 2021 sebesar 100%, yaitu terlaksananya:

- 1) Fasilitasi dan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan
 - (a). Bidang perekonomian dan sumber daya alam,
 - (b). Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - (c). Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 2) Tersusunnya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3. 83 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2020-2021

No.	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	a. Rasio keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD b. Rasio Keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD	100%	100%

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kebumen, 2021*

Capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan selama periode 2021 antara lain penyusunan dokumen kajian daerah, pelaksanaan kegiatan KRENOVA, fasilitasi riset-riset daerah, dan pelaksanaan kegiatan Riset Unggulan Daerah.

Tabel 3. 84 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

No	Indikator	2020	2021
1.	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	100%

Sumber: *BAPPEDA Kabupaten Kebumen, 2021*

2. Fungsi Keuangan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang Keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 85 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Keuangan	1 BPKAD		A PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian Realisasi Belanja	%	90	99,01	110,01		
				1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu	%	100	100	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	dok	4	4	100		
			sda	b Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	dok	2	2	100		
			sda	c Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	dok	2	2	100		
			sda	d Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga	dok	2	2	100		
			sda	e Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Keg	8	8	100		
				2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya data rekonsiliasi Pelaporan Keuangan Daerah	Dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase laporan realisasi OPD	%	100%	100%	100		
			sda	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase tertib penelitian SPM dan Penerbitan SKPP	%	100%	100%	100		
			sda	c Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Penerbitan SP2D	%	100%	100%	100		
			sda	d Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	Dok	3	5	166,67		
					Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan kepada PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran	Keg	4	4	100		
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan daerah dan terlaksananya rakor/pembinaan akuntansi keuangan	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen pengesahan Laporan fungsional SKPD	dok	828	828	100		
			sda	b Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	dok	4	4	100		
			sda	c Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun	dok	2	2	100		
			sda	d Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi akuntansi keuangan daerah	keg	2	2	100		
				4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyediaan belanja tak terduga	keg	1	1	100		
					Jumlah desa yang mendapatkan ADD, DD, bantuan keuangan khusus, Bantuan keuangan untuk operasional TPQ, kawasan perdesaan	desa	449	449	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah nasabah yang mendapatkan subsidi bunga melalui lembaga penyalur (BUMD/BUMS)	nasabah	600	600	100		
					Jumlah Desa yang mendapatkan Alokasi bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa yang mendapatkan alokasi bagi hasil retribusi daerah (BHRD)	desa	449	449	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah nasabah yang mendapatkan subsidi bunga melalui lembaga penyalur (BUMD/bums)		600	600	100		
			sda	b Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan alokasi dana desa (ADD) Jumlah Desa yang mendapat alokasi Dana Desa (DD) Jumlah desa yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan khusus, Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan keuangan untuk operasional TPQ, Jumlah Desa yang mendapat kawasan perdesaan(5 kawasan) pengembangan produk unggulan 5 awasan (wisata, anyaman pandan, peternakan sapi, batik dan gula semut) dan terlaksananya		449	449	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					revitalisasi bumdesma sebagai pengelola ekonomi kawasan						
			sda	c Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah penyediaan belanja tidak terduga		1	1	100		
			sda	d Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Alokasi BHPD, BHRD, Badi hasil pihak ketiga untuk Perhutani dan KPIPW Serayu Bogowonto Sempor		449	449	100		
				B PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah (3 dokumen) dan Terlaksananya Proses Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (3 Kegiatan)		3	3	100		
				1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah dan Terlaksananya Proses Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah		3	3	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah		3	3	100		
			sda	b Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas Milik Daerah yang diasuransikan		5	5	100		
					Jumlah plang papan nama Barang Milik		85	85	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah yang terpasang						
			sda	c Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penjualan barang milik daerah	keg	3	3	100		
					Terlaksananya proses hibah barang milik daerah	keg	2	2	100		
					Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah	keg	6	6	100		
		2 BAPPENDA		A PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase capaian Pendapatan Asli Daerah	%	100	118,31	118,31		
				1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	11	11	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Desa yang termonitor dan terevaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, Jumlah OPD yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Desa	460	460	100		
			sda	b Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan, sosialisasi dan keberatan	Kec	26	26	100		
			sda	c Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Basis Data Pajak Daerah	Obyek	1.496.930	1.496.930	100		
			sda	d Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OPD dan Unit kerja pengelola pendapatan	Unit kerja	80	80	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	e Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen SKPD terbit, Jumlah Penyediaan Blanko SPPT PBB, Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Yang Dikelola	buah	1.343.000	1.343.000	100		
			sda	f Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih di 11 jenis pajak daerah	orang	1.291.885	1.291.885	100		

b. Permasalahan

Meskipun hampir semua indikator kinerja program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen di Tahun 2021 dapat terealisasi, masih ditemukan beberapa kendala/permasalahan sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan terutama dalam proses penyusunan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.
- 2) Kurang cermatnya SKPD dalam penyusunan perencanaan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan
- 3) Masih lemahnya pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran kas, dalam hal ini SKPD belum konsisten dalam melaksanakan register resiko yang telah disusun.
- 4) Adanya peraturan baru mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan.
- 3) Optimalisasi peran APIP dalam penerapan SPIP di masing-masing SKPD.
- 4) Melakukan sosialisasi tentang implementasi penerapan SIPD.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan penunjang fungsi keuangan adalah 103,33% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%. Terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 103,33% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk target tahun 2021 indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2020 terealisasi WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mampu mempertahankan penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD yang ke-7 kalinya dan 4 tahun terakhir meraih WTP secara berturut-turut yakni tahun 2017-2018-2019-2020.

Tabel 3. 86 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD

Indikator Sasaran	Realisasi 202	2021			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2019	WTP	WTP atas LKPD 2020	100%	WTP	100%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen 2021.

Berdasarkan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 193/S/XVIII.SMG/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, BPK RI memberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Capaian kinerja indikator Opini BPK atas LKPD sebesar 100% dengan kriteria capaian kinerja Baik. Pemberian Opini WTP dari BPK RI menggambarkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi :

- a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara umum memadai.
- c) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

3. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalitas ASN dengan penerapan sistem merit melalui Permenpan RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem Merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem Merit meliputi 8 aspek yaitu : perencanaan kebutuhan ASN; pengadaan ASN, pembagian karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian; penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Kepegawaian Daerah; dan
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 87 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	A PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terfasilitasi-nya aparatur pemerintah sejak perekrutan, penempatan, pengembangan karier sampai dengan penghargaan prestasi	orang	741	842	113,63		
				1 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta Seleksi CASN	orang	550	2027	368		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS	orang	500	707	141		
				c Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah buku profil kepegawaian yang tercetak, Rakor SIMPEG, Penerbitan Kartu Pegawai dan Update/Pengembangan SIMPEG	dok	1	1	100		
				2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang diambil Sumpah Janji PNS; Jumlah PNS usulan Pemindahan Tugas/Mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, mutasi masuk dan keluar Pemkab. Kebumen; Jumlah usulan Kenaikan Pangkat PNS yang terfasilitasi	orang	220 150 900	- 1030 1441	194		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pejabat yang mengikuti Assessment (JPT, Administrator, Pengawas dan JFU); Jumlah pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama dan atau Mutasi JPT Pratama; Jumlah penataan Pejabat sesuai dengan nomenklatur jabatan.	orang kali orang	50 1 150	50 1 150	100		
				3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikuti Ujian Dinas, Ujian PI, pemrosesan terbitnya Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar serta Jumlah PNS yang mendapatkan Bantuan Tugas Belajar dalam rangka pengembangan SDM	orang	55	55	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	orang	200	450	225		
				4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah monitoring dan evaluasi penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan ASN; Jumlah Pelaksanaan Sidang Kasus PNS; Jumlah pembekalan PNS yang akan Purna Tugas; Jumlah pemrosesan ijin cerai PNS; Jumlah pengurusan JKK/JKM PNS; Jumlah pengurusan THT Taspen dan pemberian Tali Asih Pensiun PNS; Jumlah pengusulan Penghargaan SLKS	bulan OPD kali orang orang orang	12 32 6 600 20 10	12 32 6 600 20 10	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Sosialisasi SKP dan PPK PNS	keg	2	2	100		
4	Pendidikan dan Pelatihan			B PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	orang	1785	1785	100		
				1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pejabat administrator yang mengikuti Bimtek Proses Bisnis; Jumlah pejabat yang mengikuti Bimtek Penyusunan RPJMD; Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Kepegawaian; Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis di Lembaga Diklat Provinsi/ Pusat	orang	40 40 45 17	40 40 45 17	100		
				2 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		%	100	100	100		
				a Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional ke Lembaga Diklat; Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS; Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (PKN Tk. II, PKA dan PKP); Terselenggaranya Rakor Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	orang	10 310 40 56 1	10 220 40 56 1	100		

b. Permasalahan

- 1) Perencanaan Kebutuhan ASN
 - a) Peta jabatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
 - b) Data kepegawaian berdasarkan kualifikasi dan kompetensi belum tersedia
- 2) Pengadaan ASN
 - a) Belum ada kebijakan internal (Peraturan Bupati) terkait pengadaan ASN secara terbuka kompetitif transparan dan tidak diskriminatif
 - b) Latsar bagi CPNS dilaksanakan bertahap (2 tahun) sehubungan anggaran yang terbatas dengan adanya COVID-19.
- 3) Sistem Informasi
 - a) Belum dilaksanakan pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi
 - b) Belum tersusunnya Perbup SIMPEG
 - c) SIMPEG belum terintegrasi dengan SAPK BKN
 - d) Sistem Penggajian belum terintegrasi secara semupura dengan SIMPEG
- 4) Manajemen Kinerja
 - a) Dengan adanya perubahan Penilaian Kinerja maka diperlukan Perubahan dalam Sistem manajemen Kinerja
 - b) Pengembangan Kompetensi ASN belum memenuhi 20 jam dalam 1 tahun, sehingga Indeks Profesionalisme ASN dilingkungan Pemerintah kabupaten masih Rendah.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Perencanaan Kebutuhan ASN
 - a) Menyampaikan surat kepada instansi Pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan rekomendasi atas keberadaan jabatan fungsional tersebut, sebagai penyelesaian sementara atas ketidaktersediaan jabatan dimaksud dalam Peta Jabatan
 - b) Bagi jabatan fungsional dan pelaksana untuk dapat mulai di inventarisasi di masing-masing Perangkat Daerah sehingga pada saat adanya perubahan, Peta Jabatan sudah lebih sempurna dan menggambarkan perencanaan kebutuhan dan penyediaan ASN lebih baik.

- c) Dilakukan pemetaan terhadap seluruh jabatan baik structural, fungsional maupun pelaksana dalam rangka penyusunan kualifikasi dan kompetensi jabatan, sehingga akan membantu dalam perencanaan kebutuhan ASN secara lebih terperinci
- 2) Pengadaan ASN
 - a) Penyusunan konsep Peraturan Bupati Kebumen tentang Pengadaan ASN
 - b) Pengusulan kebutuhan ASN dan kebutuhan anggaran Latsar sesuai kemampuan keuangan daerah
- 3) Sistem Informasi
 - a) Perencanaan pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi dituangkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Penyusunan dan penerapan Perbup SIMPEG dalam urusan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
 - c) Integrasi Sistem Aplikasi Kepegawaian dengan SIASN
- 4) Manajemen Kinerja
 - a) Mengintegrasikan Sistem manajemen ASN di pemerintah kabupaten Kebumen
 - b) Mengembangkan Aplikasi SINAU ,sehingga diharapkan semua PNS berhak mendapatkn Pengembangan Kompetensi selama 20 JP selama 1 tahun.
 - c) Membuat Surat edaran ke Perangkat daerah untuk melakukan pendataan PNS yang sudah mengikuti diklat.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 106,81% atau kategori Hasil Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 97,8%. Terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 109,21% atau kategori sangat tinggi.

e. **Capaian Kinerja Urusan**

Kinerja di urusan fungsi penunjang Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan ditunjukkan dengan indicator Capaian sebagai berikut :

Tabel 3. 88 Perkembangan Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	86,23	97,50	92,68	95,00	96,52

Sumber : BKPPD SDM Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka realisasi Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang diampu BKPPD tahun 2021 mengalami kenaikan dari 90,95% menjadi 92,68% karena dipengaruhi capaian 3 sub indikator yang meliputi komponen prosentase pejabat struktural yang mengikuti diklatpim ditambah prosentase pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin ditambah prosentase jumlah pejabat structural tetapi masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 jumlah pejabat yang mendapatkan promosi jabatan masih banyak yang belum mengikuti diklat pim, sehingga terjadi ketimpangan pada presentase jumlah pejabat structural yang seharusnya sudah mengikuti diklat pim sesuai dengan jenjang eselonnya. Adapun uraiannya sebagai berikut :

1) **Capaian Prosentase Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengirim Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan ke lembaga diklat sebanyak 56 orang, Sampai dengan tahun 2021 Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan baik tingkat II, III maupun IV sesuai jenjang jabatannya sebanyak 468 orang dari total Jumlah Pejabat struktural yang ada sebanyak 524 orang atau masih ada 245 pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, sehingga diperoleh prosentase capaian sebesar 77,43%. Kabupaten Kebumen belum dapat mengirimkan pejabat struktural untuk mengikuti Diklatpim secara

keseluruhan mengingat anggaran yang tersedia dan kuota diklat di lembaga penyelenggara diklat yang terbatas.

2) Prosentase pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin

Prosentase pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin” memperoleh capaian sebesar 98,88% atau melebihi target yang ditentukan dari target sebesar 98,82% dan dapat terealisasi 99,94%. Dari jumlah PNS Kabupaten Kebumen kondisi 31 Desember 2021 sebanyak 10.525 orang yang dijatuhi hukuman disiplin hanya sebanyak 6 orang. Ini menandakan bahwa kedisiplinan aparatur di Kabupaten Kebumen relatif baik melalui upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin dengan cara inspeksi mendadak (sidak) ke OPD dan tempat umum pada jam kerja. Disamping itu juga BKPPD melaksanakan sosialisasi peraturan yang menyangkut disiplin pegawai kepada OPD secara berkala setiap tahun.

3) Prosentase jumlah pejabat struktural

Prosentase jumlah pejabat struktural” memperoleh capaian sebesar 100,60% yang diperoleh dari target sebesar 96,82% dapat terealisasi sebesar 97,40%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah pejabat yang ada sebanyak 524 pejabat dari 538 kotak jabatan struktural yang tersedia sehingga masih ada kotak jabatan struktural sebanyak 14 yang belum dapat diisi.

3.1.6. Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dijalankan oleh Inspektorat.

1. Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator capaian program prioritas diatas adalah Persentase LAKIP yang nilainya meningkat; Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK; Tingkat Maturitas SPIP pada Level 3; Nilai Leveling APIP Kabupaten. Adapun capaian kinerja

program dan kegiatan fungsi pengawasan adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 89 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Inspektorat Kabupaten Kebumen	INSPEKTORAT	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Leveling APIP	Nilai	3	3	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan	Obyek	64	120	188		
				A Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Obyek/OPD	8	7	88	Sasaran yang akan diperiksa yaitu PDAM, sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP	Koordinasi eksternal dengan BPKP/Inspektorat Provinsi
				B Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Kali	12	25	208		
				C Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Kali	4	16	400		
				D Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Obyek	40	72	180		
				2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan	Obyek	48	48	100		
				A Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Obyek	24	24	100		
				B Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Obyek	24	24	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan	B PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	3,34	3,82	114		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kondusivitas Wilayah								
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	3	3	100		
				A Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kali	1	1	100		
				B Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	2	2	100		
				2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Kali	24	27	113		
				A Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kali	12	14	117		
				B Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kali	12	13	108		

b. Permasalahan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, yaitu target 8 obyek pemeriksaan terealisasi 7 obyek pemeriksaan dikarenakan salah satu obyek pemeriksaan yaitu PDAM Kebumen yang semula direncanakan untuk diperiksa sudah diaudit oleh BPKP sebelum jadwal pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen pada awal triwulan I Tahun 2021;
- 2) Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu dari target 92% terealisasi 87,98% dikarenakan masih terdapat LHP pada pemeriksaan bulan November dan Desember 2021 yang belum selesai ditindaklanjuti (jangka waktu tindak lanjut penyelesaian maksimal 2 bulan).

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Mengoptimalkan pemutakhiran tindak lanjut melalui koordinasi pengawasan dan monitoring.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Fungsi Penunjang Pengawasan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 107,19% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 125%. Terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 85,75% atau kategori tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Capaian kinerja urusan fungsi pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 90 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kebumen 2020-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	%	14,29	14	40,22	287,28	14
Persentase Perangkat Daerah yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	%	99,43	95	98,20	103,38	95
Persentase penyelesaian	%	95,34	92	87,98	95,63	92

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu						
Nilai Leveling APIP Kabupaten	Nilai	2,5	3	3	100	3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kebumen 2021

a. Persentase LAKIP yang nilainya meningkat

Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Kebumen melakukan penilaian LAKIP pada 22 perangkat daerah yaitu kecamatan. Ini merupakan penilaian pertama pada kecamatan, yang sebelumnya belum pernah di nilai, sehingga OPD yang nilai SAKIPnya meningkat adalah 22 Perangkat Daerah dari 54 Perangkat daerah.

b. Persentase Perangkat Daerah yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK.

Tahun 2021 dari 17 obyek pemeriksaan terdapat 3 obyek pemeriksaan yang ada temuan keuangan, sehingga Perangkat Daerah yang tidak ada temuan keuangan BPK adalah 164 perangkat daerah dari 167 perangkat daerah yang meliputi Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, SMP, Puskesmas.

c. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu.

Dari target 92% terealisasi 87,98%. Terdiri dari tindak lanjut temuan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten. Persentase tindak lanjut belum sesuai dengan target disebabkan rekomendasi pemeriksaan yang LHP nya terbit pada bulan November 2021 dan Desember 2021 belum selesai ditindaklanjuti dan sesuai perka BPK Nomor 2 Tahun 2017 batas waktu penyelesaian rekomendasi tindak lanjut selama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima.

3.1.7. Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

1. Kecamatan dan Kelurahan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 11 (sebelas) Kelurahan di Kabupaten Kebumen melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan urusan kewilayahan sebagai berikut :

Tabel 3. 91 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kewilayahan	1 Adimulyo		A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	100	100		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum)	Jenis	5	5	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Keg	3	3	100		
	Kewilayahan	1 Adimulyo	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase terlaksanannya kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100	Refocusing dari beberapa Kegiatan untuk mendukung penanganan Covid 19 di Wilayah Kecamatan Alian	
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Keg	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitas Tata pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang di bina	Desa	23	23	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	23	23	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokali	14	14	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	Desa	23	23	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Keg	9	9	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	keg Desa	223	223	100		
		2 Alian	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kondusivitas Wilayah	PUBLIK							
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (SIUP Kecil, Rekom IMB, Rekom Izin Lingkungan)	Jenis	3	3	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Izin Keramaian)	Jenis	7	7	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya hubungan yang sinergi dengan aparat dan warga masyarakat di Wilayah Kecamatan Alian	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya sinergitas dengan aparat dan warga masyarakat di Wilayah Kecamatan Alian	%	100	100	100		
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Alian	Terkoordinasikannya Penanganan Covid 19	Bln	9	9	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Keg	4	4	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DESA							
				1 Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desaa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa yang di Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbangdes, Jumlah Kegiatan Pra Musrenbangcam, Jumlah Kegiatan Musrenbangcam	Desa Keg	16 2	16 2	100		
				f Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Pemuda dan UKS , Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Jumlah Kegiatan Pembinaan	Keg	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sosial Masyarakat, Jumlah Kegiatan Fasilitas UKS						
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pendampingan Desa (Bansos Sembako) , Jumlah Kegiatan Fasilitas TKP2KDes	Keg	2	2	100		
		3 Ambal	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian peningkatan pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah pengajuan permohonan perijinan	Bln	12	12	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan non perizinan	Jumlah permohonan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, SKCK	Bln	12	12	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Bln	12	12	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah desa yang terfasilitasi	Desa	32	32	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Vertikal	Terciptanya hubungan yang sinergis dengan aparat dan warga masyarakat di wilayah kecamatan Ambal	Keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				di Wilayah Kecamatan							
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan Memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI	Jumlah Kegiatan dalam Rangka HUT RI	Paket	1	1	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi keuangan desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Desa	32	32	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Rakor sinkronisasi dan perencanaan pembangunan daerah dengan Pembangunan	kali	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Desa	Desa						
				c Sub Kegiatan FasilitasPenyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Orang	72	72	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/kel	Desa	32	32	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Paket kegiatan yang dilaksanakan	Paket	4	4	100		
				f Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Desa yang terfasilitasi TKP2KDES	Desa	32	32	100		
		4 Ayah	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				1 penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerja yang ada di kecamatan	Prosentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang ada di kecamatan	%	100	100	100		
				a Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di kecamatan	Jumlah Bulan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan	Bln	12	12	100		
				2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada camat	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan non Usaha	Jumlah Bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non usaha	Bln	12	12	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terfasilitasinya koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Prosentase terlaksananya kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia Dan Instalasi Vertikal di wilayahnya	Jumlah Kegiatan dalam rangka sinergitas Dengan kepolisian Negara Republik Indonesia tentara Nasional Indonesia dan instalasi Vertikal di wilayahnya	Keg	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terfasilitasinya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100		
				1 penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terlaksananya Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar negara republik indonesia Tahun 1945, pelestarian Bineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam rangka HUT RI dan hari jadi	Keg	1	1	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	%	100	100	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Prosentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	100	100	100		
				b Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100		
				c Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi Penyelenggaraan Musren bangdes, Jumlah musrenbangcam	Desa	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Fasilitas Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan pembinaan PKK, Jumlah Kegiatan Pembinaan sosial Masyarakat, jumlah kegiatan pembinaan UKS, Jumlah kegiatan pembinaan Organisasi Kepemudaan	Keg	3	3	100		
				e Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Kegiatan Fasilitas TKP2KdesJumlah kegiatan Fasilitas Pendampingan Desa (Bansos sembako)	Keg	2	2	100		
		5 Bonorowo	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Paket/Jenis	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan	Jenis	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum)	Jenis	9	9	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KETERTIBAN UMUM							
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keg	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Pemerintah Desa yang Terbina dan Terawasi	%	100	100	100		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya hubungan yang sinergis dengan aparat dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Bonorowo	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya hubungan yang sinergis dengan aparat dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Bonorowo	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (kegiatan lama Fasilitas APBDes)	Desa	11	11	100		
				b Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	-	-	0		
				c Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				g Sub Kegiatan	Jumlah fasilitas	Kegiatan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Data Kemiskinan dan Bansos Sembako)						
		6 Buayan	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perijinan	Jumlah jenis pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Aparat dan Warga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kuwarasan	Keg	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penanganan Covid 19	Keg	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan	Keg	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				UMUM							
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	Keg	1	1	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan	Keg	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Keg	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	20	20	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas kepala Desa dan	Jumlah kegiatan fasilitasi bimtek Kepala	Keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Desa	Desa dan Perangkat Desa						
				c Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitas bimtek kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	Keg	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitas penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	Keg	20	20	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah)	Keg	3	3	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitas Kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes)	Keg	1	1	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor kawasan perdesaan	Keg	2	2	100		
		7 Buluspesantren	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan	%	100	100	100	-	
				1 Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Keg	6	6	100	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Perizinan Non Usaha	Jumlah urusan pemerintahan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang terkait perizinan non usaha	Keg	1	1	100	-	
				b Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang terkait non perizinan	Keg	5	5	100	-	
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100	-	
				1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Keg	3	3	100	-	
				a Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Keg	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Desa	21	21	100	-	
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	keg	7	7	100	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pengawasan pemerintah desa	pembinaan dan pengawasan pemerintah desa						
				b Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa	Dok	2	2	100	-	
				c Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	2	2	100	-	
				d Fasilitasi perencanaan dan pembanguna Parsitipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi perencanaan dan pembanguna Parsitipatif	Keg	1	1	100	-	
				e Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa (PKK,Kepemudaan,UK S,Bumdes,dan Sosmasy)	Keg	9	9	100	-	
				f Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (SEBAKO dan TKP2KDes)	Keg	1	1	100	-	
				D PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	-	
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Desa	21	21	100	-	
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah desa Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	desa	21	21	100	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kecamatan							
		8 Gombang	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakn	Keg	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Keg	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	presentase terselenggaranya Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam mengikuti HUT RI	Keg	1	1	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, tersedianya dokumen oprasional kebijakan pembangunan daerah, jumlah organisasi yang berperan dalam pembangunan desa terfasilitasi kegiatan TKP2des	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentasi desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dengan Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa						
				c Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1. Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel	Desa	12	12	100		
					2. Jumlah kali kegiatan pra dan musrenbangcam	Kali	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah kegiatan pembinaan TP PKK	Keg	2	2	100		
					2. Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Keg	1	1	100		
					3. jumlah kegiatan usaha kesehatan sekolah	Keg	1	1	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kegiatan Sembako	Desa	14	14	100		
					Jumlah kegiatan Fasilitas TKP2K Desa/Kel	Keg	1	1	100		
				D PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasnya sinergitas dengan Polri, TNI, Instansi Vertikal Tokoh Agama, Tomas di wil.kutowinangun	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ketertiban Umum	Ketertiban Umum						
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan pelaksanaan sinergitas dengan aparat dan warga masyarakat kecamatan	Bulan	12	12	100		
		9 Karanganyar	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.	Keg	6	6	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha .	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha .	Unit	12	12	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jenis	2	2	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.		%	100	100	100		
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan .		Keg	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Indek konduksifitas Kecamatan	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				UMUM							
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah .	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.	%	100	100	100		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .	Jumlah Kegiatan dalam rangka pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional	Keg	keg	keg	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa dengan Indeks Desa membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	100	100	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	%	100	100	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	desa	7	7	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah	dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Desa	dengan pembangunan Desa SKPD						
				c Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif .	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Musrenbangdes/kec	desa	11	11	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas)	keg	1	1	100		
		10 Karanggayam	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	100	100	100		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilipahkan Kepada Camat	%	100	100	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan yang di Fasilitasi	jenis	1	1	100		
				b Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Nonperizinan yang dilaksanakan	jenis	5	5	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang terlaksana	Keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasiona Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Keg	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum seseui Penugasan Kepala Daerah	Keg	2	2	100		
				a Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dala rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Keg	2	2	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	100	100	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasiitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Desa	19	19	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	19	19	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	Dok	2	2	100		
				c Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Keg	1	1	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	Keg	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Keg	5	5	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2KDes/kel dan Bansos Sembako)	Keg	2	2	100		
		11 Karangsambung	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Dok	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah pelayanan fasilitasi perizinan non usaha	keg	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah bulan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	dok	1	1	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselenggaranya Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	bulan	6	6	100		
				1 Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah bulanTerlaksananya Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal	bulan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah bulan sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal	bulan	6	6	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari jadi Kab.Kebumen	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , pelaksanaan Undang-	dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pelatihan Paskibra, Resepsi 17an dan Karnaval pembangunan)						
				a Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , pelaksanaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara& Resepsi HUT RI , Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	keg	1	1	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	desa	14	14	100		
				1 Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Prosentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	keg	7	7	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang terfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dok	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	dok	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan pelatihan LINMAS	dok	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam)	dok	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitas program pemberdayaan masyarakat desa (PKK, Ormas, Kepemudaan , BUMDES dan UKS)	dok	1	1	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah kegiatan pendampingan desa (TKP2Kes dan BPNT)	dok	1	1	100		
		12 Kebumen	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	20	20	100		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	keg	9	9	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Perizinan yang dilaksanakan	keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan non Perizinan yang dilaksanakan	keg	8	8	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	20	20	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	keg	2	2	100		
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keg	27	27	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keg	66	66	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayagunaan	Desa	24	24	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					aset desa						
				b Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan	Desa	24	24	100		
				c Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dok	3	3	100		
				d Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum	keg	1	1	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan musrenbangcam yang difasilitasi	keg	3	3	100		
				f Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial masyarakat yang terfasilitasi	keg	9	9	100		
				g Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes dan Pendampingan Desa (Bansos) yang terfasilitasi	keg	2	2	100		
				D PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Bulan tercukupinya penyelenggaraan koordinasi forkopimcam di Kecamatan Kebumen	bulan	9	9	100		
				1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Bulan tercukupinya penyelenggaraan koordinasi forkopimcam di Kecamatan Kebumen	bulan	9	9	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bulan tercukupinya penyelenggaraan koordinasi forkopimcam di Kecamatan Kebumen	bulan	9	9	100		
		13 Klirong	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan	%	100	100	100	-	
				1 Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah urusan pemerintahaan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	keg	6	6	100	-	
				a Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Perizinan Non Usaha	Jumlah urusan pemerintahaan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang terkait perizinan non usaha	keg	1	1	100	-	
				b Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahaan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang terkait non perizinan	keg	5	5	100	-	
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100	-	
				1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila pelaksanaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	keg	2	2	100	-	
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	-	
				a Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	keg	6	6	100	-	
				b Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	24	24	100	-	
				c Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa	dok	2	2	100	-	
				d Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	keg	1	1	100	-	
				e Fasilitasi perencanaan dan pembanguna Parsitipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi perencanaan dan pembanguna	keg	2	2	100	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Parsitipatif						
				f Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa (PKK,Kepemudaan,UK S,Bumdes,dan Sosmasy)	keg	4	4	100	-	
				g Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (SEBAKo dan TKP2KDes)	keg	2	2	100	-	
				D PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	-	
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	desa	24	24	100	-	
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	desa	24	24	100	-	
		14 Kutowinangun	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terlaksananya fasilitasi pelayanan non perijinan/perijinan	%	100	100	100		-
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	terlaksananya fasilitasi pelayanan non perijinan/perijinan	%	100	100	100		-
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jenis	4	4	100		-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Nonperizinan							
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Jenis	1	1	100		-
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100		-
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	presentase terselenggaranya Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		-
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	keg	1	1	100		-
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, tersedianya dokumen oprasional kebijakan pembangunan daerah, jumlah organisasi yang	%	100	100	100		-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					perperan dalam pembangunan desa terfasilitasi kegiatan TKP2des						
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	presentasi desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	%	100	100	100		-
				a Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	desa	19	19	100		-
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1. Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel	Desa	19	19	100		-
					2. Jumlah kali kegiatan pra musrenbangcam	kali	1	1	100		-
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. jumlah kegiatan pembinaan TP PKK	keg	1	1	100		-
					2. Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa	keg	1	1	100		-
					3. jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan	kali	1	1	100		-
					4. jumlah kegiatan pembinaan UKS	keg	1	1	100		-
					5. jumlah kegiatan sosialisasi masyarakat	kali	3	3	100		-
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah desa yang terfasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	19	19	100		-
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Desa	19	19	100		-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dengan Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa						
		15 Kuwarasan	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah bulan Pelayanan Perijinan Non Usaha yang dilaksanakan	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah bulan pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Bulan	12	12	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Aparat dan Warga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kuwarasan	Kegiatan	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penanganan Covid 19	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	3	3	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Kegiatan	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Desa	22	22	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Desa	Pendayagunaan Aset Desa						
				b Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (IPMD dan Profil)	Dokumen	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitas penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Bumdes, Usaha Kesehatan Sekolah)	Kegiatan	5	5	100		
				e Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitas Kegiatan penanggulangan kemiskinan (Sembako dan TKP2Kdes)	Kegiatan	2	2	100		
		16 Mirit	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%			100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Keg	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan	Jenis	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum)	Jenis	10	10	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	keg	6	6	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Pemerintah Desa yang Terbina dan Terawasi	%	100	100	100		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya hubungan yang sinergis dengan aparat dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Mirit	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya hubungan yang sinergis dengan aparat dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Mirit	Kegiatan	1	1	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	keg	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (kegiatan lama Fasilitas APBDes)	Desa	22	22	100		
				b Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Desa							
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	-	0	Adanya Pandemi Kegiatan tidak bisa dilaksanakan	Melaksanakan pergeseran anggaran
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Data Kemiskinan dan Bansos Sembako)	Kegiatan	2	2	100		
		17 Padureso	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100%	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100%	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan Rekom IMB)	jenis	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (Rekam KTP, Cetak KK, legalisasi umum)	jenis	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya hubungan yang sinergi dengan aparat dan warga masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya sinergitas dengan aparat dan warga masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	100	100	100		
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasikannya Penanganan Covid 19	kegiatan	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100%	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100%	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	3	3	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desaa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	9	9	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	-	-	-	-	REFOCUSING ANGGARAN	Dsiusulkan anggaran pada tahun berikutnya

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa yang di Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbangdes, Jumlah Kegiatan Pra Musrenbangcam, Jumlah Kegiatan Musrenbangcam	Desa	9	9	100		
				f Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Pemuda dan UKS	Kegiatan	1	1	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pendampingan Desa (Bansos Sembako) , Jumlah Kegiatan Fasilitas TKP2KDes	Kegiatan	2	2	100		
		18 Pejagoan	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan	%	100	100	100	-	-
				1 Pelaksanaan urusan pemerintah yang diimpahkan kepada camat	Jumlah urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat	%	100	100	100	-	-
				a Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Perijinan Non Usaha	Jumlah pelayanan Perijinan Non Usaha yang Dilaksanakan	%	100	100	100	-	-
				b Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah pelayanan Non Perijinan yang Dilaksanakan	%	100	100	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	keg	1	1	100	-	-
				1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	keg	1	1	100	-	-
				a Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila pelaksanaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	keg	1	1	100	-	-
				C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa dengan indeks membangun kategori maju dan mandiri	keg	6	6	100	-	-
				a Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	desa	13	13	100	-	-
				b Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan aset Desa	Jumlah desayag terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	13	13	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa	dok	1	1	100		
				d Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kali	1	0	0	Refocusing anggaran	Diusulkan anggaran oada tahun berikutnya -
				e Fasilitasi perencanaan dan pembanguna Parsitipatif	Jumlah Desa yang diFasilitasi penyelenggaraan Musrenbangcam	desa	13	13	100		
				f Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	keg	1	1	100		
				g Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan TKP2KDes)	keg	1	1	100		
				D PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	desa	13	13	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Desa	13	13	100		
		19 Petanahan	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	Persentase	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	DAN PELAYANAN PUBLIK							
				1 Kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pengajuan KTP dan perijinan yang tertangani	persentase	100	100	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Jenis	1	1	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percepatan penanggulangan covid -19	kegiatan	1	1	100		
				1 Kegiatan kordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100		
				a sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	kegiatan	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terfasilitasinya kegiatan- kegiatan HUT RI	Kegiatan	1	1	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.	Kegiatan	5	5	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa; Tersedianya Dokumen Operasional Kebijakan Membangun daerah; Jumlah Organisasi Perempuan yang berperan dalam pembangunan Desa; Terasilitasinya Kegiatan TKP2KDes	persentase; Kegiatan;	100; 3; 100; 100	100; 3; 100; 100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	desa	21	21	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes dan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa	desa	21	21	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	21	21	100		
				c Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan	2	2	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes	desa	21	21	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Kegiatan	1	1	100		
					Jumlah kegiatan Pembinaan PKK	Kegiatan	21	21	100		
					Jumlah Kegiatan pembinaan sosial masyarakat	Kegiatan	1	1	100		
					Peserta pembinaan UKS	orang	40	40	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan fasilitasi BPNT	Kegiatan	1	1	100		
					Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes	Kegiatan	2	2	100		
		20 Poncowarno	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	persen	100	100	100		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	jenis	6	6	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	jenis	2	2	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	jenis	4	4	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100		
				1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kegiatan	2	2	100		
				a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kegiatan	2	2	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terfasilitasi kegiatan - kegiatan HUT RI	persen	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	kegiatan	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Hari Jadi, HUT RI, Malam Tasyakuran)	kegiatan	4	4	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	persen	100	100	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan pemerintahan desa	kegiatan	6	6	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan penyusunan APBDes	desa	11	11	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	11	11	100		
				c Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100		
				d Fasilitasi Penyusunan	Jumlah desa yang	desa	11	11	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan Pembangunan Partisipatif	difasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes						
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan PKK, organisasi kepemudaan, sosmas, UKS	kegiatan	4	4	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan Fasilitasi TKP2KDes/Kel	kegiatan	1	1	100		
		21 Prembun	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah perijinan yang dilaksanakan	%	100	100	100		
				1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100		
				a Perizinan yang dilaksanakan	Jumlah perijinan yang dilaksanakan	Jenis	1	1	100		
				b Sub Kegiatan, pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jumlah non perizinan yang dilaksanakan	Jenis	9	9	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		%	100	100	100		
				1 Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Terlaksananya penanganan Covid -19 di wilayah Kecamatan	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila , pelaksanaan UUD Negara RI th 1945	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila , pelaksanaan UUD RI 1945, Pelestarian Bhineka tunggal Ika serta pemertahankan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	keg	3	3	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945	%	100	100	100		
				1 Kegiatan ,Kegiatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945	keg	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan ,Sub Kegiatan ,pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945	keg	3	3	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	%	100	100	100		
				1 Kegiatan ,Fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan , Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	13	13	100		
				b Sub Kegiatan, Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	desa	13	13	100		
				c Kegiatan, Fasilitasi penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum	desa	13	13	100		
				a Sub Kegiatan, Fasilitasi penyelenggaraan	Jumlah desa yang terfasilitasi	desa	13	13	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				musrenbangdes	penyelenggaraan musrenbangdes						
				b Sub Kegiatan , pembinaan PKK , jumlah pembinaan UKS, jumlah pembinaan sosial masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan PKK, Pembinaan UKS, Pembinaan sosial masyarakat sosial	keg	3	3	100		
				c Sub kegiatan, desa yang terfasilitasi TKP2 Kdes, jumlah desa terfasilitasi program sembako	Jumlah desa yang terfasilitasi TKP2Kdes dan Program sembako	desa	13	13	100		
		22 Puring	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (SIUP Kecil, Rekom IMB, Rekom Izin Lingkungan)	jenis	3	3	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Izin Keramaian)	jenis	7	7	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya hubungan yang sinergi dengan aparat dan warga masyarakat di Wilayah Kecamatan PURING	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya sinergitas dengan aparat dan warga masyarakat di Wilayah Kecamatan PURING	%	100	100	100		
				b Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PURING	Terkoordinasikannya Penanganan Covid 19	bulan	9	9	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	keg	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desaa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	desa	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dok	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	dok	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	keg	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa yang di Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbangdes, Jumlah Kegiatn Pra Musrenbangcam, Jumlah Kegiatan Musrenbangcam	Desa Keg	16 2	16 2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Pemuda dan UKS , Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat, Jumlah Kegiatan Fasilitasi UKS	Keg	8	8	100		
				1 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa (Bansos Sembako) , Jumlah Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes	Keg	2	2	100		
		23 Rowokele	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah bulan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan	jenis	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	jenis	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase Terlaksannaya Koordinasi Penanganan Covid di tingkat Kecamatan Rowokele	persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksannaya Koordinasi Penanganan Covid di tingkat Kecamatan Rowokele	bulan	8	8	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksannaya Koordinasi Penanganan Covid di tingkat Kecamatan Rowokele	bulan	8	8	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terfasilitasinya Kegiatan kegiatan HUT RI	persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan rangkaian Peringatan HUT RI	kegiatan	1	1	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	desa	11	11	100		
				b Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang dikeluarkan	dokumen	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	desa	11	11	100		
				f Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen Pembinaan PKK, Jumlah dokumen Pembinaan Organisasi Kepemudaaan, Jumlah dokumen sosial Masyarakat	dokumen	3	3	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah dokumen fasilitas TKP2Kdes, Jumlah dokumen Fasilitas BPNT	dokumen	2	2	100		
		24 Sadang	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan Non Usaha yang dilaksanakan	Jenis	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Jenis	9	9	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Aparat dan Warga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sadang	Kegiatan	1	0	0	Refocusing anggaran	Diusulkan anggaran di tahun berikutnya
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penanganan Covid 19	Kegiatan	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	%	100	0	0		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian hari jadi Kebumen dan HUT RI	%	100	0	0	Adanya Covid 19 sehingga tidak dilaksanakan	Menunggu kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan PPKM

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	3	0	0	Adanya Covid 19 sehingga tidak dilaksanakan	Menunggu kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan PPKM
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	7	7	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Rakor	4	4	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan	Kegiatan	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ketertiban umum						
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitas kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Desa	7	7	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan desa(Pembinaan PKK,Sosmas,UKS dan BUMDes)	Kegiatan	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitas kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP 2 Kdes dan Rakor sembako)	Kegiatan	3	3	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dokumen	1	1	100		
		25 Sempor	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan fasilitas perizinan non usaha	jenis	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah bulan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan							
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Polri, TNI dan instansi vertikal	Keg	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Polri, TNI dan instansi vertikal	keg	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Kebumen	%	100	50	50		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Peringatan HUT RI dan HUT kabupaten Kebumen	Keg	2	1	50		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	Keg	2	1	50	Kegiatan dalam rangka HUT Kabupaten Kebumen tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19	Peringatan HUT Kabupaten Kebumen disaksikan secara virtual
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	desa	16	16	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah peserta	orang	48	48	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	pelatihan linmas						
				d Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam	keg	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pemberdayaan masyarakatnya	desa	16	16	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitas kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitas TKP2KDes)	keg	1	1	100		
		26 Sruweng	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan Non Usaha yang dilaksanakan	Jenis	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Jenis	9	9	100		
				B PROGRAM KOORDINASI	Prosentase Terselenggaranya	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Aparat dan Warga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sadang	Kegiatan	1	0	0	Refocusing anggaran	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penanganan Covid 19	Kegiatan	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselelnggaranya urusan pemerintahan umum	%	100	100	100		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	100		
				1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	keg	3	1	37	Adanya PPKM (Pandemi Covid 19)	Menunggu kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan PPKM

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi Desa dengan Indek Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	%	2	2	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	%	100	100	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	21	21	100		
				b Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	desa	0	0	0		
				2 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dok	1	1	100		
				a Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dok	2	2	100		
				b Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100		
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes	Desa	21	21	100		
					Jumlah kegiatan pra musrenbangcam	Keg	1	1	100		
					Jumlah kegiatan musrenbangcam	Keg	1	1	100		
				3 Fasilitasi Penyusunan Program dan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan	Keg	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)						
				a Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDesa)dan Dansos Sembanko)	Keg	1	1	100		
7	Kewilayahan	1 Kelurahan Kebumen		A Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah kegiatan musrenbangkel	Kegiatan	1	1	100		
				2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	presentase terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pekerjaan drainase(RT 04/ RW 7, RT 2/ RW 1 , Gg Cempaka RT 2/ RW 3,Jln Teratai RW 3 , RT 1/ RW 7 Jln Manggis, Jln sawo RW 5 , Jl Mangga RT 02/ RW7 ,Jl. sawo RT 02/ RW 7 , Jumlah paket pekerjaan rabat beton jalan RT 02/ RW 3, , RT 05/ RW	Paket	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7, Rt 03/ RW 7), Jumlah Paket Pekerjaan Pembuatan Gorong gorong air Limbah (RT 02/ II)						
				b Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Fasilitas TKP2K, Jumlah Kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, Jumlah Posyandu yang mendapat fasilitas PMT, Jumlah Kegiatan Fasilitas Bank sampah Kelurahan, Jumlah Unit RTLH P. Yudianto RT.3/5, P. Heru Kusumadi RT.6/5, P. Nanang Setiawan RT.6/5, B. Rukimah RT.6/5, P. Tasmin RT.2/2, P. Sugito RT.2/2., Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	Kegiatan Kelompok Paket	5 7 6	5 7 6	100		
				c Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	jumlah dokumen evaluasi pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Dokumen	3	3	100		
				B Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan penyediaan operasional dan akomodasi bagi para petugas PPKM Mikro dan Jogo Tonggo di Wilayah Kelurahan Kebumen	Kegiatan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	jumlah kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan bagi keluarga yang positif Covid-19 dan pencegahan Covid-19 di Wilayah Kelurahan Kebumen	Kegiatan	1	1	100		
		2 Kelurahan Karanganyar		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel	Bulan	1	1	100		
				b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan jalan (pengaspala jalan), rabat beton dan saluran irigasi	Bulan	4	4	100		
				c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelatihan pemadaman kebakaran, menjahit, kewirausahaan, pengolahan sampah, hidroponik, seting gambar, leaflet dan	Paket	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					jumlah pengadaan APE PAUD						
				d. Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kelurahan	Dokumen	1	1	100	-	
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Bulan	8	8	100		
				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Bulan	8	8	100		
		3 Kelurahan Gombong		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Peningkatan/Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel	Kegiatan	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	Paket	6	5	83	Kode rekening belanja bansos jamban di DPA tidak sesuai Perbup jadi tidak sinkron jadi tidak dilaksanakan/diserap	Untuk lebih dicermati antara DPA dan Perbup supaya sama dan Kegiatan tersebut bisa diusulkan lagi lewat dinas terkait di tahun kedepan
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan	Dokumen	5	5	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penanganan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase penanganan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan penanganan posko PPKM Kelurahan Gombong	Bulan	9	9	100		
				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	Jumlah bulan penanganan posko PPKM Kelurahan	Bulan	9	9	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Tokoh Masyarakat	Gombong						
		4 Kelurahan Wonokriyo		A PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan pelaksanaan sinergitas dengan Kepolisian Negara , TNI dan Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan	Bulan	12	12	100		-
				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam penanganan covid 19	Orang	85	85	100		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	%	100	74,65	75		-
				1 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	74,65	75		-
				a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pekerjaan fisik yang tertangani	unit / paket / lokasi	26	26	100		-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga/pokmas/unit/K RTM yang terfasilitasi	lembaga/pokmas/unit /KK RTM	18	9	50	pekerjaan perbaikan RTLH 7 unit dan jambanisasi 10 unit tidak bisa terlaksana karena masih adanya rincian / rekening belanja dalam DPPA tidak sesuai dengan Perbup Bansos	mengusahakan usulan penerbitan SK Bupati tetapi tidak dikabulkan
				c Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Dokumen	5	5	100		
		5 Kelurahan Plarangan		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian nilai survey kepuasan masyarakat di Kelurahan; Terpeliharanya fasilitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan; Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah; Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan Desa	% Dok %	100 3 100	100 3 83	100 100 83		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	94	Terdapat kegiatan Dalam Rangka HUT RI dan Hari Jadi tidak dapat diserap karena terkendala pandemi Covid-19. Serta tidak diperbolehkan mengumpulkan masa.	1 Menunda dan menunggu peraturan/ kebijakan pemda untuk mengatur hal kerumunan masa supaya kegiatan tetap terlaksana. (Pada awal tahun 2021 belum muncul kebijakan tersebut)
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pra Musrenbangkel; Jumlah Kegiatan Musrenbangkel; Jumlah Dokumen RKP Kelurahan yang Disusun	Kegiatan Dokumen	2 1	2 1	100		
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi; Jumlah Unit Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Unit	10	10	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan; Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes/Kel; Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI dan Hari Jadi	Kegiatan	6	5	83%	1 Terdapat kegiatan Dalam Rangka HUT RI dan Hari Jadi tidak dapat diserap karena terkendala pandemi Covid-19. Serta tidak diperbolehkan mengumpulkan masa.	1 Menunggu peraturan/ kebijakan pemda untuk mengatur hal kerumunan masa supaya kegiatan tetap terlaksana. (Pada awal bulan tahun 2021 belum muncul kebijakan tersebut)
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertibann Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertila; se Kecamatan	Kegiatan	3	3	100		
				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	3	3	100		
		6 Kelurahan Selang		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Presentase Terselenggaranya Program	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbangkel Jumlah kegiatan pra musrenbangkel	Kegiatan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumla tenaga pengadministrasi keuangan dan umum Jumlah paket pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan (PAUD) Jumlah unit pengdaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarpras transportasi (jalan pemukiman)	orang paket ruas	2 1 4	2 1 4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Fasilitas TKP2KKel Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK Jumlah Kegiatan Pembinaan RT/RW dan LKMK Jumlah Pelaksanaan HUT RI Jumlah Pengelolaan Kegiatan Ketentraman Ketertiban Umum (Linmas) Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Jumantik dan Gizi Masyarakat) Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Posyandu yang mendapat Fasilitas PMT Jumlah Paket Sarpras Olahraga	kegiatan lokasi meja tenis	8 10 5	9 10 0	90	karena harus ada SK dari Bupati	diusulkan/dibuatkan SK dari Bupati
				d Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	dokumen	5	5	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Terselenggaranya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal; se Kecamatan	kegiatan	1	1	100		
				b Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kegiatan	1	1	100		
		7 Kelurahan Bumirejo		A Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan yang Berperan dalam pembangunan Desa	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100		
				a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pramusrenbangkel dan musrenbangkel	Kegiatan	2	2	100		
				b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Kegiatan	15	15	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitas TKP2KDes/Kel,Jumlah kegiatan forum kesehatan kelurahan,Jumlah Kegiatan Kepemudaan,Linmas, Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan,, PKK,Jumlah pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan	8	8	100		
				d Evaluasi Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Sarpras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Dokumen	1	1	100		
				B Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Satgas tindak Covid - 19						
				2 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Satgas tindak Covid - 19						
				a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Satgas Covid-19 dan warga masyarakat yang Terkena Covid-19	Kegiatan	12	12	100		
				b Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Satgas Covid-19 dan warga masyarakat yang Terkena Covid-19	Warga	100	100	100		
		8. Kel Panjatan		A PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANA DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Terselenggaranya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Bulan	8	8	100		
				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Bulan	8	8	100		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pemeberdayaan Masyaraakat	Presentase Terselenggaranya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel	Kegiatan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlihatnya saluran darinase dan terpeliharanya jalan	Kegiatan	7	6	85	RTLH tidak dapat terealisasi karena kesalahan rek	sudah berkonsultasi ke Bag Hukum dan BPKAD

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksana kegiatan pembinaan linmas,dan lembaga kemasyarakatan,pembi naan PKK,dan terlaksana kegiatan posyandu	Bulan	12	12	100		
		9. Kelurahan Panjer		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	-	-
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Terselenggaranya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	-	-
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbangkel Jumlah kegiatan pra musrenbangkel	Kegiatan	1	1	100	-	-
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pengaspalan di Jalan Sriti RT 001 RW 005 (P=110 M) Jumlah Paket Pengaspalan di Jalan Sriti RT 002, 003, 004 RW 003 (P=240 M) Jumlah Paket Perbaikan Rabat Beton/Jalan Setapak RT 003 RW 002 (P=200 M) Jumlah Paket Perbaikan Rabat Beton/Jalan Setapak RT 003 RW 007 (P=200 M)	Paket	4	4	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Pengadaan LPJU di wilayah Kelurahan Panjer						
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang terlaksana Jumlah Kegiatan PKK yang terlaksana Jumlah Kegiatan Revitalisasi Posyandu yang terlaksana Jumlah pendataan penduduk miskin di wilayah kelurahan panjer Jumlah pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum Jumlah pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Jumlah pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan Kebudayaan Jumlah peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan Jumlah Petugas Linmas Kelurahan Panjer yang terlatih Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang terlaksana	Kegiatan	10	10	100	-	-
				2 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	%	100	100	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jumlah Pertemuan Satgas PPKM MIKRO Kelurahan Panjer yang tercukupi	Kali	4	4	100	-	-
				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pertemuan Satgas JOGO TONGGO dan Pemberian Bansos Covid-9 Kelurahan Panjer yang tercukupi	Kali	6	6	100	-	-
		10 Kelurahan Tamanwinangun		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pra musrenbangkel dan musrenbangkel	kegiatan	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Paket	4	4	100		
					Jumlah KK miskin penerima bantuan jamban keluarga	Unit	4	4	0	refokusing anggaran untuk penanganan	Diusulkan kembali di tahun

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										covid 19	berikutnya
					Jumlah Unit pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Ruas	7	7	100		
					Pembangunan talud jalan RT 03 RW 01 Kelurahan Tamanwinangun (126 juta)	Paket	1	1	100		
					Rabat Beton / Jalan RT. 05 / RW. 02 Kelurahan Tamanwinangun Kec. Kebumen (50 juta)	Meter	200	200	100		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	Unit	4	4	0	refokusing anggaran untuk penanganan covid 19	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pos posyandu yang perlu peningkatan gizi (10 posyandu)	Kegiatan	1	1	100		
					Jumlah posyandu yang mendapat pelayanan kesehatan	Kelompok	12	12	100		
					Jumlah Petugas Pengelola Sarana dan Prasarana Persampahan	Orang/Bulan	24	24	100		
					Jumlah pengadaan perlengkapan olahraga	Paket	1	0	0	refokusing anggaran untuk penanganan covid 19	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
					Jumlah kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI dan Hari Jadi	Paket	1	1	100		
					Jumlah pelatihan pengendalian keamanan dan keamanan lingkungan	Kegiatan	2	2	100		
					Jumlah kegiatan	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					fasilitasi TKP2KDes/Kel						
					Jumlah pembinaan kelembagaan RT/RW	Kali	5	5	100		
					Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Kali	1	1	100		
					Jumlah kegiatan pembinaan PKK	Kali	3	2	66	refokusing anggaran untuk penanganan covid 19	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
				d Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Dokumen	2	2	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Penyediaan Operasional dan Akomodasi bagi para Petugas PPKM Mikro dan Jogo Tonggo di Wilayah Kelurahan Tamanwinangun	Kegiatan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan bagi keluarga yang positif Covid 19 dan pencegahan Covid 19 di Wilayah Kelurahan Tamanwinangun	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11 Kelurahan Jatiluhur		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		
				1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		
				a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel	Keg	2	2	100		
				b. Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan	Terlihatnya saluran drainase dan terpeliharanya jalan	Paket	3	3	100		
				c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksana kegiatan pembinaan linmas,dan lembaga kemasyarakatan,pembinaan PKK,dan terlaksana kegiatan posyandu dan verpal data kemiskinan	Keg	13	13	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum							

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Kegiatan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Kegiatan	1	1	100		

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

- 1) Refocusing anggaran dan pembatasan aktivitas karena adanya pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
- 2) Untuk Kecamatan Ayah belum bisa cetak KTP sendiri;
- 3) Di Kelurahan Gombong terdapat Kode rekening belanja bansos jamban di DPA tidak sesuai Perbup jadi tidak sinkron sehingga tidak dapat dilaksanakan.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Beberapa kegiatan dilaksanakan secara virtual, kemudian untuk Kegiatan yang terkena refocusing anggaran, akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya;
- 2) Untuk dapat dicukupi peralatan cetak KTP;
- 3) Mencermati antara DPA dan Perbup supaya sinkron dan mengusulkan kembali di tahun berikutnya.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 98,12% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

e. Capaian Kinerja Urusan

Selama tahun 2020-2021 kinerja pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan cenderung mengalami peningkatan. Secara umum gambaran pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan sampai tahun 2021 masuk dalam kategori baik.

Tabel 3. 92 Perkembangan Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019-2021

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021
1	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan (%)	B	B	B
2	Capaian peningkatan pelayanan kelurahan (%)	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Kebumen, 2021

3.1.8. Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila;
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; dan
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum sebagai berikut :

Tabel 3. 93 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol		A PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Banyaknya masyarakat yang sadar akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	%	100	89	89		
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan peningkatan penguatan penghayat ideologi pancasila bagi aparatur elemen masyarakat	Kegiatan	22	17	89		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan penghayatan ideologi pancasila	Kegiatan	22	17	77	Karena pandemi sehingga jumlah paskibraka tidak sesuai dengan rencana (24 orang) sehingga pada rekening makan minum, perjalanan dinas (transport), pakaian dan kelengkapan serta rangkaian HUT tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Merencanakan kembali target tersebut pada tahun yang akan datang dan sudah tidak diberlakukan PPKM karena pandemi covid sehingga rangkaian HUT dapat dilaksanakan
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ideologi wasbang	Orang	150	175	117		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum	%	70	0	0	Tahun 2021 tidak ada Pemilu, Anggaran pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemeritahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah serta pemantauan situasi politik yang di gunakan untuk sosialisasi forum diskusi politik dan bantuan keuangan parpol yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										masyarakat/ penduduk dalam proses pemilu	
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bantuan keuangan partai yang memiliki kursi di DPRD	orang, organisasi	236	259	110		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah pengurus parpol yang mengikuti Bimtek bantuan keuangan partai politik yang mempunyai keterwakilan di DPRD Kab. Kebumen dan LPJ bantuan keuangan parpol	Orang	27	0	0	Anggaran di refocusng, setelah perubahan APBD dikembalikan namun dialihkan pada pendidikan politik	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah kuota keterwakilan 30% anggota dewan dan pengurus parpol perempuan	Orang	100	100	100		
					Jumlah orang yang tebina mengenai pendidikan politik di Kabupaten Kebumen	Orang	100	150	150		
					Jumlah Partai Politik yang menerima bantuan keuangan (Nasdem, PDIP, Golkar, PKB, PPP, PKS, Gerindra, PAN, Demokrat)	organisasi	9	9	100		
				C	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%	100	100	100		
				1	KegiatanPerumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Orang	200	200	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	125	125	100		
					Jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang	Orang	75	75	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					mengikuti pembinaan						
			sda	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan	kecamatan	0	0	0	Adanya refocusing anggaran	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Banyaknya masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba dan ikut berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba	Orang	100	100	100		
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya kegiatan forum diskusi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah melalui FKUB dan FPBI	Orang	590	590	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB	Orang	50	50	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah orang yang memahami tentang rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Orang	50	50	100		
					Jumlah orang yang mengikuti diskusi mengenai wawasan kebangsaan	Orang	90	90	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelajar, ASN, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Narkoba dan pemilihan duta anti narkoba	Orang	400	400	100		
				E PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Banyaknya masyarakat yang paham potensi konflik dan langkah penyelesaiannya	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Banyaknya masyarakat yang paham potensi konflik dan langkah penyelesaiannya	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik	Jumlah paket rakor tim kewaspadaan dini pemerintah daerah kabupaten kebumen, rakor kamtibmas, evaluasi kamtibmas	Paket	1	1	100		

b. Permasalahan

Karena pandemi sehingga jumlah Paskibraka tidak sesuai dengan rencana sehingga pada rekening makan minum, perjalanan dinas, pakaian dan kelengkapan serta rangkaian HUT tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Merencanakan kembali target pada tahun yang akan datang saat sudah tidak diberlakukan PPKM karena pandemi covid sehingga rangkaian HUT dapat dilaksanakan

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan pemerintahan umum diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 77,8 % atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 97,4%. Terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 79,87% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Capaian kinerja urusan unsur pemerintahan umum dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 94 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	%	15,3	90	86,95	96,62	90
Capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam proses pemilu	%	64	70	0	0	70
Cakupan rehabilitasi kasus narkoba	%	10,71	17,95	13,05	72,70	17,95

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Kebumen 2021

Faktor penyebab belum berhasilnya pencapaian sasaran tersebut diatas antara lain:

- 1) Belum maksimalnya jumlah ormas, LSM dan masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat, namun akan dilaksanakan upaya pencapaian pada tahun berikutnya

dengan melaksanakan sosialisasi/pembinaan secara maksimal kepada ormas/LSM dan masyarakat;

- 2) Pemilu telah dilaksanakan tahun 2020. Anggaran pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/ pemilu kepala daerah serta pemantauan situasi politik yang ada digunakan untuk sosilalisasi forum diskusi politik dan bantuan keuangan parpol yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilu;
- 3) Semakin maraknya penyalahgunaan narkoba baik di kalangan masyarakat umum maupun pelajar yang sudah sampai di tingkat SLTP, usaha yg dapat dilakukan untuk menekan antara lain kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) merupakan usaha preventif yang dilaksanakan Badan Kesbangpol namun peserta belum secara maksimal sampai pada elemen masyarakat paling bawah, tingkat SLTP dan SLTA khususnya.

3.1.9. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Pada Bab sebelumnya telah disebutkan lima prioritas pembangunan daerah tahun 2021 yang merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Untuk mengukur ketercapaiannya maka telah dirumuskan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Capaian IKU Daerah Tahun 2021 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 95 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,2	13,34	101,06%	13,20	101,06%
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,2	7,54	104,72%	7,20	104,72%
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	63,39	66,65	105,14%	63,39	105,14%
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	65,38	62,84	96,12%	65,38	96,12%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01	73.5	100,67%	73,01	100,67%
		6. Angka Kematian Ibu	Rasio	68	201,60	33,77%	68/ 100.000 KH	33,77%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		7. Angka Kematian Bayi	Rasio	10,5	4,67	138,71%	10,5	138,71%
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100	100,00%	100%	100,00%
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagama-an	%	37,65	16,04	157,40%	37,65%	157,40%
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	Kasuprasa rans	500	65	769,23%	500 kasus	769,23%
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbu-han ekonomi	%	6	3,71	61,83%	6	61,83%
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp.000	25179,48	21780,00*	91,46%	25.179,48	91,46%
		13. Rasio/ Indeks Gini	Rasio	0,21	0,21	100%	0,21	100%
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Kawasan	6	5	83,33%	6 Unit	83,33%
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	6	25,70	428,33%	6	428,33%
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	19,69	13,18	66,94%	19,69	66,94%
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	62,88	75,52	120,10%	62,88	120,10%
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,01	74,45	100,59%	77,5	96%
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	15,45	17,83	84,60%	15,45	84,60%
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	1,97	6,03	-106,09%	1,97	-106,09%
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	83,87	85,29	101,69%	83,87	101,69%
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	99	100	101,01%	99	101,01%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
	kesehatan							
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraa n pemerintahan daerah	Nilai	B	B	100%	B 3	100%
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B	100%	B 60	100%
		25. Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP*	100%	WTP	100%
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	80	52,43	65,54%	80%	65,54%

Sumber: BAPPEDA Kab. Kebumen, 2021

Capaian IKU Daerah sampai dengan Tahun 2021 (Tahun terakhir RPJMD Kab. Kebumen 2016-2021), sebanyak 16 IKU Daerah tercapai, 10 IKU daerah tidak tercapai. 10 IKU daerah tidak tercapai adalah Capaian prestasi pemuda dan olahraga, Angka Kematian Ibu, Cakupan penanganan kasus-kasus pelanggaran norma-norma keagamaan, Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita Penduduk, Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi, Persentase peningkatan kunjungan wisata, Angka kemiskinan, Angka pengangguran, dan Persentase PNS dan pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan BAZ.

Berikut penjelasan ringkas ke 26 indikator tersebut.

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Pada sasaran ini pencapaian nilai sasaran sudah mencapai target yang ditetapkan tahun 2021 atau capaian kinerja 101,06% kategori Sangat Tinggi, dengan kondisi target Angka Harapan lama sekolah tahun 2021 adalah 13,2 tahun dan realisasi capaian 13,34 tahun. yang artinya sacara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,34 tahun atau setara dengan Diploma I.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah Tahun 2021

pendidikan formal (BPS:2019). RLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Pada indikator sasaran ini pencapaian nilai rata-rata lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 104,72% atau kategori Sangat Tinggi. Rata-rata Lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 7,54 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 7,2 tahun.

Keberhasilan peningkatan Angka RLS adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan Formal maupun Nonformal dimana akses pendidikan nonformal untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas pada kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C.

Upaya yang perlu mendapat perhatian adalah layanan pendidikan NonFormal, karena diperlukan koordinasi lintas sektor lebih lanjut di tingkat Kabupaten terhadap target peningkatan IPM terutama untuk penduduk usia 15 tahun keatas yang masih banyak tingkat kelulusan pendidikannya baru di tingkat SMP, SMA/SMK bahkan sebagian baru lulus jenjang SD.

3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dengan rumus $((\text{Prosentase APS (Angka Partisipasi Sekolah)} + \text{Prosentase Sekolah Terakreditasi A})/2)$. Berdasarkan perhitungan rumus indikator Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dapat disimpulkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 105,14%.

4. Capaian prestasi pemuda dan olah raga

Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga sampai dengan triwulan IV tahun 2021 adalah 58,25% dari target 65,38% atau tercapai 89,09%. Prestasi olahraga Kabupaten Kebumen cenderung stagnan karena tidak ada event olahraga yang dilaksanakan dan pelaksanaan lomba banyak menggunakan virtual serta berkurangnya cabang olah raga yang dipertandingkan selama pandemi Covid-19. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan-kegiatan banyak dihentikan atau tidak terlaksana, Sementara pemuda Kabupaten Kebumen mulai mencoba memanfaatkan peluang di tengah perkembangan teknologi dan informasi, serta industri kreatif yang berkembang cukup pesat. Peningkatan jumlah wirausaha muda diharapkan akan dapat mengurangi angka pengangguran usia produktif di Kabupaten Kebumen dan secara luas mampu menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Kebumen.

5. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun. Pada indikator sasaran angka harapan hidup dari target yang ditetapkan sebesar 73,01 dengan realisasi sebesar 73,5 atau capaian kinerja sebesar 100,67% dengan kriteria Sangat Tinggi.

6. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2021 mencapai 201,6 dari target 68 atau tercapai 33,73%. Capaian Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan IV tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan pelayanan di bidang kesehatan, hal ini dikarenakan dengan adanya pandemi covid-19 sehingga semua persalinan lebih diarahkan pada tempat rujukan (rumah sakit).

7. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Tahun 2021 Kabupaten Kebumen berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Angka Kematian Bayi tahun 2021 ditargetkan 10,5/1000 KH, terealisasi 4,67/1.000 KH atau capaian kinerja 138,71% kategori Sangat Tinggi.

8. Angka Melek huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah

Indikator Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah merupakan perbandingan Jumlah Siswa Lulus Sekolah bisa membaca Al-quran (JSLB-AI) dengan Jumlah Siswa Lulus Sekolah beragama islam (JSLS-Is) dikalikan seratus persen.

Target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja sangat tinggi. Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran. Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran.

9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Indikator kinerja Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diperoleh dari rumus perhitungan Capaian Penurunan

(Rehabilitasi Kasus Narkoba tahun n+ Penemuan Kasus Baru HIV tahun n + Kasus Pertikaian Agama tahun n).

Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diartikan bahwa kasus yang ditemukan dan ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerjanya. Cakupan penanganan kasus-kasus pelanggaran norma-norma keagamaan sampai dengan tahun 2021 tercapai 33,36%* dari target 37,65% atau tercapai 88,61%. Peningkatan kasus HIV, kasus narkoba dan kasus pertikaian antar agama di Kabupaten Kebumen dikarenakan masih adanya masyarakat yang kurang memahami gejala, dampak dan cara penanganan terhadap kasus HIV, kasus narkoba dan kasus pertikaian antar agama.

10. Penurunan kasus pelanggaran hukum yang ditangani.

Indikator Kasus pelanggaran hukum diperoleh dari jumlah laporan masyarakat dan temuan petugas dalam menegakkan perda/ perkada yang telah dilakukan pembinaan. Adapun capaian kinerja kasus pelanggaran hukum tahun 2021 sebesar 769,23%.

11. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 tercapai 3,71% dari target 3,91% atau tercapai 61,83%. Meskipun sempat terjadi kontraksi -1,46% pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tumbuh positif hingga 3,71% karena adanya pemulihan ekonomi. Hal ini sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 sebesar 3,7%.

12. Pendapatan per Kapita Penduduk

Pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2022 tercapai 21.780 (ribuan) dari target 25.179,48 atau tercapai 91,46%. Total kelas menengah atas Kabupaten Kebumen pada Maret 2020 adalah sebanyak 157.415 orang atau 13,12% dari jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Maret 2020 sebanyak 1.199.968 orang. Turunnya rata-rata pendapatan dari kelas menengah atas Kabupaten Kebumen pada Maret 2020 yang ditunjukkan dengan jumlah terbesar kelas menengah atas berada di desil ke-8 dari semula Maret 2019 jumlah terbesar berada di desil ke-9 menunjukkan adanya kemungkinan bahwa akibat pandemi Covid-19, kelas menengah atas bisa mengalami penurunan pendapatan, kekayaan dan jatuh ke desil ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 dan bahkan bisa menjadi miskin (sumber:inikebumen.net).

13. Rasio/Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar

antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indikator kinerja ketigabelas yaitu Rasio/Indeks Gini pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 0,21.

Rasio Gini di Kabupaten Kebumen menunjukkan penurunan yang dapat diartikan bahwa ketimpangan yang ada semakin menurun dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, walau ketimpangan yang ada masih dalam cakupan yang dapat dianggap rendah, situasi ini masih tetap dapat ditindaklanjuti untuk semakin menurunkan Rasio Gini melalui program/kegiatan yang lebih berpihak pada masyarakat yang berpendapatan rendah, dimana berbagai macam program tersebut terimplementasi pada program dan rencana kerja tiap Perangkat Daerah.

Capaian kinerja indikator rasio/ indeks gini telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja Sangat Tinggi, capaian ini juga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan adanya Indeks Gini yang rendah, diharapkan bahwa upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan tidak berimbas kepada segelintir golongan, namun bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Meskipun tingkat ketimpangan kita lebih rendah dibandingkan nasional maupun provinsi, namun upaya-upaya pemerataan harus tetap dilakukan, minimal adalah untuk menjaga agar ketimpangan tidak semakin melebar. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target melalui berbagai program pembangunan yang menysasar penduduk berpendapatan rendah. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh peran dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam penerapannya diperlukan adanya sinergitas baik di internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Kurangnya sinergitas ini yang seringkali menjadi kendala yang dapat mengurangi keefektifan program. Bila kendala ini dapat ditangani, maka diharapkan target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD akan dapat dicapai.

14. Terbangunnya Kawasan Pembangunan Ekonomi

Rumus pencapaian Indikator Sasaran ini adalah Jumlah Kawasan Industri yang terbangun + Jumlah Kawasan Perdesaan yang Terbentuk. Target dari Indikator terbangunnya kawasan industri merupakan target yang menunjukkan progress, karena pada tahun 2020 sudah terbangun 5 (lima) kawasan pedesaan

sehingga capaian Kinerja 100% atau kriteria capaian Baik. Kawasan perdesaan dibentuk sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan Keputusan Bupati Kebumen nomor : 410/178/KEP/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen berbasis potensi sumberdaya wilayah, antara lain kawasan desa wisata, kawasan anyaman pandan, kawasan gula semut, kawasan batik dan kawasan peternakan sapi terpadu (5 kawasan). Tujuan pembentukan kawasan perdesaan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan target pada periode akhir RPJMD 2016-2021 sebanyak 6 kawasan (5 kawasan pedesaan, 1 Kawasan Industri) yaitu :

- a. Kawasan pantai pesisir, terdiri dari Desa Karangbolong Kecamatan Buayan, Desa Pasir, Sрати, Karangduwur, Argopeni, Ayah, Candirenggo Kecamatan Ayah;
- b. Kawasan anyaman pandan, terdiri dari Desa Grenggeng, Wonorejo, Pohkumban Kecamatan Karanganyar, Desa Karanggayam, Penimbun, Kecamatan Karanggayam;
- c. Kawasan batik, terdiri dari Desa Jemur Kecamatan Pejagoan dan Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen;
- d. Kawasan peternakan sapi terpadu, terdiri dari Desa Tanggulangin dan Jogosimo Kecamatan Klirong; dan
- e. Kawasan gula semut, terdiri dari Desa Jladri, Wonodadi, Rangkah, Geblug, Pakuran Kecamatan Buayan.

Tetapi adanya rasionalisasi anggaran APBD Kabupaten Kebumen sebagai salah satu dampak adanya wabah COVID 19, anggaran untuk kawasan perdesaan ikut dirasionalisasi. Dari sisa anggaran setelah dirasionalisasi tersebut hanya kegiatan operasional pendampingan bantuan keuangan untuk desa penyangga kawasan, sedangkan kegiatan yang lainnya tidak dapat dilaksanakan.

Tahun 2015 merupakan tahap awal perencanaan pembangunan Kawasan Industri berupa rapat koordinasi dengan OPD terkait, ditindak lanjuti Pada Tahun 2016 tercapai 20% yaitu Pembuatan Rencana Induk, Studi Kelayakan, pembentukan Surat Keputusan penetapan lokasi Kawasan Industri, Tahun 2017 tercapai 20% untuk Konsultasi, Penyusunan BED (Basic Engineering Design, Tahun 2018 tercapai 20% Koordinasi dan konsultasi ke Pemprov Jateng, Kemenperin, Kemendagri, Bappenas dan BKPM, pendataan lahan milik masyarakat. Tahun 2019 tercapai 20% untuk kegiatan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Industri bersama Disperindag Prov. Jateng,

Pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tahun 2020 capaian 20% dengan melakukan Penilaian Aset, Lelang Pengelola Kawasan Industri dan Kontrak Kerjasama dengan Pihak Pengelola Kawasan Industri

15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN.

Indikator sasaran ini diukur dengan membandingkan Nilai atau Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n - Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun $n-1$ dengan Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun $n-1$ dikalikan 100%. Untuk Capaian kinerja terhadap target di Tahun 2021 adalah sebesar 428,33% .

16. Meningkatnya kunjungan wisatawan.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan kunjungan wisata. Adapun rumus perhitungannya adalah Jumlah kunjungan Wisatawan tahun n - Jumlah kunjungan wisatawan tahun $(n-1)$ dibagi Jumlah kunjungan tahun $(n-1)$ x 100. Jumlah kunjungan diambil dari obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan yang bukan dikelola Pemerintah Daerah (swasta/desa-desa wisata). Hal ini dikarenakan dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan secara fluktuatif per tahunnya, mulai tahun 2016 Pemerintah Daerah telah melakukan intervensi terhadap pengelolaan obyek wisata yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah. Wujud intervensi tersebut dengan melakukan pembinaan manajemen pengelolaan kepada kelompok sadar wisata/stakeholder pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga berusaha membantu masyarakat membangun wisata mandiri yakni dalam bentuk pembinaan dan pengembangan obyek wisata rintisan yang akan dibangun oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha menciptakan *multiplier effect* dari usaha pariwisata yang dibangun masyarakat dengan tujuan agar pengunjung datang kembali ke Kabupaten Kebumen sehubungan banyaknya obyek wisata pilihan.

Persentase peningkatan kunjungan wisata dengan target 19,69 pada tahun 2021 tercapai 13,18%* atau tercapai 66,94%. Hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- a. Pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan tingginya kasus serta bervariasinya jenis kasus Covid-19
- b. Adanya pandemi covid 19 sehingga beberapa momentum libur hari besar yang berpotensi mendatangkan kunjungan wisatawan diterapkan pembatasan aktivitas oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19

17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah.

Rumus perhitungan indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 menggunakan penjumlahan antar indikator pendukung yaitu (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik) + (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik) + (Rumah tangga pengguna air bersih) dibagi 3.

Dikarenakan Cakupan jaringan listrik rumah tangga menjadi Kewenangan Propinsi sehingga Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah dihitung dari Prosentase capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik , Prosentase capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik, prosentase capaian cakupan pelayanan air bersih dibagi tiga. Untuk capaian terhadap target di tahun 2021 adalah sebesar 120,10%.

18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target IKLH yang ditetapkan Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 74,01, realisasi mencapai 74,45 dengan prosentase capaian sebesar 100,59% atau kategori capaian kinerja sangat tinggi.

19. Angka Kemiskinan.

Kinerja penanggulangan kemiskinan dalam kurun waktu 2017-2019 cukup baik. Namun, adanya pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Sementara itu, pada Tahun 2020-2021 terus mengalami kenaikan angka kemiskinan dari 17,59% menjadi 17,83% atau 212,90 (ribu jiwa) dari jumlah penduduk miskin. Pandemi COVID-19 yang terjadi selama kurun waktu 2020 sampai dengan sekarang salah satunya berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Adapun prioritas untuk mencapai sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui beberapa hal, sebagai berikut:

1. Mempertahankan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
2. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Pelestarian pengembangan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan sosial;
4. Pemantapan kemampuan penanganan masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka efisiensi distribusi pangan yang menjamin agar rumah tangga miskin dan rawan pangan dapat menjangkau kemandirian pangan; dan

6. Kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi seimbang, keamanan dan kehalalan pangan.
7. pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil, petani dan kegiatan ekonomi lainnya .

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, beberapa hal yang telah yang telah disusun sebagai upaya-upaya terobosan, antara lain :

1. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan PenanggulanganKemiskinan.
2. Adanya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Pendataan Penduduk Miskin beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun2015.
3. Pembentukan Kelembagaan TKPK (Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk melalui Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/412/KEP/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen yang telah dirubah sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/249 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen. Keputusan tersebut telah diganti dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/123 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen;

20. Angka pengangguran.

Perhitungan angka pengangguran diperoleh dengan menggunakan rumus jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja (Penganggur terbuka) dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100% dalam satu tahun.

Angka Pengangguran dengan target 1,97 pada tahun 2021 tercapai 6,03 atau 32,67%. Hal ini disebabkan karena:

- a. Pandemi Covid-19 yang masih ada hingga saat ini berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
- b. Minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Kebumen dibandingkan dengan tingginya jumlah Angkatan kerja

Upaya/peran nyata Kabupaten Kebumen dalam menurunkan angka pengangguran pada tahun 2021 antara lain:

1. Mengurangi efek pengangguran terbuka dengan mengadakan kegiatan padat karya yang memberikan pekerjaan sementara kepada penganggur;

2. Memberikan bantuan UMKM bagi yang terdampak covid 19, sehingga dapat bertahan di masa pandemic dan diharapkan dapat tumbuh dan menjadi umkm naik kelas membuka lapangan kerja;
3. Memfasilitasi pengantar kerja dalam dan luar negeri dimana kantong-kantong penerimaan tenaga kerja masih banyak yang diluar daerah dan luar negeri;
4. Memberikan pelatihan eks imigran sehingga memiliki ketrampilan wirausaha baru, diharapkan dengan itu mereka dan berusaha dan membuka lapangan kerja dan tidak kembali menjadi pekerja imigran.

21. Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik

Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik dihitung dari (Prosentase gedung Pendidikan Anak Usia Dini (dalam kondisi baik+Prosentase gedung Sekolah Dasar)/sederajat dalam kondisi baik+Prosentase gedung Sekolah Menengah Tingkat Pertama /sederajat dalam kondisi baik) dibagi tiga.

Apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik telah mencapai 101,69%. Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah mempersiapkan perencanaan dan data awal terhadap kebutuhan sarana prasarana sekolah dan kebutuhan kantor serta terhadap perencanaan proses pengadaan pada tahun berikutnya, sehingga target yang diharapkan pada akhir tahun RPJMD 2016-2021 dapat tercapai.

22. Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam kesehatan. Tahun 2021 target indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan sebesar 99% dan realisasi sebesar 100% atau capaian kinerja 101,01% dengan kriteria capaian kinerja Sangat Tinggi. Indikator ini dilihat dari Dilihat dari tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bahwa indikator semua puskesmas sudah tersedia obat minimal 40 item obat dan 5 item vaksin yang tersedia di Puskesmas, tingkat pelayanan kegawatdaruratan bahwa untuk semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah mampu mengatasi pasien dengan gawat darurat, dan untuk tingkat mutu pelayanan kesehatan bahwa semua Puskesmas sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan karena dari total 35 Puskesmas sudah dilakukan penilaian akreditasi tingkat Nasional.

23. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

merupakan hasil penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun n-1, Realisasi kinerja berdasarkan formula Indikator Kinerja Kunci untuk Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Nilai EKPPD Target yang ingin dicapai adalah nilai B atau Tinggi. Nilai EKPPD disampaikan

setelah penilaian oleh Tim Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya. Nilai EKPPD dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Status dan Kinerja Pemerintahan Daerah. Realisasi Nilai EKPPD tahun 2021 didasarkan pada Nilai EKPPD tahun 2018 sebagaimana Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 2020 dengan nilai 3,3226 atau tercapai dengan realisasi sebesar 110,75% atau dengan capaian kinerja kategori Sangat Baik.

24. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil penilaian Evaluasi dari Kemenpan dan RB. Dikarenakan sampai dengan laporan ini dibuat Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen belum keluar maka nilai masih berdasarkan nilai pada tahun 2019, dengan realisasi penilaian 61,85 yaitu capaian kinerja sebesar 103,08% dengan kategori Sangat Baik.

Adapun rekomendasi LHE SAKIP antara lain :

- a. Melakukan reuiu secara berkala atas Renstra Perangkat daerah terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja;
- b. Melakukan integrasi aplikasi sim perencanaan, sim KUA PPAS, SIMDA Keuangan yang telah ada dengan aplikasi e-sakip sehingga tercipta sistem informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja;
- c. Memanfaatkan cascading kinerja dalam menyusun perjanjian kinerja pada tingkat penanggungjawab program dan kegiatan serta melakukan casecading kinerja organisasi setiap perangkat daerah hingga pada level individu;
- d. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
- e. Meningkatkan kualitas evaluasi atas implementasi AKIP dan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat, BAP3DA dan Bagian Organisasi Setda Kebumen; dan
- f. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam implementasi kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Solusi atas hasil rekomendasi LHE SAKIP adalah terhadap RPJMD sudah tidak bisa dilakukan perubahan sehingga difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target untuk didorong capaian kinerjanya, menyusun *Casecading* yang difasilitasi oleh BAP3DA sehingga semua Perangkat Daerah mempunyai dokumen *Casecading*, pelaksanaan Paparan Capaian IKU Bupati Kebumen Tahun 2020 dan Capaian Perjanjian Kinerja

Tahun 2020 oleh Kepala Perangkat Daerah dihadapan Bapak Bupati sehingga diharapkan dapat meningkatkan implementasi AKIP dan Kinerja.

Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil kerja bersama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten tersebut, secara khusus dilaksanakan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Penyerapan anggaran tidak sepenuhnya karena adanya efisiensi dengan menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik (e-Letter) sehingga mengurangi biaya/belanja perjalanan, belanja perjalanan dinas tidak dilaksanakan dikarenakan berkurangnya intensitas undangan keluar daerah dan honor Narasumber tidak terealisasi secara maksimal karena merupakan sisa dari penyediaan dari yang kami rencanakan, karena narasumber yang hadir tidak sesuai dengan yang direncanakan. Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan yaitu Penyusunan LKjIP Bupati berdasarkan IKU Bupati yang menjadi tanggungjawab beberapa Perangkat Daerah dalam analisis capaian kinerja belum semua Perangkat Daerah mendiskripsikan dengan jelas usaha/upaya, kendala dan solusi dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

25. Opini BPK atas LKPD

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk target tahun 2021 indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPD 2020 terealisasi WTP yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2020 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Capaian kinerja indikator Opini BPK atas LKPD sebesar 100% dengan kriteria capaian kinerja Baik. Pemberian Opini WTP dari BPK RI menggambarkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara umum memadai
- c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Sampai dengan saat laporan ini disusun, LKPD tahun 2021 masih dalam tahap pendahuluan proses audit oleh BPK.

26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Rumus perhitungan indikator sasaran ini adalah Jumlah ASN ditambah Pegawai BUMD yang membayar Zakat Melalui BAZNAS dibagi Jumlah Total ASN ditambah total Pegawai BUMD dikali seratus persen.

Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan BAZ, capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2021 adalah 52,43% dengan target 80% pada tahun 2021 atau tercapai 65,45%. Menurunnya PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kebumen, dikarenakan belum seluruhnya PNS/ Pegawai BUMD di Kabupaten Kebumen yang melakukan MoU dengan bank untuk pemotong gajinya kepada BAZNAS untuk zakat dan infak, dimana yang semula pembayarannya melalui pemotongon langsung oleh Bendahara Gaji masing-masing OPD. Dengan demikian perlunya BAZNAS Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan fasilitasi PNS/Pegawai BUMD melakukan MoU dengan bank.

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta menghambat investasi.

Pada tahun 2020 jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan sebanyak 14 Peraturan Daerah, 105 Peraturan Bupati dan 504 Surat Keputusan Bupati. Berbicara mengenai peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) jenis: a. peraturan gubernur; dan b. peraturan bupati/walikota. Masing-masing peraturan kepala daerah tersebut disusun oleh penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Peraturan gubernur disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berdasarkan kewenangan. Sehingga dalam penyusunannya salah satu dari unsur/syarat pembentukan peraturan gubernur tersebut harus terpenuhi.

Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah memiliki kedudukan strategis, karena berlandaskan konstitusional yang diatur

dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Hal tersebut untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki.

Peraturan Bupati (Perbup) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atas wewenangnya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan secara tertulis. Kepala daerah menetapkan peraturan bupati berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Berikut ini data Perda dan Perbup yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2020 yang bersifat strategis :

Tabel 3. 96 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Daerah

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
PERATURAN DAERAH			
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law)
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen diarahkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha, sehingga diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas dan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
	Pembangunan Daerah		prinsip yang melekat agar Pembangunan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5(lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran
PERATURAN BUPATI			
8.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat/obat Kontrasepsi Dan Non Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Di Kabupaten Kebumen	a. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran di semua tingkatan wilayah.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
9.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2021	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Standarisasi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian pembangunan bidang pekerjaan umum
10.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah	meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan/atau pelanggaran disiplin ASN dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan bersih.
11.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2021 tentang Belanja Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro Yang Terdampak <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Dalam rangka pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang usahanya terdampak <i>Corona Virus Disease 2019</i> yang bertujuan sebagai tambahan modal berusaha
12.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Kecil	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/ perbankan agar sektor usaha mikro kecil

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
	di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021	tentang Cipta Kerja	tetap dapat bertahan dan berkembang
13.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta sebagai pedoman pelaksanaan pemberhentian perangkat desa agar berjalan tertib dan lancar
14.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta sebagai pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
15.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Sebagai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus yang berasal dari Anggaran dan Belanja Daerah kepada Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
16.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana	membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
		telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
17.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2021 tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pemerintah daerah, desa, dan pihak-pihak lainnya dalam rangka pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis serta berkelanjutan
18.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	sebagai pedoman pelaksanaan hibah dan bantuan sosial agar berjalan dengan transparan dan akuntabel
19.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem <i>Online Single Submission</i>	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik
20.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah	meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup
21.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2021 tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Permakanan Kepada Penyandang	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77	Upaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan makanan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar terhindar dari resiko sosial

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
	Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen	Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah c. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	
22.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	untuk menanggulangi keterlambatan pembayaran lelang ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan pada saat musim ikan
23.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen	memberikan pedoman mengenai kewenangan Bupati selaku Pemegang Saham dalam RUPS, Perencanaan, Kerjasama, Pelaporan, Pembagian Laba serta Evaluasi pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam hal pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, serta mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan serta penghasilan Komisaris dan Direksi
24.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma	a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma	memberikan pedoman mengenai kewenangan Bupati selaku Pemegang Saham dalam RUPS, Perencanaan, Kerjasama, Pinjaman, Pelaporan, Pembagian Laba serta Evaluasi pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda), mewujudkan transparansi,

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
			efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam hal pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, serta mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan serta penghasilan Komisaris dan Direksi
25.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa	a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa	memberikan pedoman mengenai kewenangan Bupati selaku KPM, Perencanaan, Kerjasama, Pinjaman, Pelaporan, Pembagian Laba serta Evaluasi pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam hal pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi, serta mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan serta penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi.
26.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 39 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen	untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
27.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana , Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
28.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
29.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
30.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus- Acquired Immuno Deficiency Syndrome Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2016	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrom	Agar pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Kabupaten Kebumen dapat terkoordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan stakeholder terkait; dan tingkat keberhasilan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Kabupaten Kebumen dapat terukur dengan indikator-indikator capaian yang telah ditetapkan untuk setiap tahapannya
31.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
32.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta dasar pedoman pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten kebumen
33.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa agar pelaksanaan pemberhentian Kepala Desa sesuai aturan dan tidak menimbulkan konflik atau

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
			permasalahan hukum di kemudian hari
34.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 104 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah
35.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	guna kelancaran dan ketertiban proses akuntansi dalam rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah
36.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	guna mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen secara transparan dan akuntabel
37.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	dalam rangka mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.
38.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan	a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-	mengoptimalkan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah kas Desa sesuai kewenangan hak

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
	Tanah Kas Desa	Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa	asal usul Desa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
39.	Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	kelancaran dan ketertiban penyusunan dan penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perencanaan pembangunan Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. b. Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai dengan tahapan perencanaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. Perangkat Daerah dan DPRD mempunyai pemahaman yang sama dalam menelaah usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
KEPUTUSAN BUPATI			
40.	Keputusan Bupati Kebumen Nomor 045/14 Tahun 2021 tentang Sasaran Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
41.	Keputusan Bupati Kebumen Nomor 460/16 Tahun 2021 tentang Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021	Peraturan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021	mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
42.	Keputusan Bupati Kebumen Nomor 432/132 Tahun 2021 tentang Status Bangunan Djawatan Kesehatan Tentara Gombong Sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Kebumen	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	untuk memberi kepastian hukum mengenai situs Bangunan Djawatan Gombong sebagai Cagar Budaya agar terlindungi dan dilestarikan
43.	Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700/158 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
44.	Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/167 Tahun 2021 tentang Lokasi Fokus dan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Tahun 2022 di Kabupaten Kebumen	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi di Tahun 2022	dalam rangka percepatan penurunan stunting agar penanganan stunting di Kabupaten Kebumen secara terintegrasi dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
45.	Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/228 Tahun 2021 tentang Pembentukan TimVaksinasi <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan vaksinasi agar masyarakat dapat terlayani secara cepat dan mudah sehingga masyarakat Kebumen bisa terhindar dari virus Covid-19
46.	Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/273 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Kebumen	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> di Provinsi Jawa Tengah	penanganan stunting di Kabupaten Kebumen secara terintegrasi dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan agar tidak ada lagi kasus stunting di Kabupaten Kebumen
47.	Keputusan Bupati Kebumen Nomor 180/420 Tahun 2021 tentang Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum	Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat budaya hukum

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen, 2021

3.3. Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2020

Tabel 3. 97 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2020 dan Rencana tindak lanjut

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pemerintah Daerah menegaskan komitmennya dalam peningkatan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah tentunya dengan perencanaan yang matang tertuang dalam dokumen terencana dalam rangka memprioritaskan pembangunan daerah;	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; BAPPEDA	Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan daerah akan ditempuh dengan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial; Pengembangan inovasi dan teknologi informasi; Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM;	Capaian PAD sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga ketika terjadi penurunan pada masa Pandemi capaian PAD khususnya Retribusi Daerah tidak bisa mencapai 100%	Akan dilakukan optimalisasi pendapatan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial; Pengembangan inovasi dan teknologi informasi; Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM;
2	Pemerintah Daerah fokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam teknologi informasi;	Seluruh OPD	Peningkatan kualitas SDM bidang TIK melalui Sosialisasi dan Pelatihan;	Pembatasan mengumpulkan peserta karena pandemi Covid-19	Sosialisasi dan pelatihan melalui media online / daring
3	Pemerintah Daerah segera menyempurnakan bank data	Dinas Kominfo;	a. Kominfo sebagai walidata telah mengembangkan aplikasi Satu Data	a. Indikator yang diproduksi oleh Perangkat Daerah	a. Mengefektifkan dan mengoptimalkan

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	sektoral berbasis teknologi informasi yang menghimpun seluruh data-data sektoral yang akan menjadi rujukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta mengatur kelembagaannya agar proses pendataan, input, validasi dan penyajian datanya dapat berjalan dengan optimal. Pemerintah Daerah harus dapat memastikan pula bahwa data-data tersebut memiliki validitas yang tinggi dan dapat diakses dengan mudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;	BAPPEDA	Kebumen yang dapat diakses melalui https://satudata.kebumenkab.go.id/, Perangkat Daerah sebagai produsen data telah menyampaikan data sektoral melalui aplikasi dengan tahapan input dan validasi data; b. Pemkab Kebumen telah menetapkan Peraturan Bupati Kebumen No. 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Kebumen. Sebagai tindak lanjut telah ditetapkan Forum Satu Data dan Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kebumen serta telah dibangun Portal Satu Data Kebumen sebagai Sumber Data Tunggal di Kabupaten Kebumen; c. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/419 Tahun 2021 tentang	sangat dinamis atau belum semuanya memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; b. Terdapat data Makro Kabupaten yang merupakan kewenangan instansi Vertikal, sehingga perlu kerjasama dengan instansi terkait;	Forum Satu Data Kabupaten Kebumen. b. Membangun kerjasama/kemitraan dengan Instansi Vertikal (BPS) sebagai Pembina Satu Data Kebumen

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
			Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Kebumen; d. Keputusan Bupati. Kebumen Nomor 050/416 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kebumen; e. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Nomor 048/1292 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data dan Penyebarluasan Data.		
4	Terkait dengan SiLPA tahun 2021, Badan Anggaran merekomendasikan agar penggunaannya diarahkan kepada pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen terutama terkait dengan infrastruktur jalan (JAMU SEGER), penguatan sistem elektronik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; BAPPEDA	Kebijakan penggunaan SiLPA akan disesuaikan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun berkenaan	Sebagian besar SiLPA Daerah merupakan SiLPA mandatory/transitoris yang penggunaannya sudah ditentukan	Akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
	peningkatan kualitas layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dan tetap memperhatikan serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku				

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Tingkat Pemerintah tingkat atasnya

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen adalah DIPA-090.02.4.039600/2021. Tugas Pembantuan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 diterima dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia melalui Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.710.138.000,- (*sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) untuk pembangunan Pasar Dorowati Kecamatan Klirong dan Pasar Karangjambu Kecamatan Sruweng.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 9.710.138.000,- terealisasi, Rp. 9.643.114.663 atau sebesar 99,3%.

Tabel 4. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2021

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGITAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementrian Perdagangan RI	DIPA-090.02.4.039600/2021	Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan / Output Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen	9.710.138.000	9.643.114.663	99,31%	2	100%	

Sumber : data diolah 2021

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkat Pemerintahan dibawahnya

Tabel 4. 2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkat Pemerintahan dibawahnya

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN RINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERI TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepala Pemerintahan Desa	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	11.061.467.000,00	11.061.467.000,00	100%	100%	100%	DISPERMADES P3A
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	2.714.713.000,00	2.714.713.000,00	100%	100%	100%	DISPERMADES P3A
3	Belanja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	167.348.912.000,00	167.346.134.000,00	99.98%	99.98% Tidak terealisasi sebesar Rp2,778,000 Karena ada perangkat desa yang meninggal dunia	99,98%	DISPERMADES P3A
4	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Kepada Desa (Dana Desa)	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	405.260.453.000,00	405.260.453.000,00	100%	100%	100%	DISPERMADES P3A

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN RINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERI TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
5	Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Kades dan Perangkat Desa	449 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	5.453.964.000,00	5.094.795.000,00	93,41%	93,41% Tidak terealisasi sebesar Rp359.169.000,00 Karena ada Kades dan perangkat desa yang meninggal dunia dan pensiun.	93,41%	DISPERMADES P3A
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	7.075.415.000,00	7.060.414.100,00	99,79%	100%	100%	DISPERMADES, DISPORAWISATA, BAGIAN KERSA, DISPERKIMLH
7	Pembangunan Kawasan Perdesaan	23 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	1.140.000.000	1.140.000.000	100%	100%	100%	DISPERMADES P3A
8	Bantuan Keuangan Operasional TPQ	449 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	2.245.000.000,00	2.235.000.000	99,5%	Terealisasi 447 desa, 2 Desa tidak mencairkan karena tidak memiliki TPQ yaitu Desa Karangglonggong Kec. Klirong dan Desa Kambang Sari Kec. Alian,	99,5%	BADAN KESRA SETDA

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN RINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERI TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
9	Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	11 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	2.155.000.000,00	2.155.000.000,00	100%	100%	100%	DISPERMADES P3A

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kebumen, 2021

4.2. Hambatan Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memperhatikan tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan mencapai 99% dimana tidak terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 dan capaian kinerjanya serta permasalahan dan solusinya diwujudkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Periode Tahun 2021 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini merupakan Laporan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Sistematika penulisan LKPJ ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perihal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021, menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup positif yang ditandai adanya peningkatan indikator-indikator kinerja dengan harapan dapat membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya berbagai kendala dan permasalahan. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target dan perolehan hasil yang optimal. Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, semoga dapat memberikan manfaat dan semoga **Allah Subhanahuwata'ala** senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridhonya kepada kita semua dalam memajukan Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN

Laporan Rekap Transaksi Zakat Semua Bank
 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen
 Periode Januari-Desember 2021

NO	DINAS	JANUARI - DESEMBER		
		ZAKAT	INFAQ	TOTAL
1	2	3	4	5
	Instansi Vertikal			
1	Kantor Kementerian Agama KBM	198.000.000		198.000.000
	Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor Daerah			
2	Kantor Sekretariat Daerah	72.643.015	2.112.668	74.755.683
3	BAP3DA	35.489.195	5.592.147	41.081.342
4	INSPEKTORAT	37.238.464	5.558.930	42.797.394
5	BAPPENDA	49.439.311	536.533	49.975.844
6	BPKAD	42.018.736	1.113.232	43.131.968
7	BKPPD	41.327.400	5.332.500	46.659.900
8	SEKRETARIAT DPRD	8.155.050	450.000	8.605.050
9	DPRD KAB. Kebumen	-	-	-
10	DINAS KESEHATAN	44.473.885	9.961.524	54.435.409
11	DPU PR	99.700.885	14.711.869	114.412.754
12	DISHUB	11.664.200	3.866.000	15.530.200
13	DISPERINDAG	85.624.642	5.041.000	90.665.642
14	DINSOS PPKB	14.921.753	1.920.000	16.841.753
15	DISPERKIM LH	63.238.761	6.713.000	69.951.761
16	DINLUTKAN	30.369.048	1.865.000	32.234.048
17	DISNAKER KUKM	29.865.544	456.000	30.321.544
18	DISTAPANG	128.782.666	21.999.648	150.782.314
19	KESBANGPOL	7.136.724	1.440.390	8.577.114
20	DISPERMADES P3A	44.278.945	3.380.158	47.659.103
21	DISPORAWISATA	15.137.220	1.324.000	16.461.220
22	DISKOMINFO	38.995.872	-	38.995.872
23	DPM PTSP	33.366.654	1.771.870	35.138.524
24	DISDUKCAPIL	16.213.000	2.195.000	18.408.000
25	SATPOL PP	948.000	-	948.000
26	Sekretariat KPU	-	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.095.675	1.050.000	22.145.675
28	BPBD	28.320.000	53.000	28.373.000
29	RSUD dr.Soedirman Kebumen	347.806.290	61.385.000	409.191.290
30	RSUD Prembun	25.394.740	27.426.511	52.821.251
31	DINAS PENDIDIKAN	101.121.023	16.556.003	117.677.026
32	BKKBN	29.285.000	3.465.000	32.750.000
33	PLKB	3.085.000	315.000	3.400.000
	BUMN/BUMD			
34	PD BPR BKK Kbm Cab. Ayah	11.065.780	190.000	11.255.780
35	PD BPR BKK Kbm Cab. Buayan	1.991.960	2.296.300	4.288.260
36	PD BPR BKK Kbm Cab. Puring	-	1.291.300	1.291.300
37	PD BPR BKK Kbm Cab. Petanahan	3.049.200	635.000	3.684.200
38	PD BPR BKK Kbm Cab. Klirong	7.853.917	1.725.000	9.578.917
39	PD BPR BKK Kbm Cab. Ambal	300.000	1.110.000	1.410.000
40	PD BPR BKK Kbm Cab. Mirit	-	1.710.000	1.710.000

NO	DINAS	JANUARI - DESEMBER		
		ZAKAT	INFAQ	TOTAL
1	2	3	4	5
41	PD BPR BKK Kbm Cab. Prembun	2.553.274	240.000	2.793.274
42	PD BPR BKK Kbm Cab. Kutowinangun	130.000	1.215.000	1.345.000
43	PD BPR BKK Kbm Cab. Alian	2.950.032	1.735.000	4.685.032
44	PD BPR BKK Kbm /KPO	10.095.256	-	10.095.256
45	PD BPR BKK. Keb. KTR Pusat	24.796.268	5.790.000	30.586.268
46	PD BPR BKK Kbm Cab. Pejagoan	-	1.410.000	1.410.000
47	PD BPR BKK Kbm Cab. Adimulyo	2.172.000	350.000	2.522.000
48	PD BPR BKK Kbm Cab. Kuwarasan	-	1.310.000	1.310.000
49	PD BPR BKK Kbm Cab. Rowokele	1.609.704	2.800.000	4.409.704
50	PD BPR BKK Kbm Cab. Sempor	170.000	1.375.000	1.545.000
51	PD BPR BKK Kbm Cab. Gombong	6.042.172	1.220.000	7.262.172
52	PD BPR BKK Kbm Cab. Karanganyar	1.500.000	715.000	2.215.000
53	PD BPR BKK Kbm Cab. Karanggayam	-	995.000	995.000
54	PD BPR BKK Kbm Cab. Sadang	345.872	1.390.000	1.735.872
55	PD BPR Kebumen	5.422.000	330.000	5.752.000
56	BPD Bank Jateng Kebumen	-	-	-
57	KANTOR POS KEBUMEN	-	-	-
58	PD Apotik Lukulo	160.000	2.295.000	2.455.000
59	PDAM Kabupaten Kebumen	-	-	-
	Kecamatan			
60	Kantor Kecamatan Kebumen	1.911.000	30.000	1.941.000
61	Kantor Kecamatan Alian	2.347.744	115.000	2.462.744
62	Kantor Kecamatan Karangsambung	8.784.914	200.000	8.984.914
63	Kantor Kecamatan Prembun	18.537.248	280.000	18.817.248
64	Kantor Kecamatan Mirit	11.669.303	205.000	11.874.303
65	Kantor Kecamatan Kutowinangun	8.480.500	2.195.000	10.675.500
66	Kantor Kecamatan Ambal	6.789.235	1.705.000	8.494.235
67	Kantor Kecamatan Buluspesantren	12.063.470	2.100.000	14.163.470
68	Kantor Kecamatan Pejagoan	3.746.015	308.000	4.054.015
69	Kantor Kecamatan Klirong	11.540.127	-	11.540.127
70	Kantor Kecamatan Petanahan	16.681.932	-	16.681.932
71	Kantor Kecamatan Sruweng	8.242.800	1.170.000	9.412.800
72	Kantor Kecamatan Karanganyar	15.695.379	7.309.000	23.004.379
73	Kantor Kecamatan Karanggayam	167.500	3.060.000	3.227.500
74	Kantor Kecamatan Adimulyo	427.500	100.000	527.500
75	Kantor Kecamatan Kuwarasan	2.577.720	10.000	2.587.720
76	Kantor Kecamatan Puring	2.209.459	100.000	2.309.459
77	Kantor Kecamatan Gombong	6.700.343	1.361.000	8.061.343
78	Kantor Kecamatan Sempor	2.606.808	130.000	2.736.808
79	Kantor Kecamatan Buayan	7.743.860	-	7.743.860
80	Kantor Kecamatan Rowokele	1.385.255	-	1.385.255
81	Kantor Kecamatan Ayah	7.230.229	-	7.230.229
82	Kantor Kecamatan Sadang	11.902.878	-	11.902.878
83	Kantor Kecamatan Poncowarno	2.979.500	710.000	3.689.500
84	Kantor Kecamatan Padureso	4.123.308	1.730.000	5.853.308
85	Kantor Kecamatan Bonorowo	15.410.000	265.000	15.675.000
	Korwil Dinas Pendidikan			
86	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Ayah	7.480.885	3.340.000	10.820.885

NO	DINAS	JANUARI - DESEMBER		
		ZAKAT	INFAQ	TOTAL
1	2	3	4	5
87	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Buayan	181.454.464	16.162.760	197.617.224
88	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Puring	244.000	19.468.000	19.712.000
89	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Petanahan	7.785.082	2.176.000	9.961.082
90	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Klirong	40.905.497	22.883.000	63.788.497
91	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Buluspesantren	9.428.217	1.610.000	11.038.217
92	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Ambal	57.973.220	25.342.000	83.315.220
93	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Mirit	158.268.563	11.635.000	169.903.563
94	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Bonorowo	14.808.330	18.975.000	33.783.330
95	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Prembun	4.901.400	13.682.800	18.584.200
96	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Padureso	-	20.908.000	20.908.000
97	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Kutownangun	67.577.100	14.483.500	82.060.600
98	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Alian	59.925.202	17.623.492	77.548.694
99	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Poncowarno	45.809.437	10.119.000	55.928.437
100	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Kebumen	200.917.601	3.575.000	204.492.601
101	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Pejagoan	62.165.669	24.973.048	87.138.717
102	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Sruweng	15.689.582	15.065.000	30.754.582
103	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Adimulyo	72.949.998	28.675.000	101.624.998
104	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Kuwarasan	112.057.705	7.415.000	119.472.705
105	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Rowokele	65.082.414	1.400.000	66.482.414
106	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Sempor	10.573.120	3.076.750	13.649.870
107	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Gombong	11.037.651	4.617.375	15.655.026
108	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Karanganyar	4.776.000	4.130.000	8.906.000
109	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Karanggayam	30.256.776	13.641.000	43.897.776
110	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Karngsambng	23.322.820	16.201.000	39.523.820
111	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Sadang	3.239.000	9.850.000	13.089.000
	Puskesmas			
112	Puskesmas Adimulyo	4.618.290	2.101.500	6.719.790
113	Puskesmas Prembun	21.386.140	2.139.080	23.525.220
114	Puskesmas Puring	33.163.600	1.360.000	34.523.600
115	Puskesmas Karangsambung	20.392.350	6.761.000	27.153.350
116	Puskesmas Gombong 1	10.026.500	2.788.250	12.814.750
117	Puskesmas Ayah	600.000	2.020.000	2.620.000
118	Puskesmas Poncowarno	-	4.683.000	4.683.000
119	Puskesmas Adimulyo	4.791.000	3.990.000	8.781.000
120	Puskesmas Alian	2.460.000	-	2.460.000
121	Puskesmas Gombong 2	8.788.200	2.374.000	11.162.200
122	Puskesmas Karanggayam 1	9.390.000	-	9.390.000
123	Puskesmas Klirong 2	5.545.360	2.595.000	8.140.360
124	Puskesmas Kebumen 3	7.960.000	2.100.000	10.060.000
125	Puskesmas Mirit	10.972.800	2.546.600	13.519.400
126	Puskesmas Karanggayam 2	250.000	220.000	470.000
127	Puskesmas Kebumen 2	3.000.000	3.940.000	6.940.000
128	Puskesmas Rowokele	8.005.000	-	8.005.000
129	Puskesmas Sruweng	1.064.000	320.000	1.384.000
130	Puskesmas Buluspesantren 2	-	180.000	180.000
131	Puskesmas Buluspesantren 3	-	180.000	180.000
132	Puskesmas Sempor 1	6.547.440	2.395.471	8.942.911

NO	DINAS	JANUARI - DESEMBER		
		ZAKAT	INFAQ	TOTAL
1	2	3	4	5
133	Puskesmas Ayah 2	200.000	340.000	540.000
	Sekolah			
114	SMPN 1 Ayah	8.136.475	-	8.136.475
115	SMPN 2 Ayah	-	-	-
116	SMPN 1 Buayan	6.021.400	-	6.021.400
117	SMPN 2 Buayan	4.375.290	1.631.000	6.006.290
118	SMPN 1 Puring	9.051.300	-	9.051.300
119	SMPN 2 Puring	14.395.820	-	14.395.820
120	SMPN 1 Petanahan	6.715.000	-	6.715.000
121	SMPN 1 Klirong	3.865.000	1.020.000	4.885.000
122	SMPN 1 Buluspesantren	13.903.500	245.000	14.148.500
123	SMPN 2 Buluspesantren	13.590.000	-	13.590.000
124	SMPN 1 Ambal	15.764.700	1.142.000	16.906.700
125	SMPN 2 Ambal	-	-	-
126	SMPN 1 Mirit	16.815.550	2.635.000	19.450.550
127	SMPN 2 Mirit	8.026.905	3.240.000	11.266.905
128	SMPN 1 Prembun	17.645.370	2.680.000	20.325.370
129	SMPN 2 Prembun	3.443.000	9.617.000	13.060.000
130	SMPN 1 Kutowinangun	15.509.000	2.145.000	17.654.000
131	SMPN 2 Kutowinangun	22.277.900	2.450.000	24.727.900
132	SMPN 3 Kutowinangun	-	1.940.000	1.940.000
133	SMPN 1 Alian	2.059.420	480.000	2.539.420
134	SMPN 1 Poncowarno	4.541.000	2.268.000	6.809.000
135	SMPN 1 Kebumen	6.141.840	920.000	7.061.840
136	SMPN 2 Kebumen	16.908.370	7.215.000	24.123.370
137	SMPN 3 Kebumen	8.618.100	1.460.000	10.078.100
138	SMPN 4 Kebumen	16.606.925	-	16.606.925
139	SMPN 5 Kebumen	7.375.378	-	7.375.378
140	SMPN 6 Kebumen	2.317.000	955.000	3.272.000
141	SMPN 7 Kebumen	13.853.000	3.815.000	17.668.000
142	SMPN 1 Pejagoan	8.295.615	10.140.225	18.435.840
143	SMPN 2 Pejagoan	7.407.725	2.810.427	10.218.152
144	SMPN 1 Sruweng	10.104.796	4.880.000	14.984.796
145	SMPN 2 Sruweng	7.000.000	6.440.000	13.440.000
146	SMPN 1 Adimulyo	8.718.000	1.450.500	10.168.500
147	SMPN 2 Adimulyo	19.913.000	-	19.913.000
148	SMPN 1 Kuwarasan	11.782.680	350.000	12.132.680
149	SMPN 1 Rowokele	3.399.163	1.980.000	5.379.163
150	SMPN 1 Sempor	4.730.194	125.000	4.855.194
151	SMPN 2 Sempor	6.155.000	1.770.000	7.925.000
152	SMPN 1 Gombong	4.897.000	-	4.897.000
153	SMPN 2 Gombong	7.623.040	-	7.623.040
154	SMPN 3 Gombong	7.376.200	1.671.000	9.047.200
155	SMPN 4 Gombong	7.800.000	-	7.800.000
156	SMPN 1 Karanganyar	3.274.410	250.000	3.524.410
157	SMPN 2 Karanganyar	20.004.000	500.000	20.504.000
158	SMPN 3 Karanganyar	-	-	-
159	SMPN 1 Karanggayam	672.500	397.500	1.070.000

NO	DINAS	JANUARI - DESEMBER		
		ZAKAT	INFAQ	TOTAL
1	2	3	4	5
160	SMPN 2 Karanggayam	877.000	-	877.000
161	SMPN 1 Karangsambung	13.249.254	4.515.000	17.764.254
162	SMPN 2 Karangsambung	9.853.000	-	9.853.000
163	SMPN 1 Padureso	6.627.865	-	6.627.865
164	SMPN 2 Rowokele	4.323.683	980.000	5.303.683
165	SMPN 1 Sadang	2.897.300	1.770.000	4.667.300
166	SMP N 1 Bonorowo	787.500	375.000	1.162.500
167	SMAN 1 Kebumen	157.500	4.217.000	4.374.500
168	SMAN 2 Kebumen	3.000.000	5.000.000	8.000.000
169	SMAN 1 Prembun	12.272.033	3.820.000	16.092.033
170	SMAN 1 Kutowinangun	6.961.980	170.000	7.131.980
171	SMAN 1 Pejagoan	33.965.800	-	33.965.800
172	SMAN 1 Karanganyar	12.544.000	213.000	12.757.000
173	SMAN 1 Gombang	-	-	-
174	SMAN 1 Rowokele	6.040.000	-	6.040.000
175	SMAN 1 Klirong	8.876.600	-	8.876.600
176	SMAN 1 Petanahan	31.622.300	-	31.622.300
177	SMAN 1 Buluspesantren	9.364.500	2.631.000	11.995.500
178	SMAN 1 Ayah	687.023	-	687.023
179	SMAN 1 Mirit	14.270.978	305.000	14.575.978
180	SMAN 1 Karangsambung	8.418.394	-	8.418.394
181	SMKN 1 Kebumen	7.861.286	4.800.000	12.661.286
182	SMKN 2 Kebumen	9.750.000	2.700.000	12.450.000
183	SMKN 1 Karanganyar	9.186.729	100.000	9.286.729
184	SMKN 1 Gombang	61.801.887	-	61.801.887
185	SMK N 1 Alian	5.505.331	-	5.505.331
186	SMKN 1 Ambal	-	-	-
187	SMKN 1 Karanggayam	9.153.900	-	9.153.900
188	SMK N 1 Puring	1.512.867	3.496.000	5.008.867
189	SMA AL-Kahfi Somalangu	-	-	-
190	SMK Tamtama Karanganyar	-	7.032.000	7.032.000
191	MTs N 1 Kebumen	58.779.200	-	58.779.200
192	MTs N 2 Kebumen	83.977.300	-	83.977.300
193	MTs N 3 Kebumen	115.403.907	-	115.403.907
194	MTs N 4 Kebumen	34.330.807	-	34.330.807
195	MTs N 5 Kebumen	45.227.100	-	45.227.100
196	MTs N 6 Kebumen	39.370.008	-	39.370.008
197	MTs N 7 Kebumen	65.191.100	-	65.191.100
198	MTs N 8 Kebumen	62.892.100	-	62.892.100
199	MAN 1 Kebumen	60.873.000	-	60.873.000
200	MAN 2 Kebumen	84.510.800	-	84.510.800
201	MAN 3 Kebumen	42.287.800	-	42.287.800
202	MAN 4 Kebumen	24.482.000	-	24.482.000
203	MI N 1 Kebumen	26.015.183	-	26.015.183
204	MI N 2 Kebumen	17.600.411	-	17.600.411
205	MI N 3 Kebumen	12.471.600	-	12.471.600
206	MI N 4 Kebumen	17.421.000	-	17.421.000
207	Guru TK Kec. Sempor	-	5.475.000	5.475.000

NO	DINAS	JANUARI - DESEMBER		
		ZAKAT	INFAQ	TOTAL
1	2	3	4	5
	UPZ Desa			
208	UPZ Desa Kedungwinangun	510.000	-	510.000
209	UPZ Desa Kawedusan	1.257.000	-	1.257.000
210	UPZ Desa Ambarwinangun	5.702.000	-	5.702.000
211	UPZ Desa Balingasal	1.650.000	-	1.650.000
212	UPZ Desa Banjareja, Kuwarasan	8.842.000	-	8.842.000
213	UPZ Desa Tlogosari, Ayah	-	7.000.000	7.000.000
214	UPZ Desa Lajer, Ambal	625.000	-	625.000
215	UPZ Desa Kedungpuji, Gombong	4.005.000	6.700.500	10.705.500
216	UPZ Desa Padureso, Padureso	-	300.000	300.000
217	UPZ Desa Karangpule, Sruweng	393.000	-	393.000
218	UPZ Desa Penusupan, Sruweng	5.660.000	14.511.000	20.171.000
219	UPZ Desa Dorowati, Klirong	1.110.000	195.000	1.305.000
220	UPZ Kel. Panjatan, Karanganyar	960.000	2.132.700	3.092.700
221	UPZ Kel. Plarangan, Karanganyar	-	958.000	958.000
222	UPZ Desa Demangsari, Ayah	3.982.200	-	3.982.200
223	UPZ Desa Selotumpeng	900.000	-	900.000
224	UPZ Desa Sidomulyo, Ambal	10.554.000	-	10.554.000
225	UPZ Desa Blengorwetan, Ambal	4.179.600	-	4.179.600
226	UPZ Desa Jogomulyo, Buayan	4.813.000	-	4.813.000
227	UPZ Desa Peneket, Ambal	11.643.000	2.156.000	13.799.000
228	UPZ Desa Wadasmalang	671.000	-	671.000
229	UPZ Desa Nampudadi	4.615.800	-	4.615.800
230	UPZ Desa Bonjok, Adimulyo	12.052.300	-	12.052.300
231	UPZ Desa Purwoharjo, Puring	1.304.000	-	1.304.000
232	UPZ Desa Buluspesantren	19.940.500	-	19.940.500
233	UPZ Desa Geblug, Buayan	2.558.500	-	2.558.500
234	UPZ Desa Gebangsari, Klirong	819.000	-	819.000
235	UPZ Desa Pesalakan, Kutowinangun	6.745.500	-	6.745.500
236	UPZ Desa Sitirejo, Klirong	2.602.500	-	2.602.500
237	UPZ Desa Wagirpandan, Rowokele	1.500.000	-	1.500.000
238	UPZ Desa Kalijering, Padureso	330.000	-	330.000
239	UPZ Desa Gemeksekti, Kebumen	570.000	-	570.000
240	UPZ Desa Klegenrejo, Klirong	2.500.000	-	2.500.000
241	UPZ Desa Kaleng, Puring	1.000.000	-	1.000.000
242	UPZ Desa Klegenwonosari, Klirong	17.000.000	-	17.000.000
243	UPZ Desa Setrojenar, Buluspesantren	3.218.000	-	3.218.000
244	UPZ Desa Kedaleman Kulon, Puring	450.000	-	450.000
245	UPZ IAINU Kebumen	-	3.600.000	3.600.000
246	UPZ Desa Caruban, Adimulyo	-	2.000.000	2.000.000
247	UPZ Desa Kaibonpetangkuran	750.000	-	750.000
248	UPZ Desa Soka	2.196.000	-	2.196.000
249	UPZ Kelurahan Kebumen	1.200.000	-	1.200.000
250	UPZ Desa Pakuran	270.000	617.100	887.100
251	UPZ Desa Jatiroto, Buayan	4.758.000	-	4.758.000
252	UPZ Kelurahan Tamanwinangun	2.457.000	-	2.457.000
253	UPZ Desa Menganti, Sruweng	7.539.000	-	7.539.000
254	UPZ Desa Candirenggo, Ayah	-	600.000	600.000

NO	DINAS	JANUARI - DESEMBER		
		ZAKAT	INFAQ	TOTAL
1	2	3	4	5
255	UPZ Desa Purwodadi	2.910.000	972.000	3.882.000
256	UPZ Desa Tlogodepok, Mirit	275.000	-	275.000
257	UPZ Desa Gandusari, Kuwarasan	2.150.500	681.500	2.832.000
258	UPZ Desa Wergonayan, Mirit	1.340.000	-	1.340.000
259	UPZ Desa Sempor	-	2.600.000	2.600.000
260	UPZ Kelurahan Jatiluhur	10.000.000	4.500.000	14.500.000
261	UPZ Desa Arjowinangun	1.740.000	-	1.740.000
262	UPZ Desa Roworejo	1.000.000	-	1.000.000
263	UPZ Desa Karangsembung	1.650.000	-	1.650.000
264	UPZ Desa Pesuruhan, Puring	4.158.000	-	4.158.000
265	UPZ Desa Tambaksari	2.707.800	1.282.500	3.990.300
266	UPZ Desa Ngoraji, Buayan	482.700	1.809.000	2.291.700
267	UPZ Desa Trikarso, Sruweng	650.000	-	650.000
268	UPZ Desa Rogodono, Kuwarasan	-	1.500.000	1.500.000
269	UPZ Desa Madurejo, Puring	1.310.000	-	1.310.000
270	UPZ Desa Ambalresmi	1.260.000	-	1.260.000
271	UPZ Desa Kalirancang, Alian	-	331.000	331.000
272	UPZ Desa Ayah, Ayah	2.500.000	-	2.500.000
273	UPZ Desa Kebakalan	-	450.000	450.000
274	UPZ Desa Bumiagung	-	1.002.000	1.002.000
TOTAL		5.084.568.064	818.984.161	5.903.552.225

Sumber: Baznas Kabupaten Kebumen Tahun 2021